

Laporan Kinerja

Semester I
Tahun 2026

Balai Kekarantinaan Kesehatan
Kelas I Samarinda



TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BKK KELAS I SAMARINDA TAHUN 2026

Pengarah:

Ratna Sari Dewi, S.T., M.Kes.

Kontributor:

Ratna Sari Dewi, S.T., M.Kes.

Mur Prasetyaningrum, S.K.M., M.P.H.

Octy Widyasari, S.K.M.

Heny Surya Widiyaningsih, S.K.M.

Muhammad Noor, S.S.T.

Lisa Anggriani, S.K.M.

Luthfi Setiawan, S.K.M.

Alwan Zakki Nozomi, S.K.M.

Muhammad Fawzi, S.Kom.

Esa Muhammad Irsyad, S.E.

Triyasmi Mayanedtha, A.Md.K.L.

Syafransyah

Editor:

Lisa Anggriani, S.K.M.

Esa Muhammad Irsyad, S.E.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenkes RI Nomor 2416/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan.

Penyusunan Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada segenap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja juga merupakan sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani.

Laporan kinerja ini tentunya masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik untuk penyempurnaan laporan kinerja yang lebih baik. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif serta berkerjasama dalam pencapaian indikator kinerja dan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026. Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan, dan pelaksanaan program kegiatan periode yang akan datang.

Samarinda, 20 Juli 2026
Piri. Kepala Balai Kekarantinaan
Kesehatan Kelas I Samarinda,

Ratna Sari Dewi, S.T., M.Kes.
NIP. 197110122002122001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2023, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara dan pos lintas batas darat negara. Balai Kekarantinaan Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit dan secara administratif dikoordinasikan dan dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan secara teknis fungsional dibina oleh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2026 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda melaksanakan sasaran strategis yaitu:

1. Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Kesehatan
2. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian Kesehatan

Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam delapan indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa lima dari tujuh indikator kinerja telah mencapai target semester I tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi indikator kinerja IKK 24.2.1. Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah sebesar 100% dari target 76% dengan capaian kinerja sebesar 131,58%
2. Realisasi indikator kinerja IKM 33.1.1. Nilai SAKIP Unit Kerja sebesar 84,30 dari target 83 dengan capaian kinerja sebesar 101,57%
3. Realisasi indikator kinerja IKM 33.2.1. Nilai Kinerja Anggaran sebesar 74,36 dari target 46 dengan capaian kinerja sebesar 80,17%
4. Realisasi indikator kinerja IKM 33.4.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti sebesar 100,00% dari target 95% dengan capaian kinerja sebesar 105,26%
5. Realisasi indikator kinerja IKD 33.1.1. Persentase Realisasi Anggaran sebesar 47,20% dari target 50% dengan capaian kinerja sebesar 94,40%
6. Realisasi indikator kinerja IKD 33.1.2. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam sebesar 100,00% dari target 95% dengan capaian kinerja sebesar 105,26%

7. IKD 33.1.3. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* sebesar 0 penyalahgunaan dari target 0 penyalahgunaan dengan capaian kinerja sebesar 100,00%

Capaian sasaran kegiatan pada semester I tahun 2026 sebesar 114,25%. Capaian ini lebih tinggi dari semester I 2025 sebesar 87,18%, lebih tinggi dari capaian tahun 2024 sebesar 104,67%, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 sebesar 105,20%, lebih tinggi dari capaian tahun 2022 sebesar 106,16%, dan lebih tinggi dari capaian tahun 2021 sebesar 108,6%.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp 8.917.249.492 atau 47.20% dari anggaran sebesar Rp 18.891.417.000, atau sebesar 47,20% dari total anggaran.

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran menjadi indikator dengan efisiensi sumber pembiayaan tertinggi. Realisasi indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran sebesar 74,36% dari target sebesar 46 dengan capaian 161,65%. Realisasi anggaran sebesar Rp 0 dari pagu anggaran Rp 96.613.000,-. Berdasarkan perhitungan didapatkan efisiensi sebesar 1,00000 dengan nilai Efisiensi 300,00% karena dapat mencapai kinerja 161,65% dengan menggunakan anggaran 0 sehingga menjadi indikator dengan efisiensi sumber dana tertinggi

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja di tahun 2026, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda akan melakukan:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor/lintas program dan *stakeholder* terkait indeks pengendalian faktor risiko di Pelabuhan/Bandara pada parameter kepadatan lalat, kepadatan kecoa, dan HI buffer.
2. Meningkatkan kompetensi SDM teknis dan administrasi dengan penyusunan kebutuhan pelatihan dan penambahan anggaran kegiatan pelatihan serta usulan penambahan SDM.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	I
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Tugas Dan Fungsi	6
C Struktur Organisasi	7
D Sumber Daya Manusia	8
E Sistematika Penulisan	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	13
A Rencana Kinerja	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
A Capaian Kinerja Organisasi	24
B Realisasi Anggaran	97
C Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	102
BAB IV. PENUTUP	104
A Kesimpulan	104
B Tindak Lanjut	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi ASN BKK Kelas I Samarinda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2026	9
Tabel 1.2	Distribusi ASN BKK Kelas I Samarinda Berdasarkan Jabatan Tahun 2026	10
Tabel 1.3	Distribusi ASN BKK Kelas I Samarinda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2026	11
Tabel 1.4	Distribusi ASN BKK Kelas I Samarinda Berdasarkan Pangkat Golongan/ Ruang Tahun 2026	12
Tabel 2.1	Indikator Kinerja dan BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025-2029	15
Tabel 2.2	Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja dan BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025-2029 ...	16
Tabel 2.3	Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Indikator, dan Alokasi Anggaran BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026	19
Tabel 2.4	Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju) BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026-2028	20
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja (PK) BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026	23
Tabel 2.6	Anggaran pada Perjanjian Kinerja BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026	23
Tabel 3.1	Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026..	24
Tabel 3.2	Realisasi Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Semester I 2026.....	27
Tabel 3.3	Target, Realisasi, dan Capaian Parameter Indikator Kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026.....	30
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Kinerja (Angka Kumulatif) Tahun 2024 s.d 2026 (Semester I).....	30
Tabel 3.5	Perbandingan Persentase Capaian Pemriksaan Lingkungan Tahun 2024 s.d 2026 (SMT I	32
Tabel 3.6	Komponen Nilai SAKIP	38
Tabel 3.7	Hasil Penilaian SAKIP BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025.....	39
Tabel 3.8	Realisasi Nilai SAKIP per Komponen BKK Kelas I Samarinda tahun 2024 dan 2025.....	42
Tabel 3.9		39
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Kegiatan BKK Kelas I Samarinda berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025	91
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan BKK Kelas I Samarinda 2025	97
Tabel 3.12	Realisasi Pagu Anggaran Efektifn Berdasarkan Kegiatan BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025	98
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja BKK Kelas I Samarinda 2025	98
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja BKK Kelas I Samarinda 2025	99
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran berdasarkan Rincian Ouput (RO) BKK Kelas I Samarinda 2025	100
Tabel 3.16	Penerimaan Negara Bukan Pajak BKK Kelas I Samarinda 2025	101
Tabel 3.17	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja BKK Kelas I Samarinda 2025	103

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026.....	29
Grafik 3.2	Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pemeriksaan Alat Angkut Tahun 2024 s.d 2026 (Semester I)	31
Grafik 3.3	Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pemeriksaan Orang Tahun 2024 s.d 2026 (Semester I)	31
Grafik 3.4	Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pemeriksaan Barang Tahun 2024 s.d 2026 (Semester I)	32
Grafik 3.5	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah dibandingkan dengan Target RAK BKK Kelas I Samarinda	33
Grafik 3.6	Target Renstra Kemenkes, Target RAP Ditjen PP, dan Realisasi Kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025 - 2029.....	34
Grafik 3.7	Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah BKK Kelas I Samarinda dibandingkan dengan BKK Kelas I Pembanding Semester I 2026.....	35
Grafik 3.8	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Sakip Unit Kerja BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026.....	41
Grafik 3.9	Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Unit Kerja BKK Kelas I Samarinda Tahun 2021-2025.....	42
Grafik 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Nilai SAKIP Unit Kerja Tahun 2025 dengan Target RAK BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025-2029.....	44
Grafik 3.11	Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Unit Kerja BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding Semester I Tahun 2026	47
Grafik 3.12	Target dan Realisasi Indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN dibandingkan dengan RAK BKK Kelas I Samarinda	47
Grafik 3.13	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN BKK Kelas I Samarinda dan BKK Kelas I Pembanding 2025	48
Grafik 3.14	Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Samarinda 2025	55
Grafik 3.15	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Samarinda Tahun 2021-2025	55
Grafik 3.16	Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran dibandingkan dengan Target RAK BKK Kelas I Samarinda	56
Grafik 3.17	Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Samarinda dibandingkan dengan Draft Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029	57
Grafik 3.18	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding 2025	58
Grafik 3.19	Target, Realisasi, dan Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I Samarinda 2025.....	66
Grafik 3.20	Capaian Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I Samarinda Tahun 2021-2025	68
Grafik 3.21	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibandingkan dengan RAK BKK Kelas I Samarinda 2025-2029	69

Grafik 3.22	Target dan Realisasi, Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dibandingkan dengan Target Renstra Kemenkes 2025-2029.....	70
Grafik 3.23	Realisasi Indikator Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding 2025.....	71
Grafik 3.24	Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker BKK Kelas I Samarinda 2025.....	75
Grafik 3.25	Realisasi Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker BKK Kelas I Samarinda Tahun 2021-2025.....	78
Grafik 3.26	Realisasi Indikator Kinerja Implementasi WBK Satker BKK Kelas I Samarinda dibanding dengan Target RAK 2025-2029	79
Grafik 3.27	Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja implementasi WBK satker BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding 2025	80
Grafik 3.28	Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya BKK Kelas I Samarinda 2025	83
Grafik 3.29	Jenis Peningkatan Kompetensi yang Paling Banyak Dikuti oleh Pegawai BKK Kelas I Samarinda 2025	84
Grafik 3.30	Capaian Indikator Kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya BKK Kelas I Samarinda Tahun 2021-2025	85
Grafik 3.31	Realisasi Indikator Kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya BKK Kelas I Samarinda Tahun 2024 Dibanding Target RAK	86
Grafik 3.32	Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding 2025.....	87
Grafik 3.33	Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025	90
Grafik 3.34	Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025	91
Grafik 3.35	Persentase Realisasi Anggaran (Pagu Efektif) BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025.....	92
Grafik 3.36	Realisasi Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Samarinda Tahun 2021-2025	93
Grafik 3.37	Realisasi Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Samarinda Dibandingkan Target RAK Tahun 2025-2029.....	94
Grafik 3.38	Realisasi Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Lainnya 2025	95
Grafik 3.39	Penerimaan Negara Bukan Pajak BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025	8
Gambar 2.1	Cascading Kinerja BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026	18
Gambar 3.1	Nilai Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Samarinda 2025 ...	53
Gambar 3.2	Nilai Indikator Kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I Samarinda 2025 pada aplikasi Monev PA OMSPAN	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sistem kesehatan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk, urbanisasi, perubahan iklim, serta transisi epidemiologi, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks berupa ancaman penyakit menular, penyakit tidak menular, kejadian kedaruratan kesehatan masyarakat, dan risiko kesehatan lintas wilayah. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan memerlukan pendekatan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada pencegahan serta deteksi dini.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagai tahap pertama pelaksanaan RPJPN 2025–2045 menetapkan pembangunan kesehatan sebagai salah satu prioritas nasional dalam rangka memperkuat kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Kementerian Kesehatan menetapkan visi **"Masyarakat yang Sehat dan Produktif guna Mewujudkan Indonesia Emas 2045"**, yang diwujudkan melalui transformasi sistem kesehatan nasional meliputi transformasi layanan primer, layanan rujukan, sistem ketahanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, teknologi kesehatan, serta transformasi tata kelola yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam mendukung transformasi tersebut, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit melaksanakan Program Sistem Ketahanan Kesehatan yang berfokus pada penguatan deteksi dini, pencegahan, dan pengendalian penyakit berbasis surveilans. Salah satu ujung tombak pelaksanaan program tersebut adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bidang Kekarantinaan Kesehatan yang bertugas melaksanakan upaya cegah tangkal terhadap masuk dan keluarnya penyakit maupun faktor risiko kesehatan melalui pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit. Berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, BKK Kelas I Samarinda mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas negara. Wilayah kerja BKK Kelas I Samarinda memiliki posisi strategis karena berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan wilayah penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga mobilitas orang, barang, dan alat angkut terus mengalami peningkatan dan memerlukan pengawasan kekarantinaan kesehatan yang optimal.

Sebagai instansi pemerintah, BKK Kelas I Samarinda berkewajiban menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan sumber daya negara. SAKIP merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja sehingga setiap pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai tingkat keberhasilannya secara objektif, terukur, efektif, dan efisien.

Laporan Kinerja BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban BKK Kelas I Samarinda atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 selama periode Januari sampai dengan Juni 2026. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta ketentuan pelaporan kinerja yang berlaku di lingkungan Kementerian Kesehatan. Laporan ini menyajikan capaian kinerja terhadap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, realisasi anggaran, serta upaya perbaikan yang akan dilakukan pada Semester II Tahun 2026 sebagai bagian dari peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Secara umum, penyusunan Laporan Kinerja BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026 bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, mendukung pengambilan keputusan berbasis kinerja, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Semester I 2026 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, serta pengelolaan sumber daya yang telah dilaksanakan selama periode Januari sampai dengan Juni 2026. Laporan ini disusun sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara sistematis, transparan, dan akuntabel.

Selain sebagai media pertanggungjawaban kepada Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Kementerian Kesehatan, laporan ini juga menjadi instrumen evaluasi terhadap tingkat pencapaian sasaran, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Semester I 2026 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi mengenai capaian kinerja organisasi selama semester I tahun 2026 berdasarkan indikator dan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 secara objektif, terukur, transparan, dan akuntabel.
2. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan pengelolaan anggaran sebagai dasar penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran kinerja sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada semester II 2026.
4. Menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan, penyempurnaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta penguatan tata kelola organisasi yang berorientasi pada hasil.
5. Mendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penyediaan informasi kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda pada semester I 2026 dipengaruhi oleh berbagai dinamika lingkungan strategis, baik pada tingkat global, nasional, regional, maupun internal organisasi. Dinamika tersebut memberikan tantangan sekaligus peluang dalam

penyelenggaraan pelayanan kekarantina kesehatan di pintu masuk negara. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, BKK Kelas I Samarinda dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan kebijakan, perkembangan situasi kesehatan masyarakat, peningkatan mobilitas lintas wilayah, serta penguatan tata kelola organisasi guna mendukung tercapainya target pembangunan kesehatan nasional. Isu strategis yang memengaruhi pelaksanaan kinerja BKK Kelas I Samarinda pada Semester I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Ketahanan Kesehatan Global dan Implementasi International Health Regulations (IHR 2005)

Meningkatnya mobilitas internasional pascapandemi serta perkembangan penyakit infeksi baru dan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD/PHEIC) menuntut setiap negara untuk memperkuat kapasitas deteksi dini, respons cepat, dan pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara. Implementasi International Health Regulations (IHR 2005) menjadi landasan penting dalam memastikan kesiapsiagaan nasional terhadap ancaman kesehatan lintas negara. Dalam konteks tersebut, BKK Kelas I Samarinda memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang, alat angkut, barang, dan lingkungan guna mencegah masuk maupun keluarnya penyakit dan faktor risiko kesehatan.

2. Transformasi Sistem Kesehatan Nasional dan Penguatan Program Penanggulangan Penyakit

Pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 menempatkan penguatan sistem ketahanan kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit melaksanakan Program Sistem Ketahanan Kesehatan melalui penguatan surveilans, deteksi dini, pencegahan, serta pengendalian penyakit berbasis risiko. Kondisi tersebut menuntut BKK Kelas I Samarinda untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kekarantina kesehatan, pengawasan faktor risiko, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi kejadian luar biasa maupun kedaruratan kesehatan Masyarakat.

3. Peningkatan Mobilitas di Kalimantan Timur sebagai Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur mendorong peningkatan arus orang, barang, dan alat angkut melalui pelabuhan

dan bandar udara yang menjadi wilayah kerja BKK Kelas I Samarinda. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko masuk dan keluarnya penyakit menular maupun faktor risiko kesehatan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan kekarantinaan kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas surveilans, serta optimalisasi pelayanan kekarantinaan kesehatan pada seluruh wilayah kerja BKK Kelas I Samarinda.

4. Transformasi Digital dan Penguatan Tata Kelola Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan kekarantinaan kesehatan. Pemanfaatan sistem informasi yang terintegrasi, digitalisasi proses pelayanan, serta penguatan kualitas data menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan berbasis bukti. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), reformasi birokrasi, manajemen risiko, serta pengendalian intern menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kinerja organisasi.

5. Penguatan Kapasitas Organisasi dalam Mendukung Pencapaian Kinerja

Pelaksanaan tugas BKK Kelas I Samarinda masih dihadapkan pada berbagai tantangan internal, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa jabatan fungsional, kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan kekarantinaan kesehatan. Di sisi lain, pada semester I 2026 terjadi perubahan dalam pelaksanaan kepemimpinan organisasi, di mana sejak Februari 2026 Kepala Balai berstatus diberhentikan sementara sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Balai dijalankan oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Balai. Kondisi tersebut memerlukan penguatan koordinasi internal, komitmen seluruh pegawai, serta pengelolaan organisasi yang adaptif agar pelaksanaan program, kegiatan, dan pencapaian target Perjanjian Kinerja Tahun 2026 tetap berjalan secara efektif.

6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan kebijakan pemerintah mengenai peningkatan kualitas belanja negara menuntut setiap satuan kerja untuk tidak hanya mengoptimalkan tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa penggunaan anggaran mampu menghasilkan keluaran (output) dan hasil

(outcome) yang mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Oleh karena itu, BKK Kelas I Samarinda terus memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program serta pengelolaan anggaran agar selaras dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2026, prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan orientasi pada hasil.

B. Tugas dan Fungsi

Penyelenggaraan tugas dan fungsi BKK Kelas I Samarinda Tahun Anggaran 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023, BKK mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023, dalam melaksanakan tugasnya, BKK menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran.
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan.
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus.
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan.
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan Kesehatan.
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan.
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan.
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan, dan.
11. Pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi di atas maka BKK Kelas I Samarinda melaksanakan serangkaian kegiatan dengan sasaran kegiatan meliputi:

1. Pelaku perjalanan domestik maupun internasional.
2. Awak alat angkut laut dan udara.

3. Alat angkut laut dan udara.
4. Barang, kargo, dan media pembawa lainnya.
5. Lingkungan pelabuhan dan bandar udara.
6. Masyarakat di wilayah perimeter dan buffer area pelabuhan serta bandar udara.
7. Pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan sasaran, indikator kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan BKK Kelas I Samarinda sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada Semester I Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung tercapainya target kinerja organisasi sekaligus memperkuat sistem ketahanan kesehatan nasional melalui optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara.

C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang dimaksud sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan, maka BKK Kelas I Samarinda termasuk BKK dengan klasifikasi Kelas I yang memiliki susunan organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan dibantu oleh Sub Bagian Administrasi Umum, Kelompok Jabatan Fungsional, Wilayah Kerja, dan Instalasi yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya saling berkolaborasi untuk menjaga kesehatan di pintu masuk negara, dalam rangka cegah tangkal penyakit, pengawasan lalu lintas orang, barang dan alat angkut serta pengendalian risiko lingkungan dan upaya kesehatan di pelabuhan/bandara. Wilayah kerja yang selanjutnya disebut wilker BKK adalah unit kerja fungsional BKK di lingkungan pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. BKK Kelas I Samarinda memiliki enam wilayah kerja yaitu:

1. Wilayah Kerja Bandara APT Pranoto di Kota Samarinda;
2. Wilayah Kerja Tanjung Santan di Kabupaten Kutai Kertanegara;
3. Wilayah Kerja Tanjung Laut di Kota Bontang;
4. Wilayah Kerja Lhoktuan di Kota Bontang;
5. Wilayah Kerja Sangatta di Kabupaten Kutai Timur;
6. Wilayah Kerja Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur.

Struktur organisasi BKK Kelas I Samarinda Tahun dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026

Sejak Februari 2026 kepala kantor berstatus diberhentikan sementara. Posisi kepala kantor dijabat pelaksana harian oleh kepala sub bagian administrasi umum.

D. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKK Kelas I Samarinda, terdapat kendala terutama dari segi sumber daya manusia yang masih terbatas. Hal ini mengakibatkan petugas harus mengerjakan rangkap tugas, misalnya petugas teknis yang merangkap kegiatan administratif, petugas medis melakukan kegiatan teknis kesehatan lingkungan, atau petugas administratif yang mengerjakan beberapa tugas administratif sekaligus. Keterbatasan tenaga juga ada di wilayah kerja dimana petugas harus mengerjakan beberapa tugas teknis sekaligus ditambah dengan tugas

administratif. Keterbatasan tidak hanya dari segi jumlah saja, tetapi juga dari segi kompetensi sumber daya manusianya seperti dalam mengoperasikan peralatan kesehatan/ kedokteran, pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian, dan keuangan, kearsipan, pengadaan barang jasa, dan penyusunan program serta laporan.

Sumber daya manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan SDM merupakan faktor kekuatan bagi BKK. SDM yang diperlukan tidak hanya yang memiliki kemampuan manajerial yang baik, namun penting juga didukung oleh sumber daya teknis yang handal di dalam penyusunan program maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Posisi Pegawai di BKK Kelas I Samarinda per 30 Juni 2026 adalah 79 orang, yang terdiri dari 64 orang PNS dan 15 orang PPPK. SDM yang ada merupakan modal untuk melaksanakan tugas fungsi BKK Kelas I Samarinda.

1. SDM BKK Kelas I Samarinda Berdasarkan Tingkat Pendidikan

SDM BKK Kelas I Samarinda terdiri dari pegawai fungsional kesehatan dan pegawai fungsional non Kesehatan. Pegawai fungsional kesehatan yaitu dokter, perawat, epidemiolog, entomolog, sanitarian, pranata labkes, dan asisten apoteker. Pegawai fungsional non kesehatan yaitu perencana, kepegawaian, arsiparis, pranata komputer, dan pranata keuangan APBN. Penempatan ASN di kantor induk 56 orang dan di kantor wilker 23 orang. Distribusi ASN BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026 berdasarkan tingkat pendidikan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Distribusi ASN BKK Kelas I Samarinda Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2026

No	Jenis Pendidikan	Unit Kerja							Jumlah
		IDK	APT	TJS	TJL	LHO	SGT	SGL	
1	S2 Kesehatan	9	-	-	-	-	-	-	9
2	S2 Umum	2	-	-	-	-	-	-	2
3	S1 Dokter Umum	4	1	-	-	1	1	-	7
4	S1 Ekonomi	2	-	-	-	-	-	-	2
5	S1 Ekonomi	3	-	-	-	-	-	-	3
6	S1 Komputer	1	-	-	-	-	-	-	1
7	S1 Keperawatan	3	-	-	-	-	-	-	3
8	S1 Kesmas	14	-	1	2	-	2	2	21
9	S1 Administrasi Negara	1	-	-	-	-	-	-	1
10	S1 Pendidikan	1	-	-	-	-	-	-	1
11	S1 Pertanian	1	-	-	-	-	-	-	1
12	DIV Keperawatan	1	-	-	-	-	-	-	1
13	DIII Komputer	2	-	-	-	-	-	-	2
14	DIII Keperawatan	2	3	-	2	1	1	1	10
15	DIII Kesling	1	1	1	-	2	-	-	5
16	DIII Analis Lab	3	-	-	-	-	-	-	3

No	Jenis Pendidikan	Unit Kerja							Jumlah
		IDK	APT	TJS	TJL	LHO	SGT	SGL	
17	DIII Farmasi	1	-	-	-	-	-	-	1
18	DIII Bank Darah	1	-	-	-	-	-	-	1
19	DIII Akuntansi	1	-	-	-	-	-	-	1
20	SMA	3	-	-	-	-	-	-	3
Jumlah		56	5	2	5	4	4	3	79

Sumber: Data Primer BKK Kelas I Samarinda
Keterangan: IDK = Induk, APT = Bandara APT Pranoto, TJS = Tanjung Santan, TJL = Tanjung Laut, LHO = Lhoktuan, SGT = Sangatta, SGL = Sangkulirang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pendidikan ASN di lingkungan BKK Kelas I Samarinda paling banyak adalah S-1 dengan jumlah 35 pegawai, kemudian disusul dengan D-III dengan jumlah 23 pegawai, S-2 dengan jumlah 10 pegawai, SMA dengan jumlah 3 pegawai, dan D-IV dengan jumlah 1 pegawai.

2. SDM BKK Kelas I Samarinda Berdasarkan Jabatan

SDM BKK Kelas I Samarinda Berdasarkan Jabatan Distribusi ASN BKK Kelas I Samarinda berdasarkan jabatan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Distribusi ASN BKK Kelas I Samarinda Berdasarkan Jabatan Tahun 2026

Jabatan		Jumlah
Jabatan Struktural	Kepala Kantor	1
	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum	1
Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum	Entomolog Kesehatan Ahli Madya	2
	Entomolog Kesehatan Ahli Muda	4
	Entomolog Kesehatan Ahli Pertama	2
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Madya	5
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda	8
	Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama	1
	Epidemiolog Kesehatan Terampil	3
	Sanitarian Ahli Madya	2
	Sanitarian Ahli Muda	3
	Sanitarian Ahli Pertama	1
	Sanitarian Mahir	2
	Sanitarian Terampil	2
	Dokter Ahli Madya	2
	Dokter Ahli Muda	5
	Perawat Ahli Muda	1
	Perawat Ahli Pertama	1
	Perawat Penyelia	2
	Perawat Mahir	2
	Perawat Terampil	6
	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	1
	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	2
	Perencana Ahli Muda	1

Jabatan		Jumlah
	Perencana Ahli Pertama	1
	Arsiparis Ahli Pertama	1
	Pranata Keuangan APBN Penyelia	2
	Pranata Komputer Ahli Pertama	1
	Pranata Komputer Terampil	1
	Pranata SDMA Terampil	1
	Sanitarian (JFU)	1
	Dokter (JFU)	1
	Asisten Apoteker (JFU)	1
	Penata Layanan Operasional (JFU)	5
	Pengelola Layanan Operasional (JFU)	1
	Operator Layanan Operasional (JFU)	3
Jumlah		79

Sumber: Data Primer BKK Kelas I Samarinda, 2026

Berdasarkan tabel diatas, kelompok jabatan, pegawai BKK Kelas I Samarinda dibagi menjadi Jabatan Struktural dengan jumlah 2 pegawai, Jabatan Fungsional Tertentu dengan jumlah 65 pegawai, dan Jabatan Fungsional Umum dengan jumlah 12 pegawai.

3. SDM BKK Kelas I Samarinda berdasarkan jenis kelamin

Distribusi ASN BKK Kelas I Samarinda berdasarkan jenis kelamin tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.3 Distribusi ASN BKK Kelas I Samarinda Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2026

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki Laki	39
Perempuan	40
Jumlah	79

Sumber: Data Primer BKK Kelas I Samarinda, 2026

Berdasarkan tabel di atas, jumlah ASN berjenis kelamin laki-laki sebanyak 39 pegawai sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 40 pegawai.

4. SDM BKK Kelas I Samarinda berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Distribusi ASN BKK Kelas I Samarinda berdasarkan pangkat dan golongan / ruang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 1.4 Distribusi ASN BKK Kelas I Samarinda Berdasarkan Pangkat dan Golongan / Ruang Tahun 2026

Pangkat Golongan / Ruang PNS	Jumlah
Pembina Tk. 1 / IV.b	1
Pembina / IV.a	9
Penata Tk.1 / III.d	13
Penata / III.c	16

Penata Muda Tk.1 / III.b	8
Penata Muda / III.a	10
Pengatur Tk.1 / II.d	3
Pengatur / II.c	4
Golongan / Ruang PPPK	Jumlah
IX	4
VII	9
V	2
Jumlah	79

Sumber: Data Primer BKK Kelas I Samarinda, 2026

Berdasarkan tabel diatas, PNS pangkat golongan / ruang Pembina Tk. 1 / IV.b sejumlah 1 pegawai, Pembina / IV.a 9 pegawai, Penata Tk.1 / III.d jumlah 13 pegawai, Penata / III.c jumlah 16 pegawai, Penata Muda Tk.1 / III.b jumlah 8 pegawai, Penata Muda /III.a jumlah 10 pegawai, Pengatur Tk.1 / II.d dengan 3 pegawai, Pengatur / II.c jumlah 4 pegawai. PPPK golongan IX ada 4 pegawai, golongan VII 9, dan PPPK golongan V ada 2 pegawai pegawai.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan kinerja BKK Kelas I Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Ringkasan Eksekutif
3. Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Grafik, dan Daftar Gambar
4. BAB I Pendahuluan

Bab I menyajikan Latar Belakang, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Sistematika Penulisan.

5. BAB II Perencanaan Kinerja

Bab II menyajikan Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja

6. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab III menyajikan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.

7. BAB IV Penutup

Bab IV menyajikan Kesimpulan dan Tindak Lanjut.

8. Lampirin

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Perencanaan kinerja disusun secara sistematis dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan sektor kesehatan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda menyusun perencanaan kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tahun 2025–2029. Perencanaan tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kekarantinaan kesehatan serta pelaksanaan dukungan manajemen guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan kesehatan nasional.

Perencanaan kinerja BKK Kelas I Samarinda dilaksanakan secara berjenjang melalui penyusunan dokumen Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Tahun 2025–2029, Cascading Kinerja, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Ketiga dokumen tersebut saling berkaitan dalam menerjemahkan sasaran strategis organisasi ke dalam indikator kinerja, target, program, kegiatan, serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2026, pelaksanaan kinerja BKK Kelas I Samarinda mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang memuat tujuh indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kekarantinaan kesehatan dan dukungan manajemen. Seluruh indikator tersebut menjadi dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja selama semester I Tahun 2026 serta digunakan sebagai acuan dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan pemanfaatan anggaran. Dengan adanya perencanaan kinerja yang terstruktur, diharapkan seluruh sumber daya organisasi dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran strategis BKK Kelas I Samarinda sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Kementerian Kesehatan.

1. Rencana Aksi Kegiatan BKK Samarinda Tahun 2025 – 2029

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan kinerja jangka menengah yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 serta Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman bagi BKK Kelas I Samarinda dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama periode lima tahun melalui penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, target, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan kesehatan nasional.

RAK berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, perjanjian kinerja, serta pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan adanya RAK, pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Kementerian Kesehatan.

Penyusunan RAK BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2025–2029 mengacu pada prinsip perencanaan berbasis kinerja (performance based planning), yaitu menghubungkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja, target, program, kegiatan, dan kebutuhan anggaran dalam satu kerangka yang terintegrasi. Melalui pendekatan tersebut, setiap program dan kegiatan diharapkan memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Pada saat penyusunan Laporan Kinerja Semester I 2026, dokumen RAK BKK Kelas I Samarinda 2025–2029 masih dalam proses penyempurnaan. Namun demikian, target indikator kinerja lima tahunan telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja organisasi. Target tersebut menjadi acuan dalam mengukur perkembangan pencapaian sasaran strategis dari tahun ke tahun serta memastikan konsistensi antara perencanaan jangka menengah dan pelaksanaan kinerja tahunan. Dalam rangka mencapai sasaran strategis, maka ditetapkan sasaran kegiatan dan indikator kinerja BKK Kelas I Samarinda:

- a. Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Indikator kinerja yang harus dicapai oleh BKK Kelas I Samarinda pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Kinerja BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	0,95				
Persentase Faktor Risiko Penyakit Di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan	100%				
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	0,91				
Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah		76%	77%	78%	79%
Nilai SAKIP		83	83,5	84	84,5
Nilai Kinerja Anggaran	89	92,75	93	93,25	93,5
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	96				
Kinerja implementasi WBK satker	84				
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	97%				
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti		95%	95%	95%	95%
Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%	96%
Penerbitan dokumen layanan kekarantina kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam		95%	96%	97%	98%
Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance		0	0	0	0

Guna memenuhi kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Kegiatan sebagaimana tersebut diatas dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun yang bersumber dari Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP). Kerangka pendanaan per indikator kegiatan BKK Kelas I Samarinda sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Anggaran (ribuan rupiah)				
Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	1.630.033				
Persentase Faktor Risiko Penyakit Di Pintu Masuk yang Dikendalikan pada Orang, Alat Angkut, Barang, dan Lingkungan	664.646				
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di Pelabuhan/ Bandara/PLBDN	582.747				
Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah		3.220.442	3.456.789	3.579,753	3.711.151
Nilai SAKIP		250.021	262.001	274.472	286.428
Nilai Kinerja Anggaran	165.411	96.613	104.345	122.567	130.444
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	83.551				
Kinerja implementasi WBK satker	129.068				
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	561.873				
Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti		95%	95%	95%	95%
Persentase Realisasi Anggaran	15.059.782	14.841.968	4.584.887	4.654.777	4.765.888
Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut dalam kategori merah kurang dari 2x24 jam		415.634	444.555	471.174	499.990
Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance		34.123	35.111	36.234	373

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran sasaran kinerja secara berjenjang dari tingkat strategis hingga tingkat operasional untuk memastikan keterkaitan antara tujuan pembangunan nasional, sasaran strategis kementerian, sasaran program, sasaran kegiatan, serta sasaran kinerja unit kerja dan individu. Melalui mekanisme ini, setiap target kinerja yang ditetapkan pada tingkat organisasi yang lebih tinggi diterjemahkan menjadi target yang lebih operasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi.

Penerapan cascading kinerja di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026 yang disusun secara berjenjang mulai dari Tujuan Kementerian Kesehatan, Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan beserta Indikator Sasaran Strategis (ISS), Program dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit beserta Indikator Kinerja Program (IKP/IKM), hingga Kegiatan, Sasaran Kegiatan,

dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK/IKM/IKD) yang menjadi tanggung jawab BKK Kelas I Samarinda.

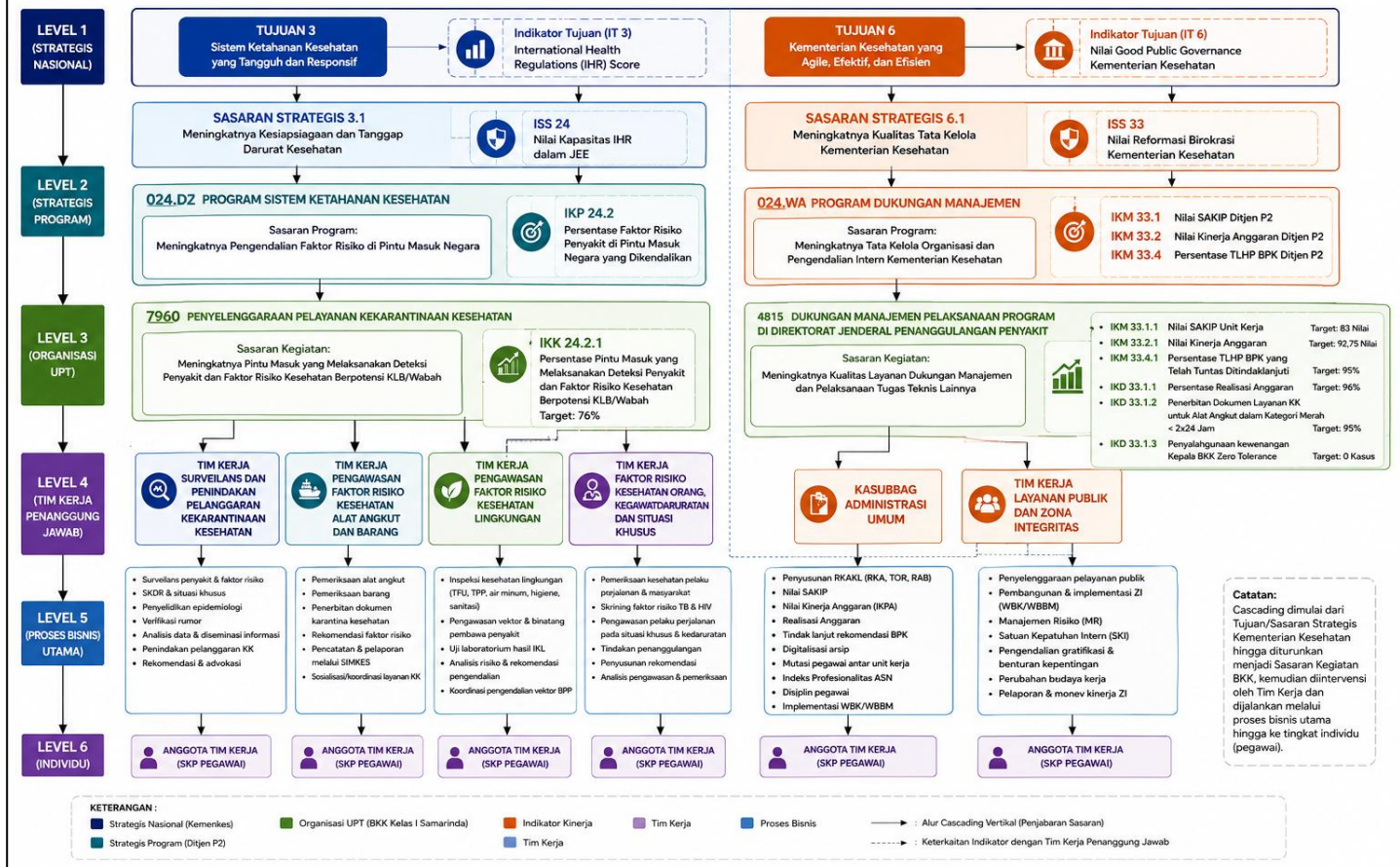
Pada Tahun 2026, terdapat dua jalur utama cascading kinerja yang menjadi dasar penyelenggaraan tugas dan fungsi BKK Kelas I Samarinda. Jalur pertama merupakan penyelenggaraan pelayanan kekarantina kesehatan melalui Program Sistem Ketahanan Kesehatan (024.DZ) yang berorientasi pada peningkatan pengendalian faktor risiko di pintu masuk negara. Jalur kedua merupakan Program Dukungan Manajemen (024.WA) yang berorientasi pada peningkatan kualitas tata kelola organisasi dan pengendalian intern dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas teknis. Kedua jalur tersebut kemudian diturunkan menjadi sasaran kegiatan BKK Kelas I Samarinda yang diukur melalui tujuh indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

Selanjutnya, sasaran kegiatan tersebut diterjemahkan ke dalam pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing Tim Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai tentang Tim Kerja. Setiap Tim Kerja bertanggung jawab melaksanakan proses bisnis utama sesuai substansinya, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) masing-masing pegawai. Dengan demikian, setiap individu memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian indikator kinerja organisasi sehingga terwujud keterpaduan antara kinerja individu, kinerja unit kerja, dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penerapan cascading kinerja tersebut mendukung implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui penyelarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Selain itu, cascading kinerja menjadi instrumen penting dalam memperjelas hubungan antara sasaran strategis Kementerian Kesehatan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BKK Kelas I Samarinda, sehingga setiap program, kegiatan, dan penggunaan sumber daya diarahkan untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan kesehatan nasional. Hubungan keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis, program, sasaran program, kegiatan, sasaran kegiatan, indikator kinerja, tim kerja, proses bisnis, dan sasaran kinerja individu di lingkungan BKK Kelas I Samarinda disajikan pada Gambar 2.2 Cascading Kinerja BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026.

GAMBAR 2.2 CASCADING KINERJA BKK KELAS I SAMARINDA TAHUN 2026

(Mengintegrasikan Cascading Organisasi, Tim Kerja, dan Proses Bisnis)



Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa seluruh indikator kinerja BKK Kelas I Samarinda merupakan penjabaran langsung dari sasaran strategis Kementerian Kesehatan dan sasaran program Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian kinerja pada tingkat unit kerja dan individu berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan kesehatan nasional melalui mekanisme cascading yang terintegrasi.

2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 BKK Kelas I Samarinda merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kinerja Tahunan BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026 disusun berdasarkan kegiatan dan sasaran beserta target indikator sasaran Tahun 2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025-2029. Penyusunan RKT ini sebagai acuan yang terdiri atas sasaran kegiatan/output, indikator kinerja kegiatan, target

pencapaian serta alokasi anggaran dalam 1 (satu) tahun. Adapun RKT BKK Kelas I Samarinda tersaji dalam tabel berikut:

Rencana Kinerja Tahunan

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan
Unit Organisasi	:	a. Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit b. Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda
Program	:	1. Program Sistem Ketahanan Kesehatan 2. Dukungan Manajemen
Sasaran Program yang didukung	:	1. Meningkatnya Pengendalian Faktor Risiko di Pintu Masuk Negara 2. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dan Pengendalian Intern Kementerian Kesehatan
Kegiatan	:	1. Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah 2. Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Sasaran Kegiatan (output) dan pendanaan

Tabel 2.3 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja, Target Indikator, dan Alokasi Anggaran BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026

No	Sasaran	No	Indikator	Target 2026	Alokasi Tahun 2026 (ribuan)
1	Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	1	IKK 24.2.1. Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	76%	Rp 3.220.442
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2	IKM 33.1.1. Nilai SAKIP Unit Kerja	83 nilai	Rp 250.021
		3	IKM 33.2.1. Nilai Kinerja Anggaran	92,75 nilai	Rp 96.613
		4	IKM 33.4.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	95%	Rp 32.616
		5	IKD 33.1.1. Persentase Realisasi Anggaran	96%	Rp 14.841.968
		6	IKD 33.1.2. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam	95%	Rp 415.634

No	Sasaran	No	Indikator	Target 2026	Alokasi Tahun 2026 (ribuan)
		7	IKD 33.1.3. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0 penyalahgunaan	Rp 34.123

b. Rincian Kegiatan

2) Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)

Tabel 2.4 Perhitungan Pendanaan (Tahun berjalan dan Prakiraan Maju)
BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026-2028

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)	Tahun 2026			Prakiraan 2027		Prakiraan 2028	
	Vol	Satuan	Alokasi (000)	Vol	Alokasi (000)	Vol	Alokasi (000)
KRO:	32	Kegiatan	146.752	26	262.908	26	28.282
PEA Koordinasi							
001 Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	32	Kegiatan	146.752	26	262.908	26	28.282
KRO:	90	Orang	25.844	90	32.432	90	38.888
PEF Sosialisasi dan Diseminasi							
001 Sosialisasi dan Diseminasi	90	Orang	25.844	90	32.432	90	38.888
KRO:	122	Orang	71.822	96	97.628	96	123.456
QAA Pelayanan Publik kepada Masyarakat							
012 Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan / Bandara / Lintas Batas	122	Orang	71.822	96	97.628	96	123.456
KRO:	1.157	Layanan	1.730.480	1.145	1.975.712	1.145	1.975.712
QAH Pelayanan Publik Lainnya							
016 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	7	Layanan	249.463	7	348.563	7	348.563
017 Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	56	Layanan	413.770	44	559.902	44	559.902
U01 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	220	Layanan	145.200	220	145.200	220	145.200
U02 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	100	Layanan	88.000	100	88.000	100	88.000
U04 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit pada Situasi Khusus	-	-	-	-	-	-	-

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)	Tahun 2026			Prakiraan 2027		Prakiraan 2028	
	Vol	Satuan	Alokasi (000)	Vol	Alokasi (000)	Vol	Alokasi (000)
U07 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	25	Layanan	30.650	25	30.650	25	30.650
U08 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit PES	63	Layanan	184.653	63	184.653	63	184.653
U09 Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Diare	42	Layanan	20.244	42	20.244	42	20.244
U11 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit DBD	216	Layanan	77.760	216	77.760	216	77.760
U12 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Malaria	44	Layanan	75.680	44	75.680	44	75.680
U13 Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Diare	84	Layanan	44.520	84	44.520	84	44.520
U14 Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit HIV/AIDS	10	Layanan	13.140	10	13.140	10	13.140
U15 Layanan Survey Faktor Risiko Penyakit TB	12	Layanan	65.460	12	65.460	12	65.460
U20 Layanan Penemuan Aktif Surveilans Migrasi Malaria	60	Layanan	58.200	60	58.200	60	58.200
U32 Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	150	Layanan	217.500	150	217.500	150	217.500
U38 Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	68	Layanan	46.240	68	46.240	68	46.240
KRO:	11	Paket	1.245.544	10	1.173.751	10	1.234.321
RAB Sarana Bidang Kesehatan							
001 Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk	11	Paket	1.245.544	10	1.173.751	10	1.234.321
KRO:	-	-	-	-	-	-	-
TBC Layanan Manajemen SDM Internal							
001 Pelatihan Kesehatan							
KRO:	17	Unit	404.400	13	363.678	12	357.531
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi							
001 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	17	Unit	404.400	13	363.678	12	357.531

Klasifikasi Rincian Output (KRO) / Rincian Output (RO)	Tahun 2026			Prakiraan 2027		Prakiraan 2028	
	Vol	Satuan	Alokasi (000)	Vol	Alokasi (000)	Vol	Alokasi (000)
KRO:	17	Layanan	14.733.480	7	3.615.409	7	3.947.800
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal							
956 Layanan BMN	-	-	-	-	-	-	-
958 Layanan Hubungan Masyarakat	3	Layanan	34.123	4	130.146	4	140.146
960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	-	-	-	-	-	-
962 Layanan Umum	-	-	-	-	-	-	-
969 Layanan Bantuan Hukum	2	Layanan	11.234	2	6.250	2	7.654
994 Layanan Perkantoran	12	Layanan	14.688.123	1	3.479.013	1	3.800.000
Operasional dan pemeliharaan kantor							
KRO:	38	Unit	153.845	25	137.800	20	123.456
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
951 Layanan Fasilitas Internal	38	Unit	153.845	25	137.800	20	123.456
KRO:	39	Orang	250.021	55	439.464	79	567.890
EBC Layanan Manajemen SDM Internal							
954 Layanan Administrasi Kepegawaian Ditjen P2P	-	-	-	-	-	-	-
996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan	39	Orang	250.021	55	439.464	79	567.890
KRO:	8	Dokumen	127.929	14	327.472	31	566.277
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal							
952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3	Dokumen	96.313	4	162.432	4	191.111
953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-	Dokumen	-	-	-	17	199.991
955 Layanan Manajemen Keuangan	5	Dokumen	31.616	10	165.040	10	175.175
961 Layanan Reformasi	-	-	-	-	-	-	-
974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja pada tahun 2026 terdiri dari beberapa sasaran dan indikator. Indikator kinerja mencakup beberapa kegiatan pendukung. Indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja (PK) BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026

No	Sasaran	No	Indikator	Target 2026
1	Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	1	IKK 24.2.1. Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	76%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2	IKM 33.1.1. Nilai SAKIP Unit Kerja	83 nilai
		3	IKM 33.2.1. Nilai Kinerja Anggaran	92,75 nilai
		4	IKM 33.4.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	95%
		5	IKD 33.1.1. Persentase Realisasi Anggaran	96%
		6	IKD 33.1.2. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam	95%
		7	IKD 33.1.3. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0 penyalahgunaan

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada Perjanjian Kinerja terdapat delapan indikator kinerja yang akan dicapai pada tahun 2026. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator kegiatan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.6. Anggaran pada Perjanjian Kinerja BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026

No	Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)
1	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	3,220,442,000
2	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	15,670,975,000
Total Anggaran		18,891,417,000

Berdasarkan tabel diatas, anggaran untuk kegiatan Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah sebesar Rp 3,220,442,000 dan kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit sebesar Rp 15,670,975,000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Untuk menilai tingkat keberhasilan capaian kinerja organisasi adalah melalui mekanisme Pengukuran Kinerja. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan masing-masing indikator. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program / kegiatan yang direncanakan dapat lebih berhasil. Target, realisasi, dan capaian PK tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026

No	Sasaran	Indikator	Target 2026	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	IKK 24.2.1. Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	76%	100%	131,58%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	IKM 33.1.1. Nilai SAKIP Unit Kerja	83 nilai	84,30 nilai	101,57%
		IKM 33.2.1. Nilai Kinerja Anggaran	46 nilai	74,36 nilai	161,65%
		IKM 33.4.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	95%	100%	105,26%
		IKD 33.1.1. Persentase Realisasi Anggaran	50%	47,20%	94,40%

No	Sasaran	Indikator	Target 2026	Realisasi	Capaian
		IKD 33.1.2. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam	95%	100%	105,26%
		IKD 33.1.3. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0 penyalah- gunaan	0 penyalah- gunaan	100%
Rata-rata Capaian					114,25%

Capaian indikator kinerja pada semester I 2026 berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa enam dari delapan indikator kinerja telah mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 114,25%. Adapun analisis capaian kinerja masing-masing Indikator adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pintu Masuk Yang Melaksanakan Deteksi Penyakit Dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah

a. Dasar Hukum

- 1) *International Health Regulation (IHR) 2005*
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB), Wabah, dan Krisis Kesehatan
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

b. Definisi Operasional

Jumlah pintu masuk negara (pelabuhan/bandar udara/PLBN) maupun pelabuhan/bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang dan lingkungan dalam rangka deteksi dan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan berpotensi KLB/Wabah.

c. Cara Perhitungan

Capaian indikator diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

Jumlah pintu masuk negara maupun pelabuhan/bandara domestik yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang dan lingkungan
Seluruh pintu masuk negara maupun pelabuhan/bandara domestik

d. Capaian Indikator

BKK Kelas I Samarinda memiliki 1 kantor induk dan 6 wilayah kerja yaitu:

- 1) Induk Samarinda
- 2) Wilayah Kerja Tanjung Santan
- 3) Wilayah Kerja Tanjung Laut
- 4) Wilayah Kerja Lhoktuan
- 5) Wilayah Kerja Pelabuhan Sangatta
- 6) Wilayah Kerja Pelabuhan Sangkulirang
- 7) Wilayah Kerja Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto

Jumlah pelabuhan/bandara domestik di wilayah kerja BKK Kelas I Samarinda sebanyak 7 pelabuhan dan 1 bandara bandara domestik. Berdasarkan definisi operasional dari indikator, jumlah bandara dan atau pelabuhan yang melakukan pemeriksaan atau pengawasan pada alat angkut, orang, barang dan lingkungan dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.2. Realisasi Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Semester I 2026

Pelabuhan/Bandara Domestik	Jumlah Pengawasan			
	Alat angkut	Orang	Barang	Lingkungan
Pelabuhan Samarinda	23,017	9,155	143.609	2.167
Pelabuhan Tanjung Santan	595	3,007	29	40
Pelabuhan Tanjung Laut	1,701	163	84	211
Pelabuhan Lhok Tuan	1,327	435	65.116	262
Pelabuhan Sangkulirang	3,211	311	224	571
Pelabuhan Sangatta	2,459	383	268	413
Bandara APT Pranoto	1	985	10	229
Total	32,311	14,439	209,340	3.893

Pada semester I tahun 2026, semua pelabuhan/bandara telah melaksanakan pengawasan alat angkut, orang, barang dan lingkungan. Rincian kegiatan dalam mendukung capaian kinerja adalah:

- 1) Pemeriksaan Alat angkut
 - a) Pemeriksaan alat angkut dengan hasil *Risk Based Assesment* (RBA) dengan kategori merah
 - b) Pemeriksaan alat angkut dengan hasil *Risk Based Assesment* (RBA) dengan kategori kuning
 - c) Pemeriksaan alat angkut dengan hasil *Risk Based Assesment* (RBA) dengan kategori hijau
 - d) Pemeriksaan alat angkut untuk penerbitan dokumen *Port Health Quarantine Certificate* (PHQC)
 - e) Pemeriksaan alat angkut untuk penerbitan dokumen *Certificate of Pratique* (COP)
 - f) Pemeriksaan alat angkut untuk penerbitan dokumen *Ship Sanitation Control Certificate* (SSCC)
 - g) Pemeriksaan alat angkut untuk penerbitan dokumen *Ship Sanitation Control Exemption Certificate* (SSCEC)
 - h) Pemeriksaan alat angkut untuk penerbitan dokumen *Medical Chest* (Sertifikat P3K)
 - i) Pemeriksaan alat angkut untuk penerbitan dokumen *Ground Crossing Declaration of Health* (GCDH)
 - j) Pemeriksaan lainnya pada alat angkut di pintu masuk pelabuhan dan atau bandara

2) Pemeriksaan Orang

- a) Pengawasan pengisian pada SSHP-All Indonesia dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dengan kategori merah
- b) Pengawasan pengisian pada SSHP-All Indonesia dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dengan kategori kuning
- c) Pengawasan pengisian pada SSHP-All Indonesia dari pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dengan kategori hijau
- d) Jumlah pelaku perjalanan yang dilakukan pemeriksaan ILI di pintu masuk (sentinel ILI)
- e) Pemeriksaan tes RDT pada kegiatan surveilans migrasi malaria
- f) Pemeriksaan faktor risiko TB di pelabuhan dan bandara
- g) Pemeriksaan atau skrining HIV di pelabuhan dan bandara
- h) Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Laik Terbang (SKLT)
- i) Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Tidak Laik Terbang
- j) Pemeriksaan pada orang di klinik pelabuhan dan bandara untuk melakukan pengujian kesehatan
- k) Kegiatan pemeriksaan lainnya yang dilakukan di wilayah pelabuhan dan bandara

3) Pemeriksaan Barang

- a) Pemeriksaan jenazah/abu jenazah/kerangka untuk penerbitan surat ijin angkut
- b) Pemeriksaan pada pengepakan sampel biologi maupun bahan kimia untuk penerbitan dokumen *Material Transfer Agreement* (MTA)
- c) Pemeriksaan bahan berbahaya untuk penerbitan dokumen atau sertifikat kesehatan
- d) Pemeriksaan pada obat, makanan, kosmetik, alat kesehatan dan bahan adiktif (OMKABA) untuk penerbitan dokumen atau sertifikat kesehatan
- e) Pemeriksaan pengawasan atau pemeriksaan pada barang lainnya

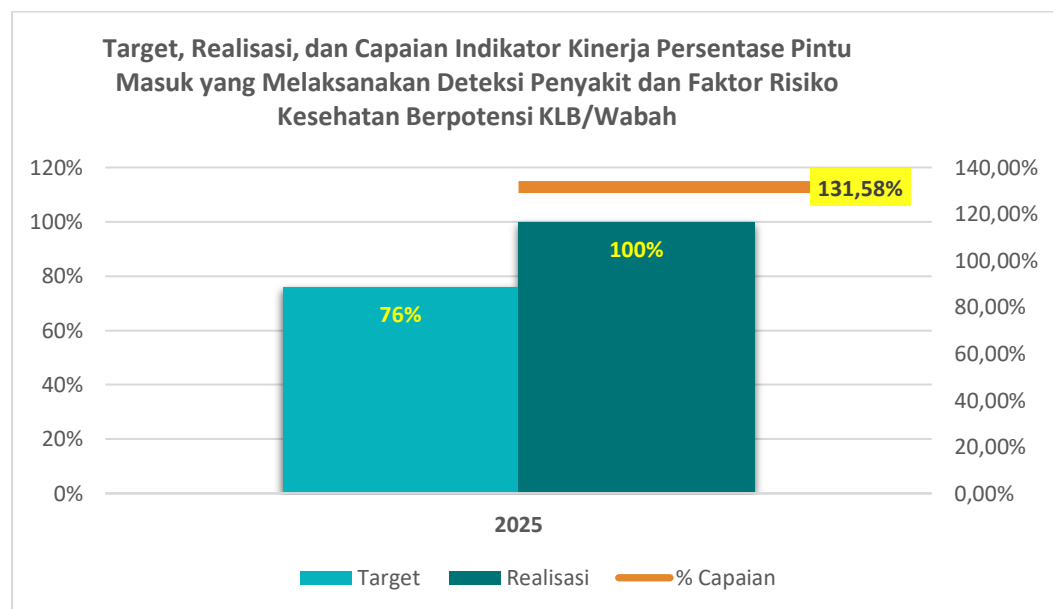
4) Pemeriksaan Lingkungan

- a) Pemeriksaan air bersih untuk penerbitan sertifikat air bersih
- b) Pemeriksaan jasa boga untuk penerbitan sertifikat jasa boga
- c) Pemeriksaan kualitas air bersih di lingkungan bandara dan pelabuhan
- d) Pemeriksaan kualitas udara di lingkungan bandara dan pelabuhan
- e) Pemeriksaan kualitas tanah di lingkungan bandara dan pelabuhan
- f) Pemeriksaan kualitas TPP (Tempat Pengelolaan Pangan)
- g) Survei vektor penyakit malaria

- h) Survei vektor penyakit DBD
- i) Survei vektor penyakit diare
- j) Survei binatang penular penyakit pes
- k) Pemeriksaan lingkungan lainnya

1) Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah Semester I 2026

Capaian indikator kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah semester I 2026 sebagai berikut:



Grafik 3.1. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah sebesar 76%, realisasi indikator kinerja semester I 2026 sebesar 100% dengan capaian sebesar 131,58%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian untuk indikator kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah telah mencapai dari target indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026. Berdasarkan realisasi semester I 2026, maka proyeksi indikator kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah pada akhir tahun akan tercapai. Indikator kinerja Persentase Pintu Masuk yang

Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah terdiri dari empat parameter kinerja yaitu pemeriksaan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan per wilayah kerja. Capaian per wilayah kerja dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.3 Target, Realisasi, dan Capaian Parameter Indikator Kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026

Pelabuhan/Bandara Domestik	Target		Realisasi		Capaian
Pelabuhan Tanjung Santan	4	Pemeriksaan	4	Pemeriksaan	100%
Pelabuhan Tanjung Laut	4	Pemeriksaan	4	Pemeriksaan	100%
Pelabuhan Sangkulirang	4	Pemeriksaan	4	Pemeriksaan	100%
Pelabuhan Sangatta	4	Pemeriksaan	4	Pemeriksaan	100%
Pelabuhan Lhok Tuan	4	Pemeriksaan	4	Pemeriksaan	100%
Pelabuhan Samarinda	4	Pemeriksaan	4	Pemeriksaan	100%
Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto	4	Pemeriksaan	4	Pemeriksaan	100%

Berdasarkan table diatas, wilayah kerja pelabuhan/bandara telah melaksanakan semua kegiatan pengawasan alat angkut, orang, barang dan lingkungan yang artinya 100% kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan capaian pada semester I 2026 maka capaian indikator kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah pada akhir tahun optimis tercapai.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut adalah perbandingan realisasi indikator kinerja per parameter dari tahun 2024-2026:

Tabel 1.4 Perbandingan Capaian Kinerja (Angka Kumulatif) Tahun 2024 s.d 2026 (Semester I)

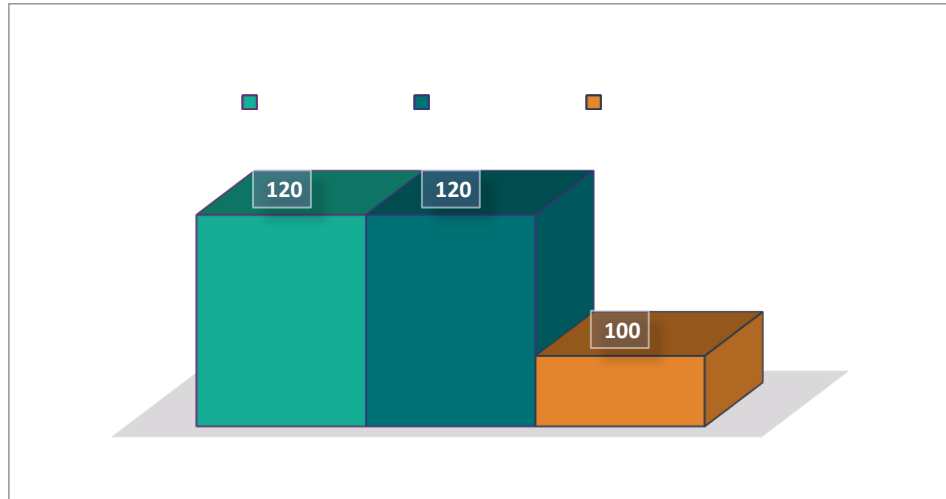
Smt 1	Alat Angkut	Orang	Barang	Lingkungan
2024	28,593	1,013,674	12	1,247
2025	25,602	960,511	15	844
2026	32,311	14,439	209,340	3,935

Berdasarkan tabel diatas, secara angka, perbedaan definisi operasional membuat perbedaan angka capaian indikator kinerja sangat terlihat pada perbandingan capaian indikator kinerja.

a) Pendukung kegiatan pada pemeriksaan alat angkut

Beberapa kegiatan pendukung pada pemeriksaan alat angkut tidak semuanya dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya

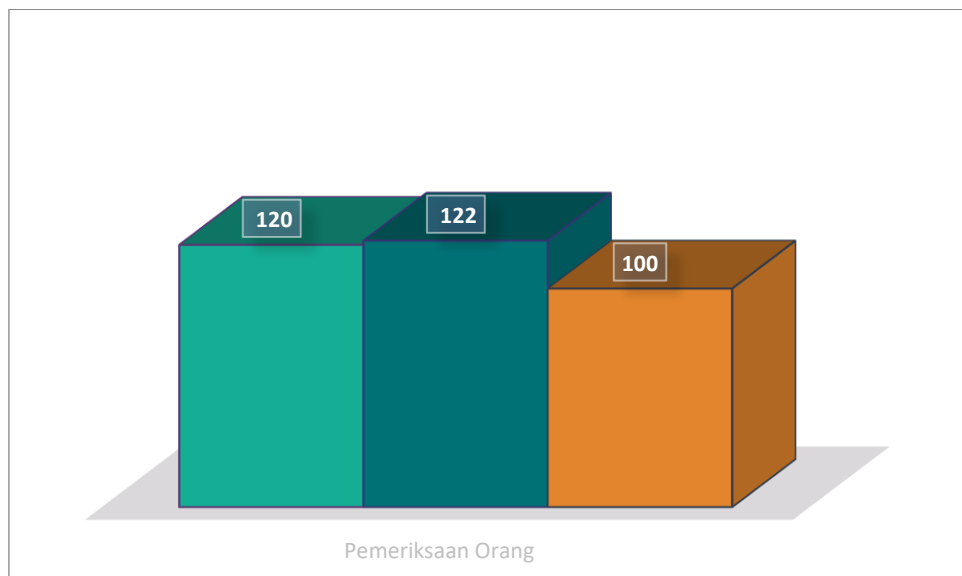
dikarenakan belum terlaksananya kegiatan yang dimaksud seperti pemeriksaan RBA alat angkut. Kegiatan pendukung yang bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya ada pada kegiatan sebagai berikut:



Grafik 3.2. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pemeriksaan Alat Angkut Tahun 2024 s.d 2026 (Semester I)

Berdasarkan gambar 3, capaian indikator kinerja telah tercapai sangat baik yaitu 100% bahkan lebih untuk tahun 2024 dan 2025.

b) Pendukung kegiatan pada pemeriksaan orang



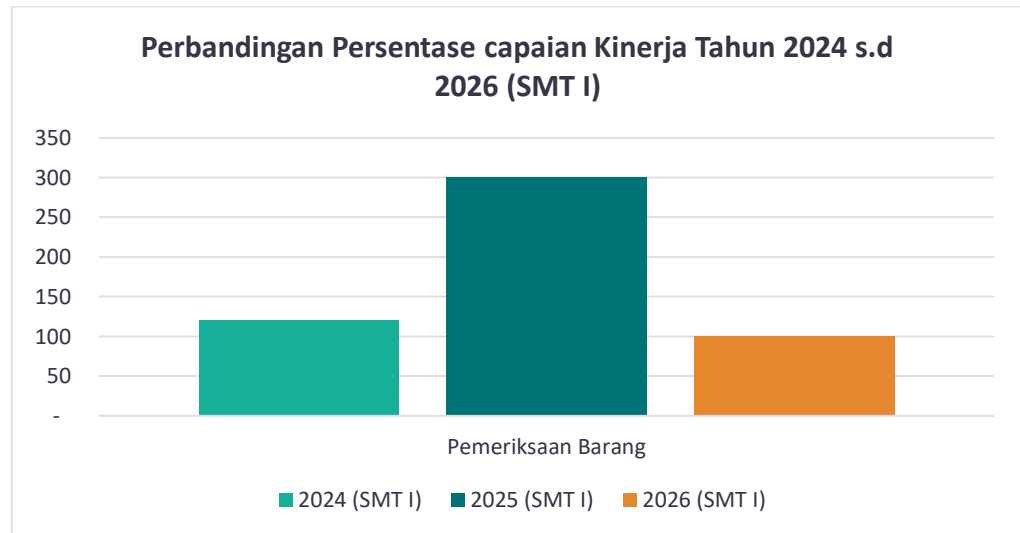
Gambar 3.3 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pemeriksaan Orang Tahun 2024 s.d 2026 (Semester I)

Perbandingan capaian kinerja pemeriksaan orang secara persentase, di tahun 2026 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini

dapat juga dipengaruhi oleh cara perhitungan dimana pada tahun 2024 dan 2025, cara perhitungan capaian kinerja adalah menggunakan indeks

c) Pendukung kegiatan pada pemeriksaan barang

Secara persentase, capaian tahun 2025 memiliki frekuensi capaian yang sangat tinggi yaitu mencapai 300%. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah jenazah yang diawasi sehingga capaian melebihi dari target yang disusun



Gambar 3.4. Perbandingan Persentase Capaian Kinerja Pemeriksaan Barang Tahun 2024 s.d 2026 (Semester I)

d) Pendukung kegiatan pada pemeriksaan lingkungan

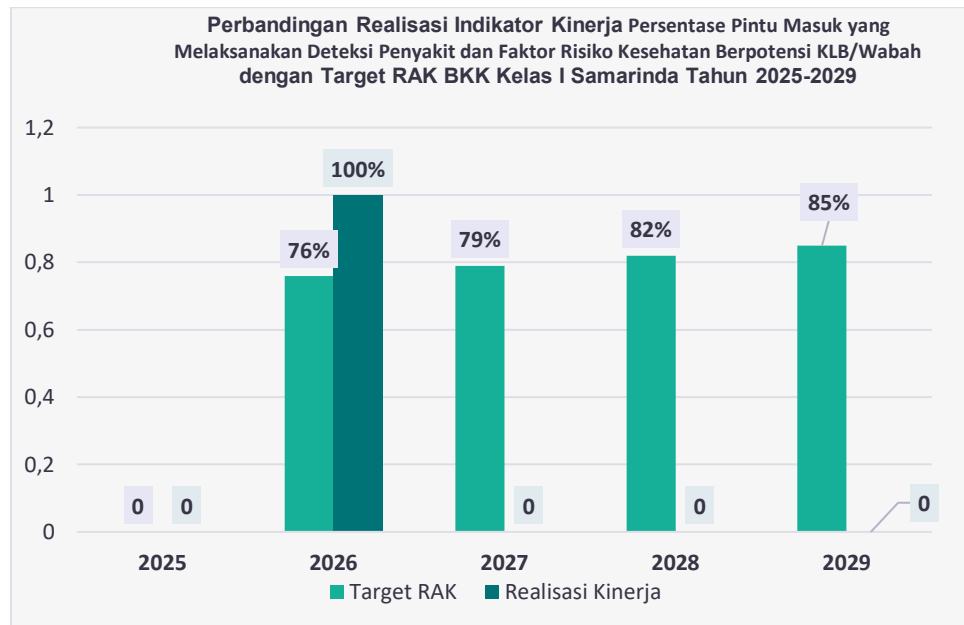
Tabel 3.5. Perbandingan Persentase Capaian Pemriksaan Lingkungan Tahun 2024 s.d 2026 (SMT I)

Tahun (SMT I)	Persentase Pemeriksaan Lingkungan (%)
2024	103,99
2025	102,74
2026	100

Secara persentase, capaian tahun 2024 dan 2025 belum bisa mencapai baseline (120%) dikarenakan beberapa hasil kegiatan masih belum memenuhi syarat

3) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Target dan realisasi indikator kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah jika dibandingkan dengan RAK dapat dilihat pada grafik berikut:

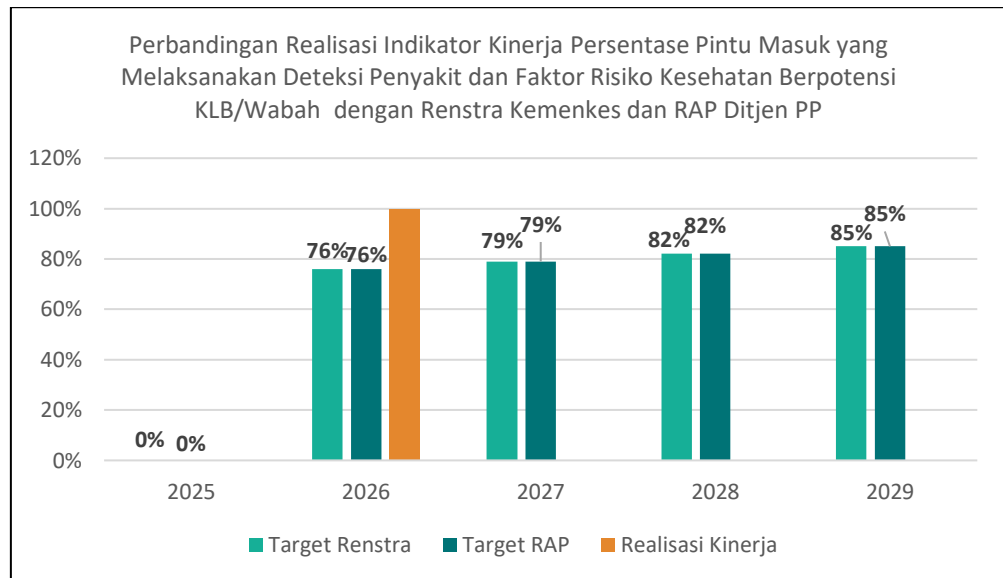


Grafik 3.5 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah dibandingkan dengan Target RAK BKK Kelas I Samarinda

Berdasarkan grafik di atas, target yang ditetapkan untuk RAK BKK Kelas I Samarinda tahun 2025-2029 bersifat meningkat, dimulai dari 76% pada tahun 2026, meningkat menjadi 79% pada tahun 2027, meningkat menjadi 82% pada tahun 2028, dan mencapai 85% pada tahun 2029. Khusus untuk Tahun 2025, tidak ada target dalam RAK karena indikator kinerja ini baru ada pada tahun 2026. Realisasi indikator kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah sebesar 100%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 76%. Melihat realisasi sebesar 100%, realisasi pada akhir tahun 2026 optimis tercapai.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra Kemenkes Tahun 2025-2029 dan RAP Ditjen PP Tahub 2025-2029 untuk Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah untuk tahun 2025 adalah sebesar 94%. Target Renstra Kemenkes dan RAP Ditjen PP dibandingkan dengan realisasi Indikator Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah BKK Kelas I Samarinda sebagai berikut:



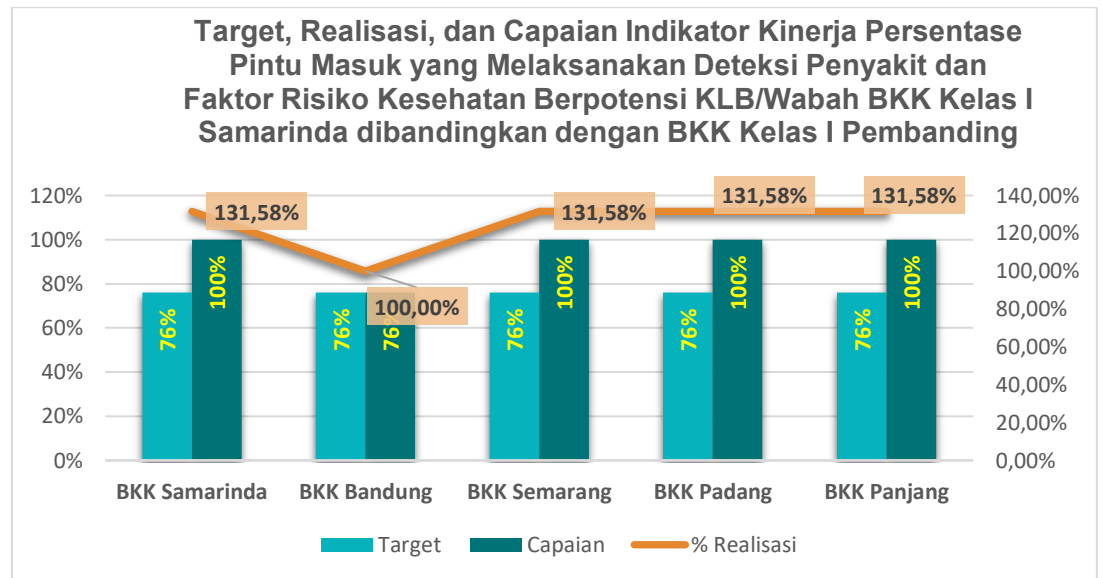
Grafik 3.6 Target Renstra Kemenkes, Target RAP Ditjen PP, dan Realisasi Kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025 - 2029

Berdasarkan grafik di atas, Target Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program (RAP) Ditjen PP untuk indikator kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah pada Tahun 2026 adalah sebesar 76%. Target Renstra dan RAP ini direncanakan meningkat secara bertahap hingga mencapai 85% pada Tahun 2029.

Capaian realisasi sebesar 100% ini telah melampaui Target Renstra Kemenkes Tahun 2026 dan RAP Ditjen PP sebesar 76%. Keberhasilan mencapai 100% di menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengawasan penyakit dan faktor risiko kesehatan di pintu masuk.

5) Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding

Realisasi indikator kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah pada BKK Kelas I Samarinda semester I 2026 adalah sebesar 100% dari target 76%. Target, realisasi, dan capaian kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I pembanding dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 3.7 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah BKK Kelas I Samarinda dibandingkan dengan BKK Kelas I Pembanding Semester I 2026

Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator BKK Kelas I Samarinda dan BKK Kelas I pembanding sudah mencapai target tahun 2026. Empat BKK sudah melampaui target sebesar 76%, sedangkan BKK Bandung hanya mencapai target yang ditetapkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Semua wilayah kerja pada indikator kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah sudah tercapai 100%. Semua wilayah kerja telah melaksanakan pengawasan terhadap orang, alat angkut, barang, dan lingkungan dari penyakit dan faktor risiko kesehatan.

f. Upaya untuk menunjang pencapaian indikator

Tercapainya indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN didukung adanya beberapa kebijakan yaitu:

- 1) Tersedianya anggaran pada KRO 7920.PEA Koordinasi sebesar Rp 146.752.000.
- 2) Tersedianya anggaran pada KRO 7960.PEF Sosialisasi dan Diseminasi sebesar Rp 25.844.000.
- 3) Tersedianya anggaran pada KRO 7960.QAA Pelayanan Publik kepada Masyarakat sebesar Rp 71.822.000.
- 4) Tersedianya anggaran pada KRO 7960.QAH Pelayanan Publik Lainnya sebesar Rp 1.730.480.000.

5) Tersedianya anggaran pada KRO 7960.RAB Sarana Bidang Kesehatan sebesar Rp 1.245.544.000.

g. Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan adalah efisiensi anggaran yang mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Realisasi kinerja indikator kinerja Indeks Deteksi Faktor Risiko di Pelabuhan / Bandara / PLBDN yaitu 100%, mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 76%, dengan capaian 131,58%. Realisasi anggaran sebesar Rp 1.073.875.233 dari pagu anggaran Rp 3.220.442.000. Berdasarkan perhitungan didapatkan efisiensi sebesar 0,74657 dengan nilai Efisiensi 236,64% karena dapat mencapai kinerja 100,00% dengan menggunakan anggaran 33,34% sehingga capaian indikator terkategori efisien.

h. Masalah yang dihadapi

- 1) Pelayanan terhadap pengawasan orang, alat angkut, barang, dan lingkungan terkendala karena jumlah SDM BKK Kelas I Samarinda yang terbatas.
- 2) Pelayanan terhadap pengawasan orang terkendala karena akses pintu masuk dan keluar Pelabuhan Samarinda masih bergabung sehingga proses pengawasan penumpang tidak maksimal.
- 3) Pelayanan terhadap pengawasan alat angkut terkendala karena jumlah speedboat untuk transportasi menuju kapal yang diperiksa belum cukup banyak sedangkan jarak antar kapal yang bersandar

i. Usul Pemecahan Masalah

- 1) Membuat usulan penambahan SDM BKK Kelas I Samarinda melalui seleksi CPNS dan PPPK.
- 2) Membuat usulan pemisahan pintu masuk dan keluar di Pelabuhan Samarinda kepada otoritas pelabuhan.
- 3) Membuat usulan penambahan armada speedboat kepada agen pelayaran dan otoritas pelabuhan.

2. Nilai SAKIP Unit Kerja

a. Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3) PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan
- 6) Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda Tahun 2026

b. Pengertian

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja sektor publik yang mengintegrasikan proses perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja secara berkesinambungan. Implementasi SAKIP bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya pemerintah memberikan hasil yang terukur, efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi terhadap tingkat implementasi SAKIP pada suatu instansi pemerintah. Penilaian dilakukan secara komprehensif terhadap kualitas penerapan siklus manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Nilai yang diperoleh mencerminkan tingkat akuntabilitas organisasi dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja. Nilai SAKIP menjadi salah satu indikator strategis yang menunjukkan kualitas tata kelola organisasi sekaligus menjadi dasar dalam mendorong peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome), bukan hanya pada penyelesaian kegiatan (output).

c. Definisi Operasional

Hasil Penilaian T-1(Tahun sebelumnya) dari evaluasi terhadap implementasi SAKIP yang terdiri dari komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan oleh Tim Penilai, yaitu:

- 1) Untuk level kementerian, penilaian dilaksanakan oleh Tim Penilai dari Kemenpan RB, dengan menilai dokumen kelengkapan SAKIP yang telah disampaikan melalui aplikasi elektronik SAKIP Reviu (esr. menpan.go id)
- 2) Untuk level Unit Utama (Eselon I), penilaian dilaksanakan oleh APIP Kementerian Kesehatan
- 3) Untuk level Satuan Kerja penilaian dilaksanakan oleh Tim
- 4) SKI/SPI Unit Utama/Satker

d. Cara Perhitungan

Nilai SAKIP T-1(Tahun sebelumnya) yang diperoleh dari hasil penjumlahan perhitungan komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja (Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Metode pengukuran menggunakan **Indeks Penilaian (Scoring Index)**, yaitu pemberian skor terhadap setiap komponen dan subkomponen penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam instrumen evaluasi SAKIP. Nilai akhir merupakan akumulasi dari seluruh komponen yang kemudian dikonversi ke dalam kategori atau predikat akuntabilitas kinerja. Komponen penilaian Nilai SAKIP terdiri atas empat aspek utama sebagaimana disajikan pada berikut:

Tabel 3.6 Komponen Nilai SAKIP

No	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	30
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
Jumlah		100

Setiap komponen selanjutnya dievaluasi melalui beberapa subkomponen dan kriteria penilaian yang mencerminkan kualitas implementasi SAKIP, meliputi ketersediaan dokumen, kualitas penyusunan dokumen, pemanfaatan hasil pengukuran dan evaluasi dalam pengambilan keputusan, serta dampak implementasi SAKIP terhadap peningkatan kinerja organisasi

e. Capaian Indikator

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKK Kelas I Samarinda memperoleh Nilai SAKIP sebesar 84,30 dengan Predikat A. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja di lingkungan BKK Kelas I Samarinda telah berjalan dengan baik dan memenuhi kriteria akuntabilitas kinerja sesuai pedoman evaluasi SAKIP.

Nilai tersebut merupakan akumulasi dari penilaian terhadap empat komponen utama, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Hasil penilaian masing-masing komponen disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Hasil Penilaian SAKIP BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	22,80	76,00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	6	100,00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	6,3	70,00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	10,5	70,00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	26,70	89,00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	6	100,00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	7,2	80,00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	13,5	90,00%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	13,80	92,00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3,00	3	100,00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4,50	4,05	90,00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	90,00%

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	21,00	84,00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	5	100,00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6	80,00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12,50	10	80,00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja / Kategori Predikat			84,30	A

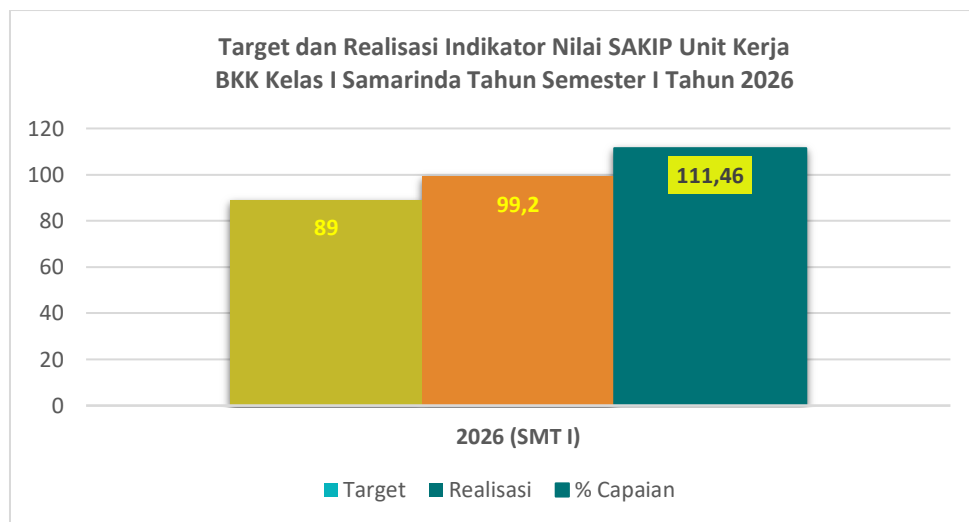
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pelaporan Kinerja merupakan komponen dengan capaian tertinggi, yaitu sebesar 92%, yang menunjukkan bahwa penyusunan laporan kinerja telah memenuhi prinsip akuntabilitas, kelengkapan, dan pemanfaatan informasi kinerja secara optimal. Komponen Pengukuran Kinerja juga memperoleh hasil yang baik dengan capaian 89%, mencerminkan bahwa proses pemantauan dan pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara konsisten.

Sementara itu, komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh capaian 84%, yang menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi internal telah berjalan cukup efektif, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Adapun komponen Perencanaan Kinerja memperoleh capaian 76%, sehingga menjadi komponen dengan nilai relatif paling rendah dibandingkan komponen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kualitas perencanaan, terutama pada aspek penyusunan indikator kinerja yang berorientasi hasil, penyelarasan *cascading* kinerja, serta pemanfaatan dokumen perencanaan dalam pengambilan keputusan, masih menjadi prioritas peningkatan.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di BKK Kelas I Samarinda telah terlaksana dengan baik dan mampu mempertahankan Predikat A. Namun demikian, peningkatan kualitas pada aspek Perencanaan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tetap diperlukan agar nilai SAKIP dapat terus meningkat pada periode evaluasi berikutnya.

1) Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah Semester I 2026

Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda Tahun 2026 menetapkan target Nilai SAKIP Unit Kerja sebesar 83,00. Sampai dengan Semester I Tahun 2026, realisasi indikator mencapai 84,30, sehingga tingkat capaian mencapai 101,57%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja yang telah ditetapkan berhasil dilampaui sebesar 1,30 poin.

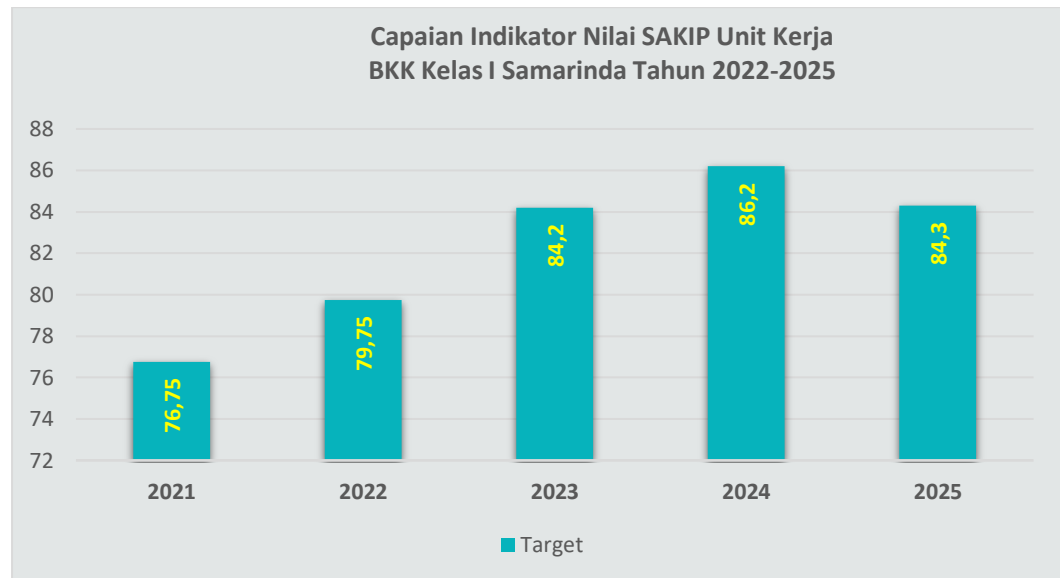


Grafik 3.8 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Nilai Sakip Unit Kerja BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026

Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di BKK Kelas I Samarinda telah berjalan dengan baik. Keberhasilan melampaui target mencerminkan konsistensi organisasi dalam menerapkan siklus manajemen kinerja yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda mampu mempertahankan **Predikat A**, yang menjadi indikator bahwa tata kelola akuntabilitas kinerja telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam pedoman evaluasi SAKIP.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada Semester I Tahun 2026, BKK Kelas I Samarinda menggunakan hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda memperoleh **Nilai SAKIP sebesar 84,30** dengan **Predikat A**. Nilai tersebut menjadi realisasi indikator pada Semester I Tahun 2026. Berikut ini Adalah realisasi nilai SAKIP dari tahun 2021-2025:



Grafik 3.9 Capaian Indikator Kinerja Nilai SAKIP Unit Kerja BKK Kelas I Samarinda Tahun 2021-2025

Apabila dibandingkan dengan hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 yang memperoleh nilai **86,20** dengan **Predikat A**, terjadi penurunan sebesar **1,90 poin**. Meskipun demikian, penurunan tersebut tidak mengubah kategori akuntabilitas kinerja, sehingga BKK Kelas I Samarinda tetap mampu mempertahankan **Predikat A**. Penurunan nilai tersebut menunjukkan bahwa meskipun implementasi SAKIP secara umum masih berada pada kategori **baik**, terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan agar kualitas akuntabilitas kinerja dapat terus meningkat. Berdasarkan hasil evaluasi, komponen **Pelaporan Kinerja** dan **Pengukuran Kinerja** masih menjadi komponen dengan capaian tertinggi, sedangkan **Perencanaan Kinerja** merupakan komponen yang memperoleh nilai paling rendah sehingga menjadi fokus utama perbaikan. Selain itu, aspek **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** juga masih memerlukan penguatan agar hasil evaluasi internal semakin dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Meskipun nilai mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, BKK Kelas I Samarinda telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil evaluasi melalui penyempurnaan dokumen perencanaan, penguatan pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi evaluator. Upaya tersebut menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP pada periode evaluasi berikutnya

Tabel 3.8 Realisasi Nilai SAKIP per Komponen BKK Kelas I Samarinda tahun 2024 dan 2025

Komponen	2024	2025	Perubahan
Perencanaan Kinerja	25,20	22,80	-2,40
Pengukuran Kinerja	27,00	26,70	-0,30
Pelaporan Kinerja	13,50	13,80	+0,30
Evaluasi Internal	20,50	21,00	+0,50
Total	86,20	84,30	-1,90

Penurunan Nilai SAKIP dari **86,20 pada Tahun 2024** menjadi **84,30 pada Tahun 2025** terutama dipengaruhi oleh perubahan capaian pada beberapa komponen penilaian. Berdasarkan hasil Lembar Kerja Evaluasi (LKE), komponen **Perencanaan Kinerja** mengalami penurunan dari **25,20 (84%)** menjadi **22,80 (76%)**, sedangkan komponen **Pengukuran Kinerja** relatif stabil dengan capaian yang tetap tinggi. Sebaliknya, komponen **Pelaporan Kinerja** mengalami peningkatan dari **13,50 (90%)** menjadi **13,80 (92%)**, dan **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** juga meningkat dari **20,50 (82%)** menjadi **21,00 (84%)**.

Penurunan pada aspek **Perencanaan Kinerja** menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap penurunan nilai total SAKIP. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun dokumen perencanaan telah tersedia dan memenuhi ketentuan, masih diperlukan penguatan pada kualitas penyusunan perencanaan, terutama dalam memastikan ukuran kinerja yang berorientasi hasil (*outcome*), penerapan indikator yang memenuhi prinsip SMART, penyelarasan (*cascading*) antarlevel organisasi, serta optimalisasi pemanfaatan dokumen perencanaan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan.

Di sisi lain, peningkatan pada komponen **Pelaporan Kinerja** dan **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** menunjukkan bahwa organisasi telah melakukan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja serta pemanfaatan hasil evaluasi internal. Hal tersebut menjadi modal penting bagi BKK Kelas I Samarinda untuk meningkatkan kembali Nilai SAKIP pada periode evaluasi berikutnya tanpa kehilangan predikat **A**.

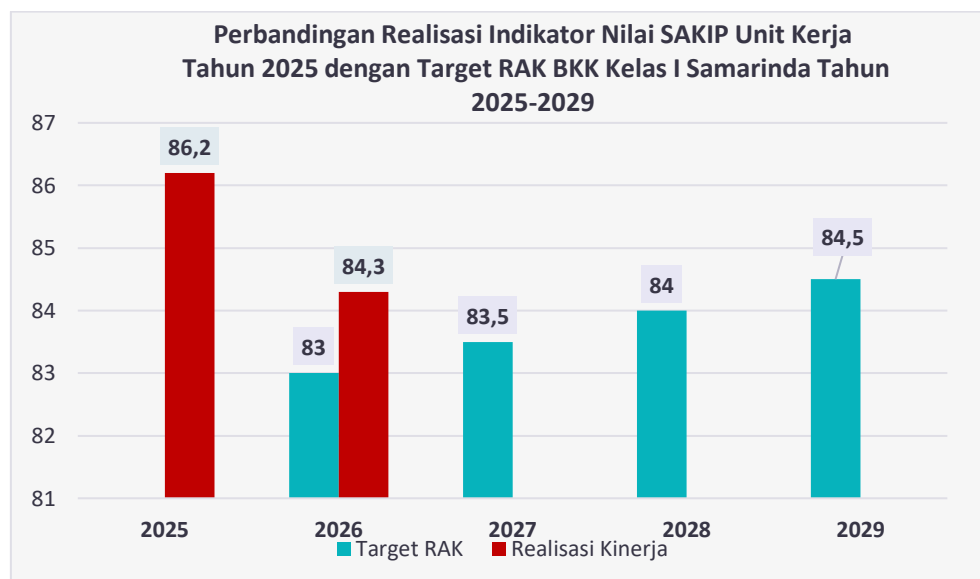
Berdasarkan grafik capaian Nilai SAKIP Unit Kerja BKK Kelas I Samarinda Tahun 2021–2025, terlihat bahwa kinerja implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan **tren peningkatan yang positif** selama periode 2021 hingga 2024. Nilai SAKIP

meningkat dari **76,75 pada tahun 2021** menjadi **79,75 pada tahun 2022**, kemudian meningkat kembali menjadi **84,20 pada tahun 2023**, dan mencapai nilai tertinggi sebesar **86,20 pada tahun 2024**.

Secara keseluruhan, apabila dibandingkan antara tahun 2021 dan tahun 2025, nilai SAKIP meningkat sebesar **7,55 poin**, yang mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola kinerja organisasi dalam kurun waktu lima tahun. Dengan demikian, penguatan implementasi SAKIP perlu terus dilakukan secara berkesinambungan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025–2029 menetapkan target peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara bertahap sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil. Target tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan berbagai upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP selama periode perencanaan strategis



Grafik 3.10 Perbandingan Realisasi Indikator Nilai SAKIP Unit Kerja Tahun 2025 dengan Target RAK BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025-2029

Berdasarkan grafik tersebut, capaian Nilai SAKIP BKK Kelas I Samarinda pada Semester I Tahun 2026 yang mengacu pada hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 telah mencapai **84,30**, sehingga melampaui target RAK Tahun 2026

sebesar **83,00** atau lebih tinggi **1,30 poin**. Hasil ini menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah memenuhi sasaran yang ditetapkan pada tahun pertama pelaksanaan RAK 2025–2029.

Selain melampaui target tahun 2026, capaian sebesar **84,30** juga telah **melampaui target RAK Tahun 2027** yang ditetapkan sebesar **84,00**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi SAKIP BKK Kelas I Samarinda telah berada satu tingkat lebih maju dibandingkan target jangka menengah yang direncanakan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target RAK Tahun 2028 sebesar **85,00** dan target akhir RAK Tahun 2029 sebesar **86,00**. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan yang berkelanjutan, khususnya pada aspek **Perencanaan Kinerja** yang berdasarkan hasil evaluasi masih menjadi komponen dengan nilai terendah. Penguatan kualitas penyusunan perencanaan, penyelarasan (*cascading*) kinerja, penyempurnaan indikator yang memenuhi prinsip SMART, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi internal diharapkan dapat meningkatkan Nilai SAKIP secara bertahap sesuai target RAK yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, capaian Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda berada pada jalur yang baik (*on track*) dalam mewujudkan sasaran peningkatan akuntabilitas kinerja sebagaimana ditetapkan dalam RAK 2025–2029. Konsistensi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dan melakukan penyempurnaan pada setiap siklus manajemen kinerja menjadi faktor penting untuk mencapai target akhir Nilai SAKIP sebesar 86,00 pada Tahun 2029.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator **Nilai SAKIP BKK Kelas I Samarinda** merupakan indikator yang disusun secara berjenjang (*cascading*) dari sasaran strategis tingkat nasional. Dalam **Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029**, sasaran strategis pada aspek tata kelola diukur melalui **ISS 33 – Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan** dengan target sebesar **92,16**. Indikator tersebut menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi secara menyeluruh di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Sebagai tindak lanjut dari sasaran strategis tersebut, **Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tahun 2025–2029** menetapkan **IKM 33.1 – Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit** dengan target sebesar **83**. Selanjutnya, indikator tersebut diturunkan kembali dalam **Rencana Aksi Kegiatan BKK Kelas I Samarinda** menjadi **IKM**

33.1.1 – Nilai SAKIP dengan target yang sama, yaitu **83**, sebagai ukuran keberhasilan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tingkat satuan kerja

Hubungan keterkaitan indikator tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

<i>Tingkat Perencanaan</i>	<i>Indikator</i>	<i>Target</i>
<i>RPJMN / Renstra Kementerian Kesehatan</i>	ISS 33 – Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan	92,16
<i>RAP Ditjen Penanggulangan Penyakit</i>	IKM 33.1 – Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit	83,00
<i>RAK BKK Kelas I Samarinda</i>	IKM 33.1.1 – Nilai SAKIP	83,00

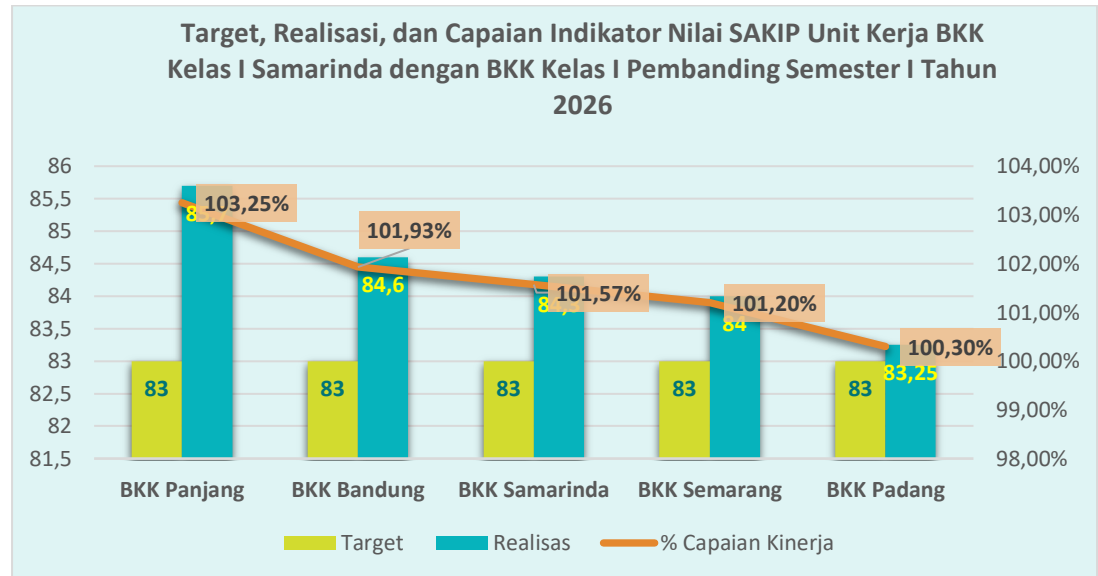
Pada Semester I Tahun 2026, BKK Kelas I Samarinda memperoleh **Nilai SAKIP sebesar 84,30**, sehingga **melampaui target indikator yang ditetapkan pada RAP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit maupun RAK BKK Kelas I Samarinda**, masing-masing sebesar **83,00**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP di BKK Kelas I Samarinda telah mendukung pencapaian sasaran Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dalam penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja.

Meskipun indikator pada tingkat Kementerian Kesehatan menggunakan **Nilai Reformasi Birokrasi** sebagai ukuran kinerja, sedangkan pada tingkat Direktorat Jenderal dan satuan kerja menggunakan **Nilai SAKIP**, kedua indikator tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Implementasi SAKIP yang berkualitas merupakan salah satu elemen utama dalam penilaian Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penerapan SAKIP di BKK Kelas I Samarinda tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, tetapi juga mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi Kementerian Kesehatan secara keseluruhan.

- 5) Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding

Untuk memperoleh gambaran mengenai posisi capaian kinerja, Nilai SAKIP BKK Kelas I Samarinda dibandingkan dengan beberapa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I yang menjadi pembanding, yaitu BKK Kelas I Bandung, Padang, Panjang, dan Semarang. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui posisi relatif BKK Kelas I Samarinda sekaligus mengidentifikasi

peluang peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



Grafik 3.11 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Nilai SAKIP Unit Kerja BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding Semester I Tahun 2026

Berdasarkan grafik tersebut, seluruh BKK pembanding berhasil melampaui target Nilai SAKIP sebesar 83,00, yang menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit telah berjalan dengan baik.

Dengan realisasi 84,30, BKK Kelas I Samarinda menempati peringkat ketiga di antara lima BKK pembanding. Capaian tersebut berada di atas BKK Kelas I Semarang dan BKK Kelas I Padang, namun masih berada di bawah BKK Kelas I Bandung dan BKK Kelas I Panjang yang memperoleh nilai masing-masing 84,60 dan 85,70.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas implementasi SAKIP di BKK Kelas I Samarinda telah berada pada kelompok satuan kerja dengan kinerja yang baik serta mampu melampaui target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih terdapat peluang untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP agar mampu mencapai capaian yang setara dengan BKK Kelas I Bandung maupun BKK Kelas I Panjang. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penguatan kualitas Perencanaan Kinerja, penyempurnaan penerapan *cascading* kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja yang berorientasi hasil, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi internal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, hasil perbandingan menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda memiliki tingkat akuntabilitas kinerja yang kompetitif di lingkungan BKK Kelas I. Capaian tersebut menjadi modal yang baik untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SAKIP sehingga mampu mencapai target RAK tahun-tahun berikutnya dan berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit maupun Kementerian Kesehatan

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indicator

Dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKK Kelas I Samarinda telah melaksanakan berbagai upaya yang mencakup seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga tindak lanjut hasil evaluasi. Upaya tersebut dilakukan secara berkesinambungan sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1) Penguatan Perencanaan Kinerja

BKK Kelas I Samarinda melakukan penyelarasan dokumen perencanaan melalui penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kegiatan (RAK), dan cascading kinerja mulai dari tingkat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit hingga unit kerja. Penyelarasan tersebut bertujuan memastikan setiap indikator kinerja memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis organisasi serta mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan nasional

2) Penguatan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan capaian indikator kinerja, monitoring pelaksanaan rencana aksi, serta evaluasi terhadap realisasi target pada setiap periode pelaporan. Hasil pengukuran dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan

3) Peningkatan Kualitas Pelaporan Kinerja

Penyusunan laporan kinerja dilakukan secara tepat waktu dan mengacu pada prinsip akuntabilitas, yaitu menyajikan keterkaitan antara target, realisasi, analisis capaian, faktor pendukung, kendala, dan tindak lanjut. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, laporan tersebut juga dimanfaatkan sebagai media evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan

4) Penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi internal dilaksanakan melalui reviu dokumen kinerja, monitoring pelaksanaan rencana aksi, serta evaluasi terhadap implementasi rekomendasi hasil penilaian SAKIP. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa setiap rekomendasi evaluasi ditindaklanjuti secara sistematis dan menjadi bagian dari proses perbaikan berkelanjutan

5) Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

BKK Kelas I Samarinda telah menyusun dan melaksanakan matriks tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP. Berbagai rekomendasi yang diberikan evaluator telah ditindaklanjuti melalui penyempurnaan dokumen perencanaan, penguatan mekanisme pengukuran kinerja, perbaikan analisis indikator, serta penyempurnaan standar operasional prosedur yang mendukung implementasi SAKIP

6) Penguatan Koordinasi dan Pendampingan

Koordinasi dilakukan secara berkelanjutan dengan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Inspektorat Jenderal, serta unit-unit terkait dalam rangka memastikan kesesuaian implementasi SAKIP dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dilakukan pendampingan kepada unit kerja dalam penyusunan dokumen kinerja, pemenuhan eviden, serta tindak lanjut rekomendasi evaluasi

g. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternative Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan BKK Kelas I Samarinda dalam mempertahankan Predikat **A** didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan seluruh unit kerja dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara konsisten.
2. Penyelarasan dokumen perencanaan melalui *cascading* sasaran strategis, indikator kinerja, dan Perjanjian Kinerja.
3. Pelaksanaan monitoring, pengukuran, dan evaluasi kinerja secara berkala sebagai dasar pengendalian kinerja organisasi.
4. Kualitas penyusunan Laporan Kinerja yang terus ditingkatkan sehingga memperoleh nilai tinggi pada komponen Pelaporan Kinerja.
5. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dilaksanakan secara sistematis melalui penyusunan matriks tindak lanjut dan pemenuhan eviden.
6. Koordinasi yang baik dengan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan unit terkait dalam penyempurnaan implementasi SAKIP.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP, telah dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja dan *cascading* indikator kinerja pada seluruh level organisasi.
 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP melalui penyusunan dan pelaksanaan matriks tindak lanjut.
 3. Meningkatkan kualitas indikator kinerja agar lebih berorientasi pada hasil (*outcome*) dan memenuhi prinsip SMART.
 4. Melaksanakan reviu dan evaluasi internal terhadap dokumen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja secara berkala.
 5. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.
 6. Memperkuat koordinasi dan pendampingan kepada unit kerja dalam penyusunan dokumen kinerja dan pemenuhan eviden evaluasi SAKIP
- h. Kendala/Masalah

Meskipun Nilai SAKIP BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025 mencapai 84,30 dengan predikat A (Memuaskan) dan telah melampaui target yang ditetapkan, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkelanjutan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Komponen Perencanaan Kinerja masih menjadi komponen dengan nilai terendah dibandingkan komponen lainnya, sehingga masih diperlukan penyempurnaan kualitas perencanaan, terutama dalam penguatan hubungan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang ditetapkan.
2. Kualitas analisis dalam dokumen kinerja masih perlu ditingkatkan agar lebih menggambarkan hubungan antara capaian indikator, faktor penyebab, efisiensi penggunaan sumber daya, serta tindak lanjut yang dilakukan.
3. Pemanfaatan hasil evaluasi internal sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaporan masih perlu dioptimalkan agar seluruh rekomendasi evaluasi dapat diimplementasikan secara konsisten.
4. Pemenuhan data dukung dan eviden SAKIP masih memerlukan koordinasi yang intensif dengan seluruh unit kerja dan wilayah kerja untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, dan ketertelusuran dokumen pendukung. Kegiatan pengumpulan, verifikasi, dan validasi eviden merupakan tahapan penting dalam menjaga kualitas dokumen SAKIP.

5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang perencanaan, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja masih perlu dilakukan agar implementasi SAKIP dapat semakin efektif dan adaptif terhadap perkembangan regulasi serta kebutuhan organisasi. Hal ini juga menjadi salah satu kendala yang diidentifikasi dalam evaluasi internal SAKIP

i. Upaya Pemecahan masalah

Sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala yang masih ditemui dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BKK Kelas I Samarinda telah melaksanakan berbagai upaya pemecahan masalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dokumen perencanaan kinerja melalui penajaman hubungan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan rencana aksi agar lebih selaras dengan prinsip manajemen kinerja berbasis hasil.
2. Meningkatkan kualitas analisis dalam dokumen kinerja dengan memperkuat pembahasan mengenai capaian indikator, faktor keberhasilan, kendala, efisiensi penggunaan sumber daya, dan tindak lanjut perbaikan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi internal melalui monitoring dan reviu berkala terhadap implementasi SAKIP serta memastikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi ditindaklanjuti secara sistematis.
4. Memperkuat koordinasi dengan seluruh unit kerja dan wilayah kerja dalam pemenuhan data dukung dan eviden SAKIP guna meningkatkan kualitas, konsistensi, dan ketertelusuran dokumen akuntabilitas kinerja.
5. Meningkatkan kompetensi pengelola SAKIP melalui pembelajaran mandiri, koordinasi teknis, dan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan inovasi digital, seperti SIKAWAI dan Bank Data, untuk mendukung pengelolaan data kinerja, penyimpanan eviden, monitoring capaian indikator, dan penyusunan laporan kinerja secara lebih efektif. Pemanfaatan kedua inovasi tersebut terbukti mendukung aspek pengukuran dan pelaporan kinerja dalam implementasi SAKIP.

j. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan adalah efisiensi anggaran yang mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Unit Kerja sampai dengan Semester I Tahun 2026 telah tercapai 84,30 dari target 83 untuk semester I Tahun 2026 (target tahun 2026 juga sebesar 83). Realisasi anggaran sebesar Rp35,513,378,- dari pagu anggaran Rp250,021,000,-. Berdasarkan perhitungan didapatkan efisiensi sebesar 0,86015 dengan nilai Efisiensi 265,04%. Berdasarkan hasil tersebut maka nilai efisiensi dikatakan efisien karena dapat mencapai kinerja 101,57% dengan menggunakan anggaran tidak melebihi target 50% di Semester I yaitu sebesar 14,20% sehingga capaian indikator kinerja dianggap efisien.

k. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian Nilai SAKIP sebesar 84,30 dengan predikat A (Memuaskan) pada Tahun 2025 yang menjadi capaian Semester I Tahun 2026 merupakan hasil implementasi berbagai program dan kegiatan yang mendukung penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan BKK Kelas I Samarinda. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja sesuai dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Program dan kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator Nilai SAKIP antara lain sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran pada RO 4815.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp250.021.000,-.
2. Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja
Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja (RAK), serta penyempurnaan cascading kinerja dilakukan untuk memastikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target, dan program kerja. Kegiatan ini mendukung peningkatan kualitas komponen Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP.
3. Monitoring dan Pengukuran Capaian Kinerja
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian indikator kinerja secara berkala memungkinkan organisasi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, mengidentifikasi deviasi capaian, serta menyusun langkah perbaikan secara tepat waktu. Kegiatan ini berkontribusi terhadap peningkatan komponen Pengukuran Kinerja.
4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan secara sistematis dengan menyajikan informasi mengenai capaian indikator kinerja, analisis keberhasilan, kendala, efisiensi penggunaan sumber daya, dan tindak lanjut perbaikan.

Penyempurnaan kualitas penyajian laporan memberikan kontribusi terhadap peningkatan komponen Pelaporan Kinerja.

5. Pelaksanaan Evaluasi Internal dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP dilaksanakan secara berkala untuk menilai efektivitas penerapan manajemen kinerja. Seluruh rekomendasi hasil evaluasi disusun dalam matriks tindak lanjut dan dipantau penyelesaiannya sehingga menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

6. Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi Informasi

Pemanfaatan aplikasi SIKAWAI dan Bank Data mendukung pengelolaan dokumen, penyimpanan eviden, monitoring capaian indikator, serta penyediaan data pendukung implementasi SAKIP secara lebih efektif dan efisien. Inovasi tersebut turut mendukung peningkatan kualitas komponen Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

7. Penguatan Koordinasi dan Pendampingan Implementasi SAKIP

Koordinasi secara berkala dengan seluruh unit kerja dan wilayah kerja dilakukan dalam rangka memastikan kesesuaian dokumen, pemenuhan data dukung, serta tindak lanjut hasil evaluasi. Selain itu, pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen SAKIP juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan BKK Kelas I Samarinda.

Berdasarkan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tersebut, implementasi SAKIP di BKK Kelas I Samarinda menunjukkan peningkatan kualitas tata kelola kinerja yang ditandai dengan tercapainya Nilai SAKIP sebesar 84,30 atau 101,57% dari target Semester I Tahun 2026. Sinergi antara perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, serta pemanfaatan inovasi digital menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini

3. Indikator Nilai Kinerja Anggaran

a. Dasar Hukum

Pelaksanaan pengukuran Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta evaluasi kinerja anggaran pada kementerian/lembaga. Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pengukuran indikator ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024.
- 5) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27 Semester I Tahun 2026.
- 6) Dokumen Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda Tahun 2026 yang menetapkan Nilai Kinerja Anggaran sebagai salah satu indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

b. Pengertian

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas anggaran. Indikator Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% (lima puluh persen) nilai kinerja kinerja perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) nilai kinerja kinerja pelaksanaan anggaran.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja perencanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran

c. Definisi Operasional

Besarnya Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi e-Monev Kementerian Keuangan, yang terdiri dari:

- 1) Kinerja atas perencanaan anggaran diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas diukur berdasarkan agregasi capaian IKP dan agregasi capaian RO, sedangkan efisiensi diukur berdasarkan

agregasi capaian RO dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya yang meliputi: penggunaan SBK; dan/atau efisiensi SBK.

- 2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran diukur menggunakan instrumen Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang terdiri atas revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP dan TUP), dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM), serta capaian output

d. Cara Perhitungan

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan hasil pengukuran kinerja pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran. Pengukuran dilakukan terhadap dua komponen utama, yaitu **Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)** dan **Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)**.

NKA dapat dihitung dengan rumus:

$$NKA = 50\% \times NKPA + 50\% \times IKPA$$

Keterangan:

NKPA = Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

1) **NKPA (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran)**

NKPA merupakan hasil evaluasi terhadap kualitas perencanaan anggaran yang diukur berdasarkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Efektivitas dinilai melalui agregasi capaian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Rincian Output (RO), sedangkan efisiensi dinilai berdasarkan penggunaan dan efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK).

a) Efektivitas

(1) Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO_i

TVRO_i : Target Volume RO_i

N : Jumlah RO

b) Efisiensi

(1) Penggunaan SBK

Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU. Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$Penggunaan_{SBK} = \left(\frac{\sum RO_{SBKK} + \sum RO_{SBKU}}{\sum RO_{SBKK \text{ dalam PMK}} + \sum RO_{\text{memenuhi kriteria SBKU}}} \right) \times 100\%$$

(2) Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{Indeks_{SBK_i} - Indeks_{RA_{SBK_i}}}{Indeks_{SBK_i}} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan :

ESBK : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks SBK_i : Indeks SBK RO_i sesuai dengan PMK SBK

Indeks RA_{SBK_i} : Indeks Realisasi RO_i SBK

N : Jumlah RO SBK

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Tingkat Satker sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian RO	75
Efisiensi 25	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran/Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja. Pengukuran IKPA dilakukan

berdasarkan tiga aspek penilaian, yaitu **Kualitas Perencanaan Anggaran**, **Kualitas Pelaksanaan Anggaran**, dan **Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran**. Masing-masing aspek terdiri atas beberapa indikator yang memiliki bobot penilaian tertentu sehingga secara keseluruhan membentuk nilai IKPA satuan kerja. Komponen penilaian IKPA Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Aspek	Indikator	Bobot
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	10%
	Deviasi Halaman III DIPA	15%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	20%
	Belanja Kontraktual	10%
	Penyelesaian Tagihan	10%
	Pengelolaan UP dan TUP	10%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	25%
Pengurang	Dispensasi SPM	Sesuai ketentuan
Total Bobot		100%

a. Capaian Indikator

Capaian kinerja BKK Kelas I Samarinda untuk indikator nilai kinerja anggaran pada Semester I adalah sebesar 74,36 (Cukup). Nilai tersebut diakses pada laman web pada tanggal 10 Juli 2026.



Gambar.1 Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa nilai kinerja anggaran untuk BKK Kelas I Samarinda telah dapat diakses dengan lengkap pada website. Jika mengambil grafik di atas yang diakses pada Bulan Juni saat Capaian Output telah diinput pada Aplikasi SAKTI maka Nilai NKA adalah 74,36.

Untuk Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran perolehan nilai nya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.5 Perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026

ASPEK	INDIKATOR	NILAI		TOTAL
		CAPAIA	BOBOT	
1	2	3	4	5=(3x4)
Efektivitas	Capaian RVRO	54,35	75	40,76
	Penggunaan SBK	92,31	10	9,23
Efisiensi	Efisiensi SBK		0	0
Total				49,99

Setelah menghitung nilai perkalian antara capaian indikator dengan bobot yang ditetapkan, maka untuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah total penjumlahan nilai tersebut yaitu sebesar 49,99.

Kemudian untuk Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran perolehan nilainya adalah sebagai berikut:

No	Aspek	INDIKATOR	Nilai	Bobot	Nilai Akhir
1	2	3	4	5	6=(4x5)
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	10%	10
2		Deviasi Halaman III DIPA	100	15%	15
3	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan anggaran	94,23	20%	18,85
4		Belanja Kontraktual	100	10%	10
5		Penyelesaian tagihan	100	10%	10
6		Dispensasi SPM (Pengurang)	99,36	10%	9,94
7	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian output	99,74	25%	24,94
8		Dispensasi SPM	0	-	0
		Nilai Total	98,72	100%	98,72

Tabel 3.6 Perhitungan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026

Nilai kinerja anggaran dihitung dari Nilai Aspek Efektivitas (Capaian RO), Penggunaan SBK dan Nilai Efisiensi SBK. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BKK Kelas I Samarinda mendapatkan nilai total 49,99. Kemudian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memperoleh nilai 98,72 sehingga NKA dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 NKA &= 50\% \times NKPA + 50\% \times IKPA \\
 &= (50\% \times 49,99) + (50\% \times 98,72) \\
 &= 25,00 + 49,36 \\
 &= \mathbf{74,36}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka Nilai Indikator Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2026 adalah sebesar 74,36.

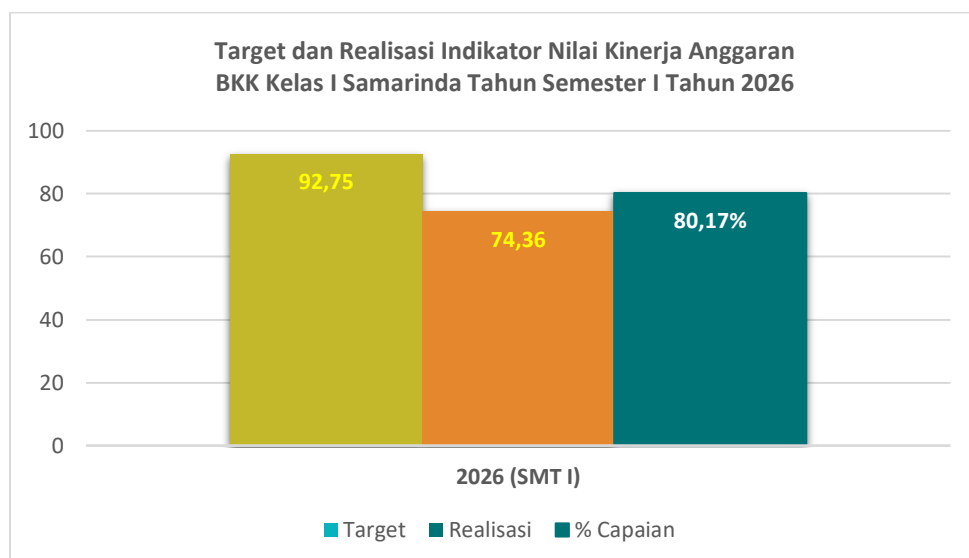
e. Capaian Indikator

1) Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Semester I 2026

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda Tahun 2026, target Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada akhir tahun ditetapkan sebesar 92,75. Mengingat Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang dihitung secara kumulatif selama satu tahun anggaran, maka

target Semester I ditetapkan sebesar 46,00 atau sekitar 50 persen dari target tahunan.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan sampai dengan bulan Juni Tahun 2026, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 74,36. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target Semester I mencapai 161,65%, sehingga target Semester I telah terlampaui. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran selama Semester I berada pada kondisi yang baik dan memberikan modal yang positif untuk mencapai target tahunan sebesar 92,75. Realisasi Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



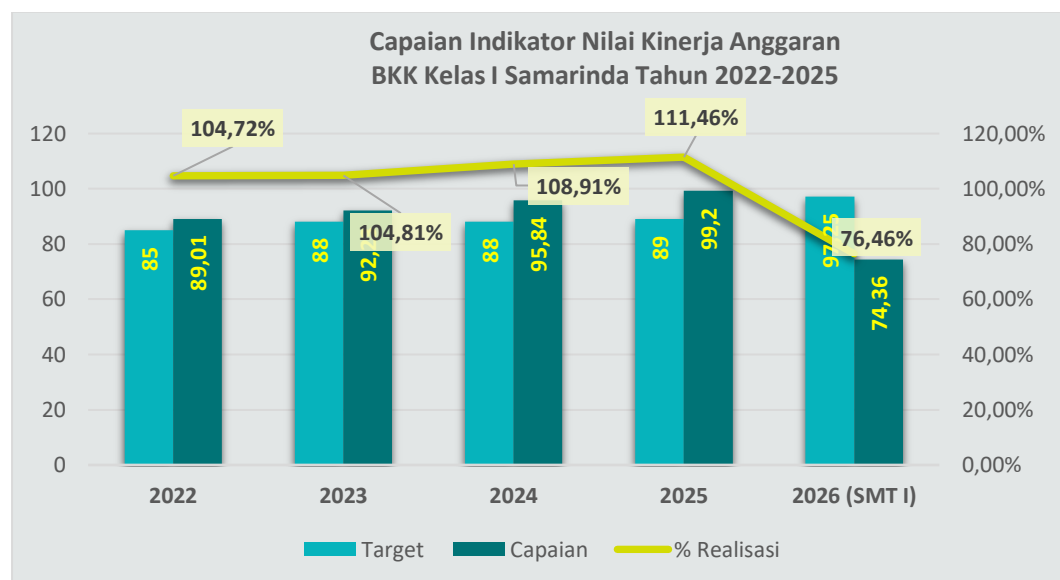
Grafik 3.14 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026

Capaian Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2026 yang telah melampaui target menunjukkan bahwa proses pengelolaan anggaran di Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda telah dilaksanakan secara efektif selama enam bulan pertama Tahun Anggaran 2026. Tingginya capaian tersebut terutama dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan anggaran yang memperoleh nilai sangat baik, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Nilai Kinerja Anggaran secara keseluruhan. Di sisi lain, komponen kinerja perencanaan anggaran masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, khususnya setelah nilai Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) tercapai. Untuk nilai Efisiensi SBK sendiri biasanya akan dapat diukur

menjelang akhir tahun saat semua Realisasi Volume Rincian Output diinput ke dalam aplikasi sakti dan sudah tercapai.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Evaluasi Nilai Kinerja Anggaran tidak hanya dilakukan dengan membandingkan capaian terhadap target tahun berjalan, tetapi juga dengan melihat perkembangan kinerja pada beberapa tahun sebelumnya. Analisis tren ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi kualitas pengelolaan anggaran serta efektivitas upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda. Perkembangan target, realisasi, dan persentase capaian Nilai Kinerja Anggaran selama periode Tahun 2022 sampai dengan Semester I Tahun 2026 disajikan pada Grafik 3.2.

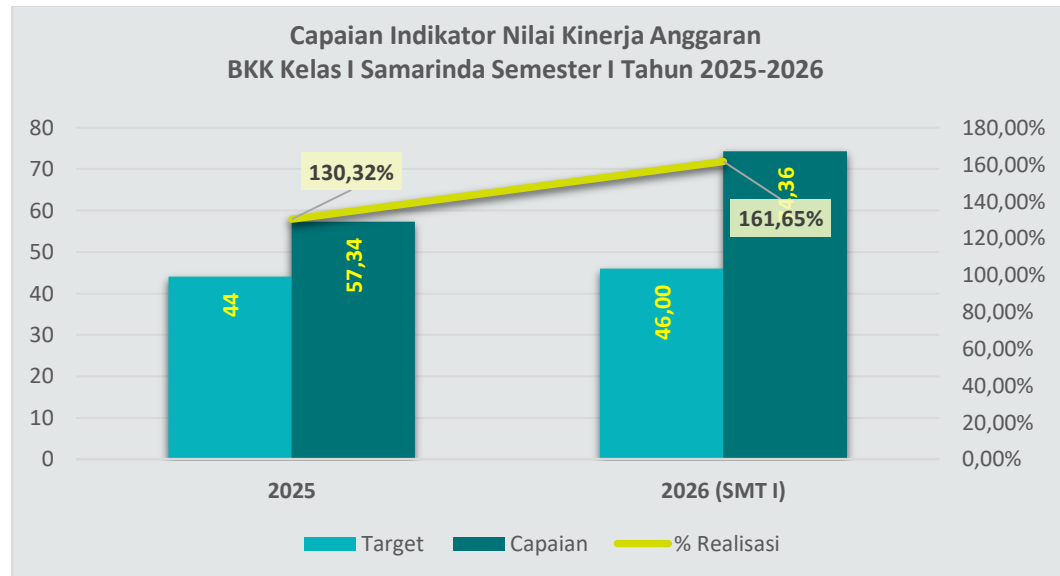


Grafik 3.2 Perkembangan Capaian Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Samarinda Tahun 2022–Semester I Tahun 2026

Berdasarkan Grafik 3.2, capaian Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Samarinda menunjukkan tren yang relatif meningkat selama periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025. Pada Tahun 2022, realisasi Nilai Kinerja Anggaran mencapai 89,01 atau 104,72% dari target sebesar 85,00. Capaian tersebut meningkat pada Tahun 2023 menjadi 92,23 atau 104,81% dari target 88,00, kemudian kembali meningkat pada Tahun 2024 menjadi 95,84 atau 108,91% dari target 88,00. Pencapaian tertinggi diperoleh pada Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 99,20 atau 111,46% dari target 89,00.

Sementara itu, sampai dengan Semester I Tahun 2026, Nilai Kinerja Anggaran telah mencapai 74,36 atau 76,46% terhadap target tahunan sebesar 97,25. Persentase tersebut tampak lebih rendah apabila dibandingkan dengan

capaian pada tahun-tahun sebelumnya karena realisasi Tahun 2026 masih merupakan capaian kumulatif Semester I dan belum mencerminkan hasil pengelolaan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran.



Apabila dibandingkan dengan capaian Semester I Tahun 2025, Nilai Kinerja Anggaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari 57,34 menjadi 74,36 atau meningkat sebesar 17,02 poin. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan anggaran pada Semester I Tahun 2026 lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut didukung oleh tingginya Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 98,72, serta semakin baiknya kualitas pengendalian pelaksanaan anggaran, penyelesaian tagihan, pengelolaan belanja kontraktual, dan capaian output.

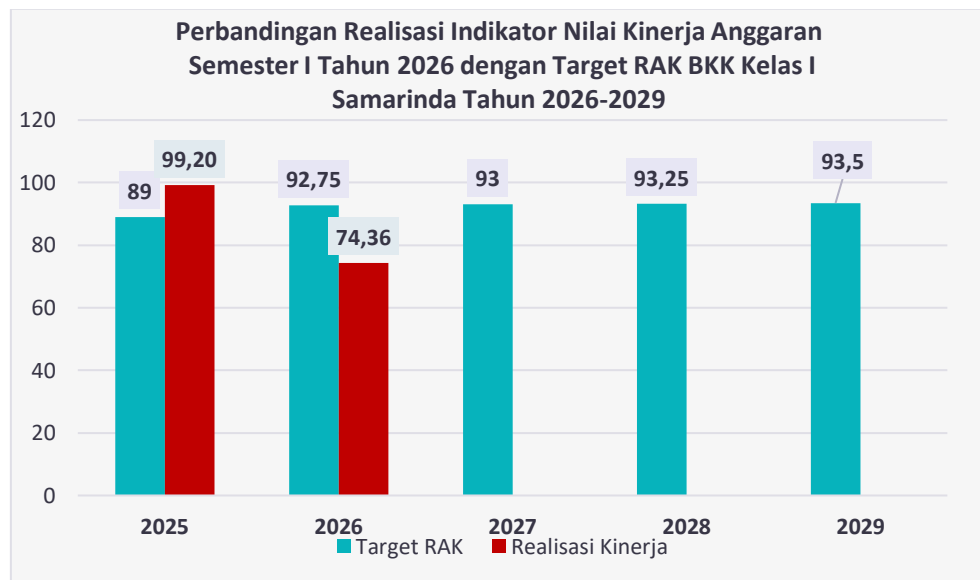
Secara umum, tren capaian Nilai Kinerja Anggaran selama lima tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran di lingkungan BKK Kelas I Samarinda. Meskipun capaian Semester I Tahun 2026 belum dapat dibandingkan secara langsung dengan realisasi akhir tahun sebelumnya, hasil yang diperoleh sampai dengan bulan Juni memberikan indikasi bahwa target tahunan Tahun 2026 masih berada dalam jalur yang realistis untuk dicapai apabila kinerja pengelolaan anggaran dapat dipertahankan pada Semester II.

Kenaikan Nilai Kinerja Anggaran pada Semester I Tahun 2026 dipengaruhi oleh adanya percepatan pelaksanaan belanja barang dan jasa, terutama belanja modal. Beberapa kegiatan juga dilaksanakan secara bersamaan untuk mengefisienkan kegiatan akibat blokir A. Hasilnya adalah

tingginya capaian indikator Capaian Output yang meningkatkan capaian NKA secara keseluruhan.

3) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025–2029 menetapkan target Nilai Kinerja Anggaran sebagai salah satu indikator yang menggambarkan peningkatan kualitas pengelolaan anggaran secara berkelanjutan. Target tersebut disusun secara bertahap (incremental) dengan mempertimbangkan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran dari tahun ke tahun. Capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran jika dibandingkan dengan RAK BKK Kelas I Samarinda dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 3.16 Realisasi Indikator Nilai Kinerja Anggaran dibandingkan dengan Target RAK BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026-2029

Berdasarkan Tabel 3.16, target Nilai Kinerja Anggaran mengalami peningkatan secara bertahap dari 89,00 pada Tahun 2025 menjadi 93,50 pada Tahun 2029. Peningkatan target tersebut mencerminkan komitmen organisasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola anggaran melalui perbaikan aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pencapaian output yang semakin efektif dan efisien.

Pada Tahun 2025, BKK Kelas I Samarinda berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RAK dengan realisasi sebesar 99,20 atau 111,46% dari target 89,00. Capaian tersebut menjadi modal yang positif dalam mendukung pencapaian target Tahun 2026 yang ditingkatkan menjadi 92,75.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, Nilai Kinerja Anggaran telah mencapai 74,36. Mengingat indikator ini dihitung secara kumulatif selama satu

tahun anggaran, realisasi Semester I belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target akhir tahun sebesar 92,75. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target Semester I sebesar 46,00, realisasi tersebut telah mencapai 161,65%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran berada di atas target yang direncanakan untuk Semester I.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda berada pada jalur yang mendukung pencapaian target jangka menengah Tahun 2025–2029. Dengan mempertahankan kualitas pelaksanaan anggaran, meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, serta mengoptimalkan komponen Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) yang masih dalam proses penyempurnaan, target Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2026 sebesar 92,75 diyakini dapat dicapai pada akhir tahun anggaran.

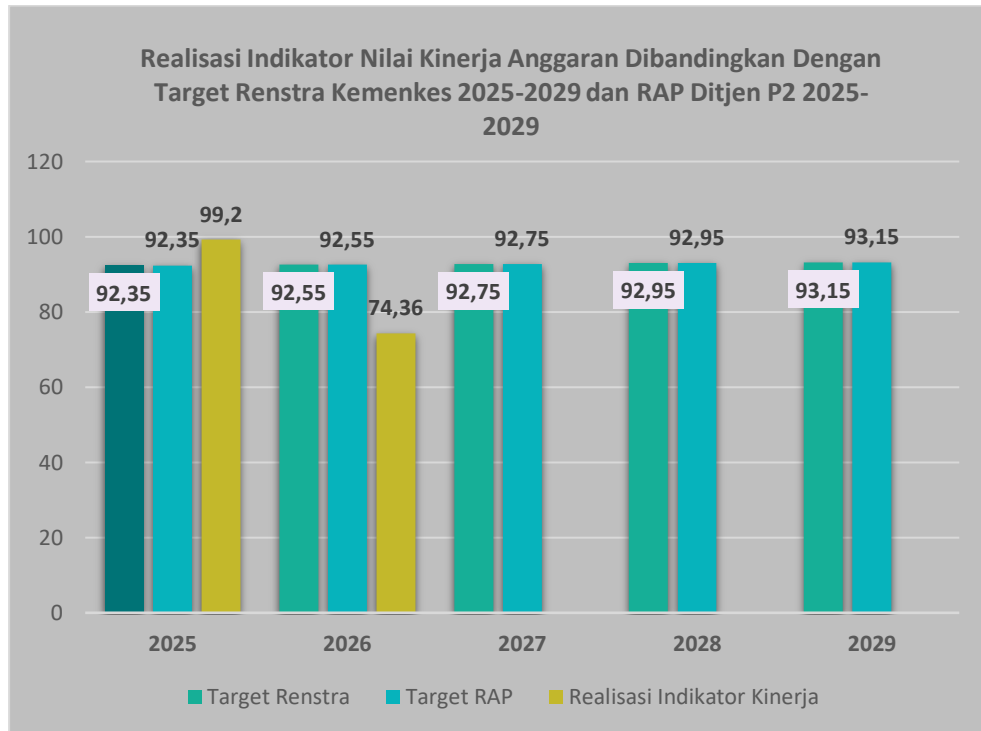
Secara keseluruhan, target RAK Tahun 2025–2029 menunjukkan kecenderungan peningkatan yang relatif moderat, yaitu dari 89,00 pada Tahun 2025 menjadi 93,50 pada Tahun 2029 atau meningkat sebesar 4,50 poin selama lima tahun. Pola peningkatan ini menunjukkan bahwa strategi organisasi tidak hanya berorientasi pada pencapaian target tahunan, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengelolaan anggaran secara berkelanjutan sesuai prinsip akuntabilitas kinerja.

Kenaikan target Nilai Kinerja Anggaran dari 89,00 pada Tahun 2025 menjadi 92,75 pada Tahun 2026 mencerminkan adanya ekspektasi peningkatan kualitas pengelolaan anggaran seiring dengan keberhasilan pencapaian target pada tahun sebelumnya. Dengan realisasi Tahun 2025 yang mencapai 99,20 atau melampaui target RAK, BKK Kelas I Samarinda memiliki fondasi yang kuat untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pada Tahun 2026.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Balai Kekarantina Kesehatan Kelas I Samarinda berkontribusi terhadap pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 dan Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, capaian Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Samarinda perlu dibandingkan dengan target nasional sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan anggaran.

Perbandingan antara capaian Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2026 dengan target Tahun 2026 pada Renstra Kementerian Kesehatan dan RAP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.17 Realisasi Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Samarinda dibandingkan dengan Renstra Kemenkes Semester I Tahun 2026-2029 dan RAP Ditjen P2 2025-2029

Berdasarkan Tabel 3.17, target Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan maupun RAP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit adalah sebesar 92,55. Sementara itu, sampai dengan Semester I Tahun 2026 BKK Kelas I Samarinda telah memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 74,36.

Secara nominal, capaian Semester I tersebut masih berada di bawah target nasional Tahun 2026. Namun demikian, perlu dipahami bahwa Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang dihitung secara kumulatif selama satu tahun anggaran, sehingga nilai Semester I belum mencerminkan capaian akhir tahun dan belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahunan pada Renstra maupun RAP.

Apabila mempertimbangkan karakteristik indikator yang bersifat kumulatif, capaian Semester I sebesar 74,36 menunjukkan perkembangan yang positif menuju target nasional Tahun 2026. Nilai tersebut telah melampaui target Semester I yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BKK Kelas I

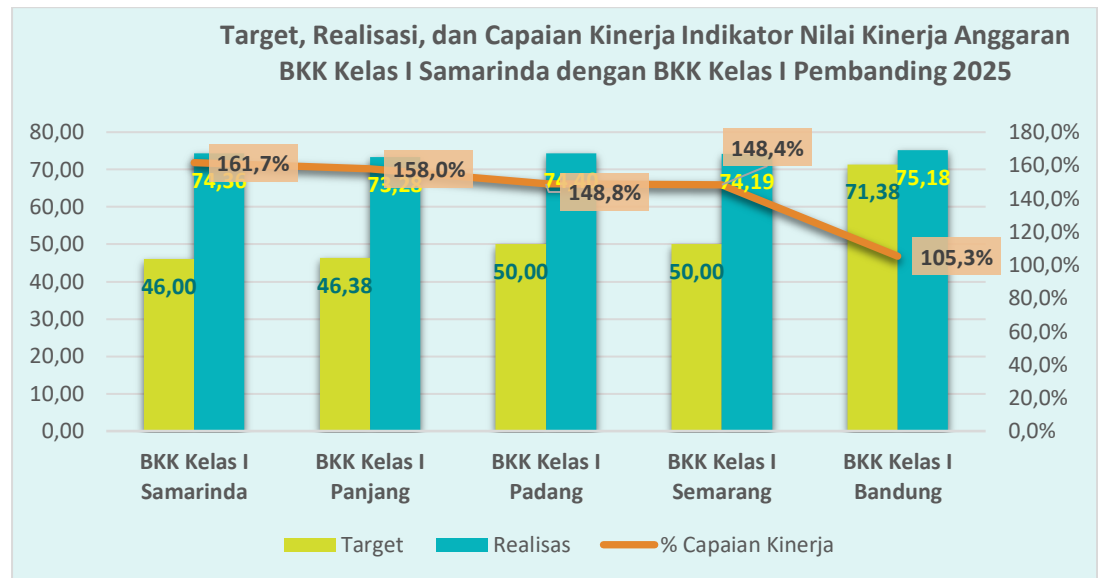
Samarinda sebesar 46,00, dengan tingkat capaian sebesar 161,65%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran selama Semester I berada pada jalur yang mendukung pencapaian target akhir tahun sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kementerian Kesehatan dan RAP Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit.

Selain itu, apabila dibandingkan dengan capaian akhir Tahun 2025 yang mencapai 99,20, terdapat keyakinan bahwa target nasional Tahun 2026 sebesar 92,55 masih realistis untuk dicapai pada akhir tahun, sepanjang kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat dipertahankan secara konsisten selama Semester II. Dengan demikian, capaian Semester I Tahun 2026 memberikan indikasi bahwa BKK Kelas I Samarinda memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian target Nilai Kinerja Anggaran pada tingkat Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit maupun Kementerian Kesehatan

5) Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda dibandingkan dengan beberapa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I yang memiliki karakteristik organisasi dan ruang lingkup tugas yang relatif sejenis, yaitu BKK Kelas I Bandung, BKK Kelas I Padang, BKK Kelas I Panjang, dan BKK Kelas I Semarang. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui posisi capaian kinerja BKK Kelas I Samarinda sekaligus mengidentifikasi peluang perbaikan melalui penerapan praktik-praktik baik (*best practices*) dari satuan kerja lain.

Perbandingan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Grafik 3.18 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran dengan BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding Semester I Tahun 2026

Berdasarkan Tabel 3.5, BKK Kelas I Samarinda memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 74,36 dengan persentase capaian 161,65%, yang merupakan persentase capaian tertinggi dibandingkan empat BKK Kelas I pembanding. Walaupun realisasi absolut Samarinda relatif berdekatan dengan Bandung (75,18), Padang (74,40), dan Semarang (74,19), capaian terhadap target menunjukkan kinerja yang lebih optimal karena target Semester I yang ditetapkan untuk BKK Kelas I Samarinda lebih rendah (46,00) sebagai bagian dari target kumulatif tahunan.

Secara umum, hasil perbandingan menunjukkan bahwa seluruh BKK pembanding telah mencapai target Semester I dengan persentase capaian di atas 100%, yang mengindikasikan kualitas pengelolaan anggaran pada masing-masing satuan kerja berada pada kategori baik. Meskipun demikian, variasi capaian antar satuan kerja menunjukkan adanya perbedaan dalam kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk efektivitas pencapaian Rincian Output (RO), pengelolaan revisi anggaran, penyerapan anggaran, serta komponen lain yang membentuk Nilai Kinerja Anggaran.

Bagi BKK Kelas I Samarinda, hasil perbandingan ini menjadi indikator bahwa strategi pengendalian anggaran yang telah diterapkan selama Semester I Tahun 2026 telah berjalan secara efektif. Namun demikian, upaya peningkatan kualitas perencanaan anggaran, khususnya penyempurnaan komponen Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK), tetap perlu dilanjutkan agar capaian Nilai Kinerja Anggaran dapat terus meningkat hingga akhir Tahun 2026 dan tetap berada pada posisi yang kompetitif dibandingkan BKK Kelas I lainnya

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator

Dalam rangka mencapai target Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2026, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Upaya tersebut diarahkan untuk memastikan bahwa proses pengelolaan anggaran berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendukung pencapaian sasaran organisasi.

Dalam mencapai target dari indikator kegiatan ini pada Semester I Tahun 2026, perlu adanya beberapa kebijakan / strategi yang mendukung diantaranya:

- 1) Tersedianya anggaran pada RO 4815.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp250.021.000,-.
 - 2) Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana yang selaras dengan target output serta pelaksanaan revidi terhadap dokumen perencanaan sebelum pelaksanaan kegiatan.
 - 3) Pelaksanaan monitoring realisasi anggaran, Nilai Kinerja Anggaran, IKPA, dan capaian output setiap bulan melalui Dashboard Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan, aplikasi SAKTI, dan OMSPAN.
 - 4) Pelaksanaan revisi DIPA secara tepat waktu sesuai kebutuhan organisasi dan kebijakan pemerintah guna menjaga kesesuaian antara alokasi anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
 - 5) Monitoring perkembangan realisasi anggaran serta percepatan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja yang realisasinya belum sesuai dengan rencana penarikan dana.
 - 6) Pelaksanaan validasi dan monitoring capaian Rincian Output (RO) setiap bulan sebagai dasar pengukuran efektivitas pelaksanaan anggaran.
 - 7) Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi bersama Subbagian Administrasi Umum, PPK, Bendahara Pengeluaran, pengelola keuangan, serta penanggung jawab kegiatan dalam rangka penyelesaian permasalahan pelaksanaan anggaran.
 - 8) Pemanfaatan aplikasi SAKTI, OMSPAN, Dashboard Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan, serta aplikasi pendukung lainnya untuk meningkatkan akurasi dan ketepatan monitoring kinerja anggaran.
- g. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternative Solusi yang telah dilakukan

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 74,36, melampaui

target Semester I sebesar 46,00 dengan tingkat capaian 161,65%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Semester I telah berjalan dengan baik dan berada pada jalur yang mendukung pencapaian target tahunan. Keberhasilan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Tingginya Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yaitu sebesar 98,72, yang berada pada kategori sangat baik. Nilai tersebut diperoleh karena sebagian besar komponen penilaian IKPA telah mencapai nilai maksimal, antara lain Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Belanja Kontraktual, dan Penyelesaian Tagihan, sedangkan komponen Pengelolaan UP/TUP dan Capaian Output juga memperoleh nilai yang sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan secara tertib, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Penguatan Monitoring dan Pengendalian Anggaran secara berkala melalui pemanfaatan aplikasi SAKTI, OMSPAN, dan sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan.
- 3) Koordinasi yang Baik antara Unit Perencanaan dan Pengelola Keuangan. Koordinasi tersebut mendukung ketepatan pelaksanaan revisi anggaran, penyusunan rencana penarikan dana, penyelesaian administrasi keuangan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan sesuai rencana.
- 4) Peningkatan Kualitas Capaian Output. Nilai capaian output yang cukup tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah menghasilkan output sesuai target yang ditetapkan.

Upaya-upaya tersebut juga menunjukkan komitmen BKK Kelas I Samarinda dalam menerapkan prinsip pengelolaan anggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) melalui penguatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja. Dengan mempertahankan konsistensi pelaksanaan upaya tersebut pada Semester II Tahun 2026, diharapkan target Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2026 sebesar 92,75 dapat tercapai dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit maupun Kementerian Kesehatan

h. Kendala/Masalah

Meskipun Nilai Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2026 telah melampaui target yang ditetapkan, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian sebagai upaya peningkatan kualitas pengelolaan anggaran pada Semester II Tahun 2026. Permasalahan tersebut terutama berkaitan dengan aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pencapaian output yang menjadi komponen pembentuk Nilai Kinerja Anggaran. Kendala tersebut antara lain sebagai berikut.

- 1) Belum optimalnya penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) pada seluruh Rincian Output (RO). Sampai dengan Semester I Tahun 2026 masih terdapat RO QAH.U15 – Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit TB yang belum diperhitungkan dalam komponen penggunaan SBK karena pelaksanaan pengadaan media KIE telah dilakukan pada awal tahun sehingga nilai SBK masih melewati batas standar dan tidak diperhitungkan.
- 2) Berdasarkan hasil pengukuran IKPA Semester I Tahun 2026, komponen Penyerapan Anggaran memperoleh nilai 94,23, atau merupakan satu-satunya komponen utama yang belum mencapai nilai maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kesesuaian antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana sehingga distribusi penyerapan anggaran dapat berlangsung lebih proporsional sepanjang tahun
- 3) Deviasi Halaman III DIPA Perlu Terus Dikendalikan karena sudah mendekati batas 5%. Walaupun indikator Deviasi Halaman III DIPA masih memperoleh nilai maksimal, pengendalian terhadap kesesuaian antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran tetap perlu dilakukan secara konsisten. Hal ini penting untuk menjaga kualitas pelaksanaan anggaran, terutama pada belanja barang dan belanja modal yang memiliki potensi menimbulkan deviasi apabila pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan.
- 4) Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan sebagai Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran. Penyesuaian tersebut memerlukan koordinasi yang intensif agar target output tetap tercapai tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 5) Peningkatan Kualitas Perencanaan Berbasis Kinerja. Meskipun kualitas pelaksanaan anggaran telah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan Nilai IKPA sebesar 98,72, kualitas perencanaan anggaran masih perlu terus ditingkatkan, terutama melalui penyempurnaan penggunaan SBK, peningkatan

akurasi penyusunan target output, serta penguatan keterkaitan antara perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran

i. Upaya Pemecahan masalah

Sebagai tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang diidentifikasi pada Semester I Tahun 2026, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda menetapkan berbagai langkah perbaikan yang difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan anggaran, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta penguatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran pada Semester II sekaligus mendukung pencapaian target Tahun 2026.

- 1) Optimalisasi Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK). Untuk mengatasi belum optimalnya penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), akan dilakukan evaluasi terhadap seluruh Rincian Output (RO) yang menjadi objek pengukuran Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran. Koordinasi dengan unit teknis, pengelola anggaran, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan terus dilakukan guna memastikan seluruh RO yang memenuhi kriteria telah menggunakan SBK sesuai ketentuan.
- 2) meningkatkan nilai komponen Penyerapan Anggaran, dengan melakukan penguatan monitoring terhadap realisasi anggaran dan rencana penarikan dana setiap bulan.
- 3) Penguatan Pengendalian Deviasi Halaman III DIPA. Sebagai langkah antisipasi agar deviasi tidak melebihi batas toleransi, dilakukan monitoring berkala terhadap kesesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi anggaran pada setiap jenis belanja.
- 4) Penguatan Koordinasi dalam Pelaksanaan Efisiensi dan Revisi Anggaran. Dalam menghadapi dinamika pelaksanaan anggaran, koordinasi antara unit perencanaan, pengelola keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, dan penanggung jawab kegiatan akan terus ditingkatkan.
- 5) Penguatan penyusunan perencanaan berbasis kinerja melalui peningkatan kualitas penyusunan target output, penyelarasan antara perencanaan kegiatan dengan alokasi anggaran, serta peningkatan akurasi data pendukung pengukuran kinerja. Selain itu, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengendalian kinerja anggaran.

j. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan adalah efisiensi anggaran yang mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Realisasi indikator kinerja Nilai kinerja anggaran sebesar 74,36 dari target 46 (semester I), dengan capaian 161,7% dengan belum adanya realisasi anggaran dari pagu anggaran Rp93.613.000,- (pagu efektif). Berdasarkan perhitungan didapatkan efisiensi sebesar 1,0000 dengan nilai Efisiensi 300%. Indikator dikatakan efisien karena dalam mencapai kinerja 161,7% dengan belum menggunakan anggaran sehingga capaian indikator terkategori efisien. Hal ini disebabkan capaian yang cukup besar atau lebih dari 50% untuk Semester I dengan menggunakan anggaran yang kurang dari 100%. Jika dilihat dari nilai efisiensi yang sangat besar hal ini dapat dipahami karena adanya efisiensi anggaran tahun 2026

k. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) pada Semester I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap capaian indikator tersebut antara lain:

1. Tersedianya anggaran pada RO 4815.EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp96.613.000,-
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), DIPA, serta dokumen pendukung lainnya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
3. Monitoring realisasi anggaran secara berkala melalui aplikasi SAKTI, OMSPAN, dan Dashboard IKPA. Evaluasi dilakukan terhadap tingkat penyerapan anggaran, deviasi rencana penarikan dana, capaian output, serta indikator pelaksanaan anggaran sebagai dasar pengambilan keputusan.
4. Pelaksanaan revisi anggaran dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, mengakomodasi kebijakan pemerintah mengenai efisiensi belanja, serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran agar tetap mendukung pencapaian sasaran organisasi.
5. Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan realisasi anggaran pada setiap jenis belanja.

6. Monitoring terhadap kesesuaian antara RPD dan realisasi anggaran dilakukan secara berkala untuk mengurangi deviasi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan.
7. Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi internal secara berkala antara unit perencanaan, pejabat pembuat komitmen, bendahara, serta penanggung jawab kegiatan dalam rangka mengidentifikasi hambatan pelaksanaan anggaran dan menyusun langkah percepatan penyelesaiannya.
8. Penguatan pengendalian terhadap capaian output, kualitas perencanaan anggaran, serta indikator pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari upaya meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran secara berkelanjutan

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti

a. Dasar Hukum

Pelaksanaan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
6. Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda Tahun 2026, yang menetapkan indikator IKM 33.4.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan target Semester I Tahun 2026 sebesar 95%.

b. Pengertian

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indikator ini mencerminkan komitmen organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu, lengkap, dan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan, pengendalian intern, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pencapaian indikator ini menunjukkan efektivitas koordinasi antara unit kerja, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan pihak terkait dalam memastikan bahwa setiap rekomendasi hasil pemeriksaan telah diselesaikan dan memperoleh status tuntas berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut.

c. Definisi Operasional

Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Unit Eselon I dan telah dimonitor APIP capaian tindak lanjutnya serta telah dinyatakan lengkap.

d. Rumus / Cara Perhitungan

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas dan dinyatakan lengkap oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang menjadi kewajiban tindak lanjut pada Unit Eselon I. Rumus perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan lengkap}}{\text{Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK}} \times 100\%$$

e. Capaian Indikator

Pada Semester I Tahun 2026, BKK Kelas I Samarinda tidak memiliki rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang masih menjadi kewajiban tindak lanjut, karena seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya telah diselesaikan. Oleh karena itu, capaian indikator diperoleh berdasarkan hasil monitoring Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang menunjukkan tidak terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang berstatus belum ditindaklanjuti atau belum sesuai.

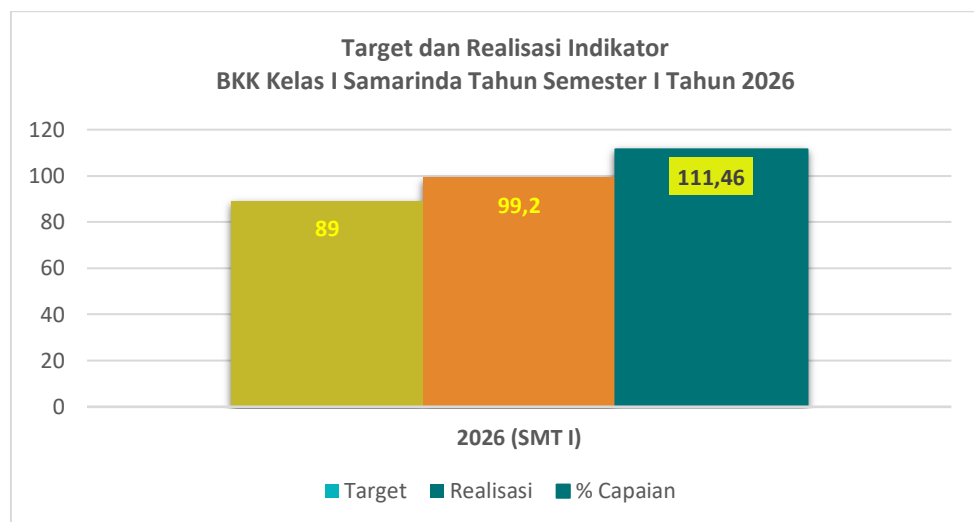
Pada tahun 2026 Sampai dengan Semester I, terdapat Audit Kepatuhan Transformasi Kekarantinaan Kesehatan Tahun 2025 yang dilaksanakan pada Bulan Februari Tahun 2026. Laporan Hasil Audit tersebut telah ditindaklanjuti, merujuk pada Surat Tugas Inspektur III Kementerian Kesehatan RI Nomor : PS.07.01/G.IV/392/2026 tanggal 08 April 2026 perihal melakukan melakukan monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal dan BPK RI di Lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Triwulan II Tahun 2026, yang dilaksanakan pada tanggal 13 April - 12 Juni 2026.

Berdasarkan Berita Acara Monitoring Dan Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kemenkes, temuan audit dengan nomor LHP PS.01.01/G.IV/268/R/ 2026 2026-03-06, sebanyak 6 temuan telah selesai ditindaklanjuti. (Berita acara terlampir)

Sehingga realisasi indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK maupun hasil audit oleh Itjen yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti Adalah 100%.

1) Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026

Pada Semester I Tahun 2026, target indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BKK Kelas I Samarinda adalah sebesar 95%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 100%, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 105,26%. Target indikator ini telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai bagian dari Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.



Grafik 3.14 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai wujud penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa target kinerja telah tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh tidak adanya rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang masih menjadi kewajiban tindak lanjut

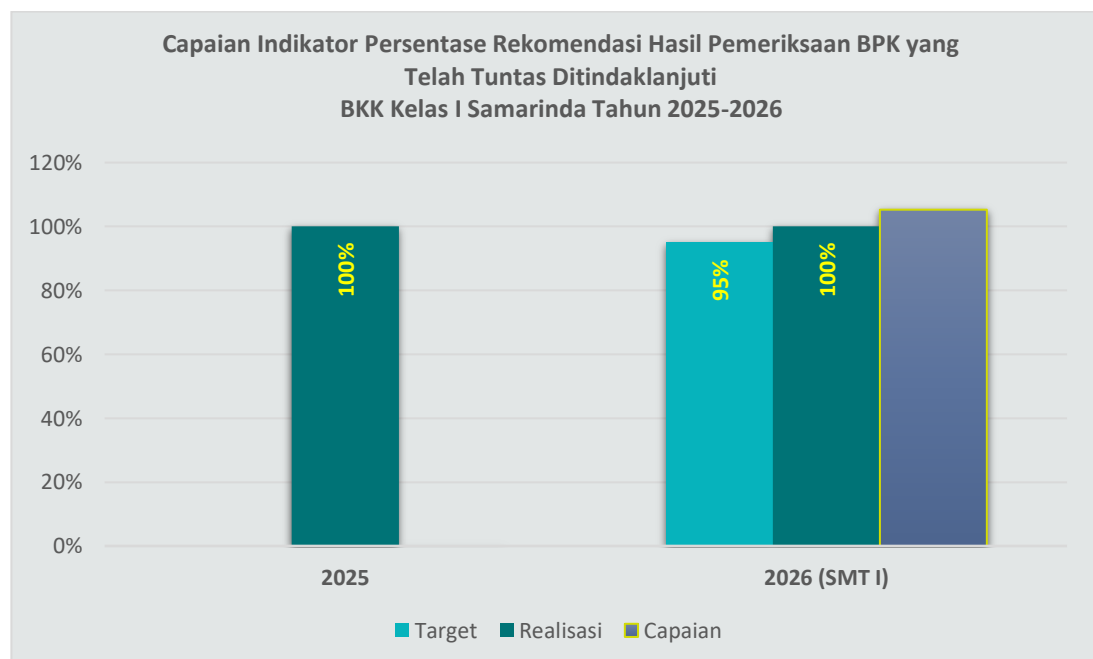
pada BKK Kelas I Samarinda, karena seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan pada periode sebelumnya telah diselesaikan secara tuntas

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara, serta mekanisme monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan telah berjalan secara efektif. Dengan demikian, capaian indikator ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan memenuhi target kinerja, tetapi juga menggambarkan komitmen BKK Kelas I Samarinda dalam mempertahankan akuntabilitas dan tata kelola organisasi yang baik.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dilakukan untuk mengetahui konsistensi BKK Kelas I Samarinda dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan hasil pemantauan, realisasi indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti pada Semester I Tahun 2026 sebesar 100%, sama dengan capaian pada Tahun 2025. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana disajikan pada Grafik.



Grafik 3.20 Capaian Kinerja Nilai Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti BKK Kelas I Samarinda Tahun 2021-2025

Konsistensi capaian tersebut menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda mampu mempertahankan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil

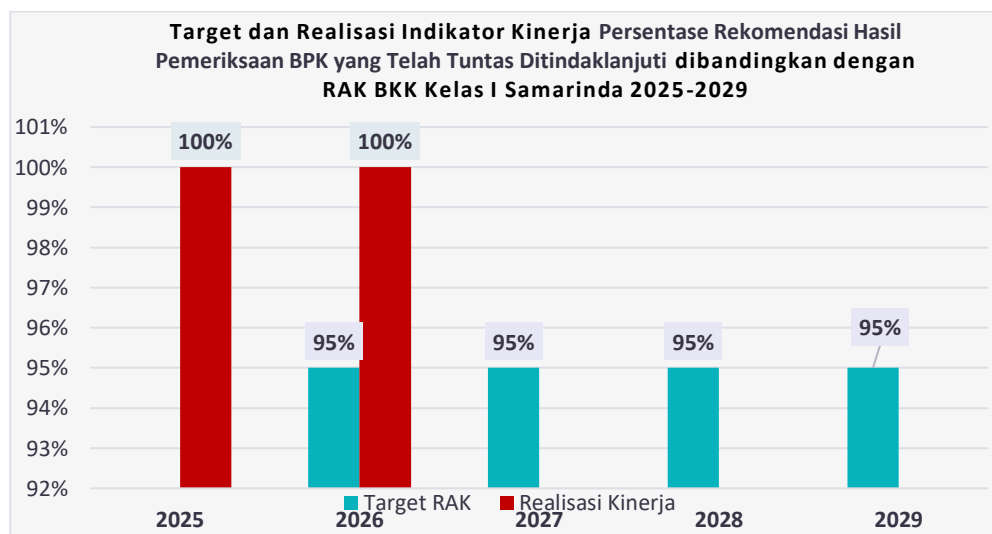
pemeriksaan BPK secara berkelanjutan. Keberhasilan tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan, tetapi juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern, pengawasan, dan monitoring tindak lanjut telah berjalan secara efektif sehingga tidak terdapat rekomendasi yang masih berstatus belum ditindaklanjuti.

Dengan tetap dipertahankannya capaian sebesar 100%, BKK Kelas I Samarinda menunjukkan komitmen yang berkesinambungan dalam menjaga kualitas tata kelola organisasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Capaian ini menjadi indikator bahwa upaya perbaikan yang telah dilakukan pada periode-periode sebelumnya mampu dipertahankan secara konsisten hingga Semester I Tahun 2026.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Rencana Aksi Kinerja (RAK) merupakan instrumen pengendalian kinerja yang digunakan untuk memastikan pencapaian target indikator sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pada Tahun 2026, target RAK untuk indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti ditetapkan sebesar 95%.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, BKK Kelas I Samarinda berhasil merealisasikan indikator tersebut sebesar 100%, sehingga capaian terhadap target RAK mencapai 105,26%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah melampaui target yang direncanakan, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.21 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dibandingkan dengan RAK BKK Kelas I Samarinda

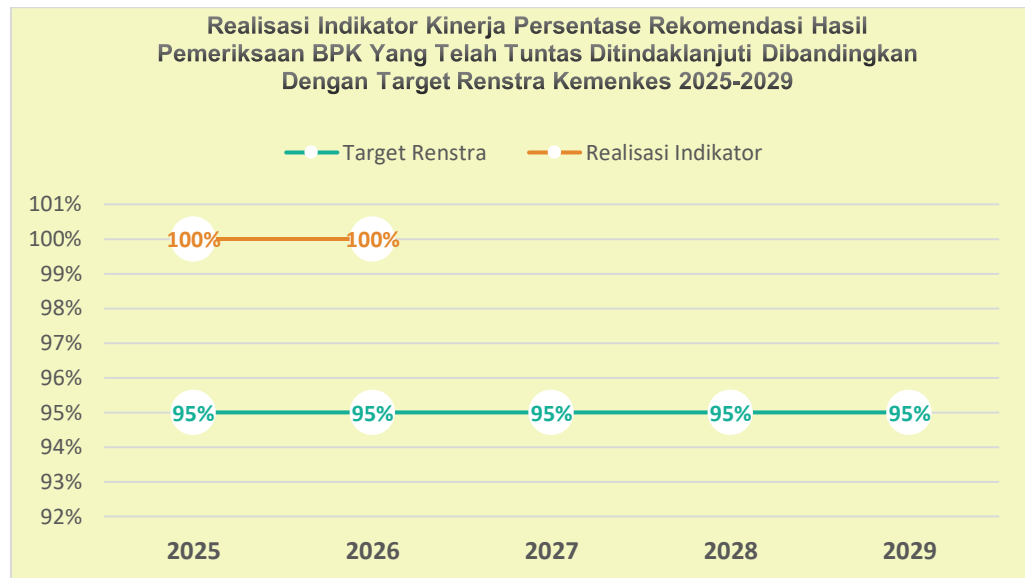
Keberhasilan melampaui target RAK menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian intern dan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan telah berjalan secara efektif. Meskipun pada Semester I Tahun 2026 tidak terdapat rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang menjadi kewajiban tindak lanjut, BKK Kelas I Samarinda tetap melaksanakan pemantauan secara berkala terhadap hasil pemeriksaan serta menjaga kesiapan dokumen dan bukti dukung sebagai bagian dari upaya mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Dengan tercapainya realisasi sebesar 100%, target yang ditetapkan dalam RAK tidak hanya terpenuhi, tetapi juga terlampaui. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengendalian yang diterapkan telah mampu menjaga konsistensi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

4) Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Target nasional indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025–2029 dan dijabarkan dalam Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Tahun 2025–2029 adalah sebesar 95%. Target tersebut menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja dalam memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditindaklanjuti secara tuntas sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, BKK Kelas I Samarinda berhasil mencapai realisasi sebesar 100%, atau 105,26% terhadap target nasional yang ditetapkan. Dengan demikian, realisasi kinerja BKK Kelas I Samarinda telah melampaui target nasional sebesar 5 poin persentase, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini.

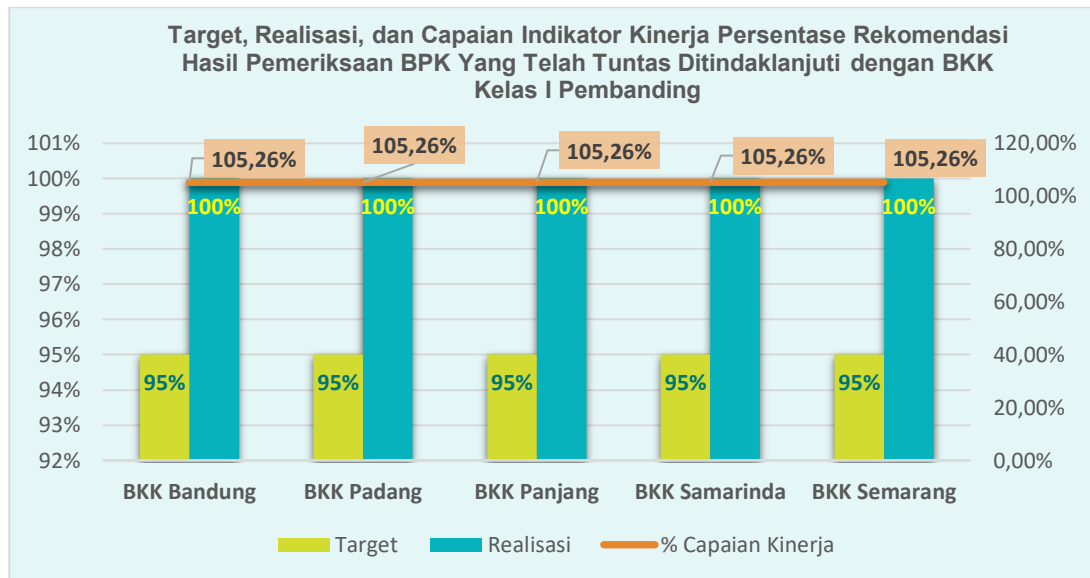


Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di BKK Kelas I Samarinda telah memenuhi bahkan melampaui standar kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Keberhasilan ini didukung oleh penerapan sistem pengendalian intern yang efektif, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkelanjutan, serta komitmen organisasi dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan negara. Capaian ini juga dapat menjadi gambaran bahwa BKK Samarinda mampu mempertahankan kinerja hingga akhir tahun dan seterusnya diharapkan dapat memenuhi target Renstra pada akhir tahun 2029.

5) Perbandingan Target dan Realisasi dengan BKK Lain

Perbandingan capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dengan satuan kerja sejenis dilakukan untuk mengetahui posisi kinerja BKK Kelas I Samarinda dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan hasil perbandingan dengan beberapa Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I, yaitu BKK Kelas I Bandung, BKK Kelas I Padang, BKK Kelas I Panjang, dan BKK Kelas I Semarang, diketahui bahwa seluruh satuan kerja memperoleh target sebesar 95%, realisasi 100%, dan capaian kinerja 105,26%. Dengan demikian, BKK Kelas I Samarinda memiliki capaian yang setara dengan satuan kerja sejenis, sebagaimana disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.23 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding Semester I Tahun 2026

Kesetaraan capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. BKK Kelas I Samarinda berhasil mempertahankan capaian tersebut melalui penerapan sistem pengendalian intern yang efektif, monitoring terhadap hasil pemeriksaan secara berkelanjutan, serta komitmen dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Meskipun tidak terdapat perbedaan capaian antar satuan kerja pembanding, hasil ini menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda mampu mempertahankan kinerja yang sejalan dengan praktik terbaik di lingkungan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I. Konsistensi tersebut menjadi modal penting dalam menjaga kualitas tata kelola organisasi serta mempertahankan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

f. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti, BKK Kelas I Samarinda melaksanakan berbagai upaya yang berorientasi pada penguatan tata kelola organisasi, peningkatan efektivitas pengendalian intern, serta penguatan budaya akuntabilitas di lingkungan satuan kerja. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, tetapi juga diarahkan untuk mencegah terulangnya temuan melalui perbaikan sistem dan proses kerja secara berkelanjutan.

Upaya yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun hasil pengawasan internal, guna memastikan setiap rekomendasi ditindaklanjuti secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai ketentuan.
 - 2) Memperkuat koordinasi antara unit kerja terkait, pejabat penanggung jawab, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penyelesaian dan verifikasi tindak lanjut rekomendasi, sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.
 - 3) Meningkatkan kualitas pengendalian intern melalui optimalisasi penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penyempurnaan prosedur kerja, serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan keuangan negara.
 - 4) Melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas SDM melalui sosialisasi, pendampingan, dan peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, administrasi, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, sehingga seluruh pegawai memiliki pemahaman yang sama terhadap pentingnya akuntabilitas.
 - 5) Mengoptimalkan pengelolaan dokumen dan arsip pendukung sebagai bukti penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, sehingga proses verifikasi oleh APIP maupun BPK dapat dilaksanakan secara efektif dan didukung oleh data yang lengkap, akurat, dan mudah ditelusuri.
 - 6) Melalui berbagai upaya tersebut, BKK Kelas I Samarinda mampu mempertahankan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara optimal sekaligus memperkuat sistem tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
- g. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
- Keberhasilan BKK Kelas I Samarinda dalam mencapai realisasi 100% pada indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut.
1. Komitmen pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor utama keberhasilan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. Arahan dan pengawasan yang dilakukan secara konsisten mendorong setiap unit kerja untuk melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan serta memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tuntas.

2. Efektivitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penerapan SPIP secara konsisten telah meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memperkuat pengendalian proses bisnis, serta meminimalkan potensi terjadinya kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi. Kondisi tersebut mendukung terciptanya tata kelola organisasi yang lebih akuntabel dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan memungkinkan setiap rekomendasi dipantau hingga dinyatakan selesai. Mekanisme ini memastikan bahwa proses penyelesaian tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga memenuhi kriteria kelengkapan sesuai hasil verifikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
4. Koordinasi yang Efektif Antar Unit Kerja terkait, pejabat penanggung jawab, dan APIP. Koordinasi yang efektif mempercepat penyelesaian tindak lanjut, mengurangi potensi hambatan administratif, serta memastikan kesesuaian bukti pendukung dengan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Alternatif Solusi untuk Mempertahankan Capaian yaitu dengan terus memperkuat implementasi SPIP, mengoptimalkan monitoring dan evaluasi internal, meningkatkan kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, serta menyempurnakan pengelolaan dokumen pendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mempertahankan capaian indikator pada periode berikutnya sekaligus mencegah munculnya rekomendasi yang belum terselesaikan.

h. Upaya untuk Menunjang Pencapaian Indikator

Meskipun indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti telah mencapai realisasi sebesar 100%, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian guna menjaga keberlanjutan capaian kinerja pada periode berikutnya, antara lain:

- 1) Tersedianya anggaran pada RO 4815.EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp32.616.000.
- 2) Dinamika Perubahan Regulasi. Perubahan kebijakan dan peraturan di bidang pengelolaan keuangan negara serta tata kelola pemerintahan memerlukan penyesuaian yang cepat terhadap mekanisme pelaksanaan kegiatan dan administrasi agar tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Konsistensi Penerapan Pengendalian Intern. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu terus dipertahankan melalui pengawasan dan evaluasi yang berkesinambungan. Apabila pengendalian intern tidak dijalankan

secara konsisten, terdapat potensi munculnya kelemahan administrasi maupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan.

- 4) Kelengkapan, ketepatan, dan ketersediaan dokumen pendukung merupakan aspek penting dalam proses verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pengelolaan arsip yang belum optimal berpotensi memperlambat proses pembuktian bahwa suatu rekomendasi telah ditindaklanjuti secara lengkap.
- 5) Peningkatan Kapasitas SDM untuk menghindari potensi terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan administrasi maupun penyusunan dokumen pendukung.

i. Pemecahan Masalah

Dalam rangka mengantisipasi berbagai kendala serta mempertahankan capaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti, BKK Kelas I Samarinda melaksanakan berbagai langkah perbaikan sebagai berikut.

- 1) Penguatan Monitoring terhadap Perubahan Regulasi. Untuk mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan dan peraturan, BKK Kelas I Samarinda secara aktif melakukan pemantauan terhadap regulasi terbaru, melaksanakan sosialisasi kepada unit kerja terkait, serta melakukan penyesuaian prosedur kerja dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan tetap memenuhi prinsip kepatuhan.
- 2) Optimalisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam rangka menjaga konsistensi penerapan pengendalian intern, dilakukan penguatan implementasi SPIP melalui monitoring berkala, evaluasi pelaksanaan pengendalian, serta peningkatan koordinasi antara pimpinan, unit kerja, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Upaya ini diharapkan mampu meminimalkan potensi kelemahan administrasi maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 3) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dokumen Pendukung. Untuk memastikan proses verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan efektif, dilakukan penataan dokumen secara sistematis, penyempurnaan mekanisme pengarsipan, serta pemenuhan bukti pendukung yang lengkap, akurat, dan mudah ditelusuri. Dengan demikian, setiap tindak lanjut hasil pemeriksaan dapat dibuktikan secara memadai sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- 4) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia. BKK Kelas I Samarinda terus mendorong peningkatan kapasitas pegawai melalui sosialisasi kebijakan,

pembinaan teknis, berbagi pengetahuan (knowledge sharing), serta pengembangan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan, administrasi, dan akuntabilitas kinerja. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pegawai terhadap ketentuan yang berlaku serta mendukung keberlanjutan kualitas tata kelola organisasi.

j. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan adalah efisiensi anggaran yang mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Realisasi indikator kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti sebesar 100% telah melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 95%, dengan capaian 105,26%. Realisasi anggaran sebesar Rp14.810.000,- dari pagu anggaran Rp32.616.000,- (pagu efektif). Berdasarkan perhitungan didapatkan efisiensi sebesar 0,03880 dengan nilai efisiensi 60% karena dapat mencapai kinerja 104,03% dengan menggunakan anggaran sebesar 99,99% sehingga capaian indikator terkategori efisien.

k. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti didukung oleh pelaksanaan Program Dukungan Manajemen, khususnya melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada penguatan tata kelola organisasi, peningkatan akuntabilitas, serta pengendalian internal. Program tersebut berperan penting dalam menciptakan sistem pengelolaan administrasi dan keuangan yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator ini antara lain:

- 1) Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pelaksanaan pengendalian intern secara konsisten mendukung peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, memperkuat pengawasan internal, serta meminimalkan potensi terjadinya kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.
- 2) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala menjadi sarana untuk memastikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai rencana aksi, dipantau perkembangannya, serta diverifikasi hingga dinyatakan selesai oleh pihak yang berwenang.

- 3) Penguatan Tata Kelola Administrasi dan Pengelolaan Dokumen. Penyelenggaraan administrasi yang tertib serta pengelolaan dokumen pendukung secara sistematis memberikan kemudahan dalam proses verifikasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan mendukung pemenuhan bukti penyelesaian rekomendasi secara lengkap dan akurat.
- 4) Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi SDM. Upaya peningkatan kapasitas pegawai melalui sosialisasi kebijakan, pembinaan teknis, dan berbagi pengetahuan (knowledge sharing) turut mendukung peningkatan pemahaman terhadap prinsip akuntabilitas, pengelolaan keuangan negara, serta tata cara penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
 - a. Secara keseluruhan, sinergi antara Program Dukungan Manajemen dengan berbagai kegiatan pendukung tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan BKK Kelas I Samarinda dalam mempertahankan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara optimal. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pencapaian indikator tidak hanya bergantung pada penyelesaian rekomendasi, tetapi juga pada efektivitas sistem tata kelola, pengendalian intern, dan budaya akuntabilitas yang dibangun secara berkelanjutan di lingkungan organisasi

5. Persentase Realisasi Anggaran

a. Dasar Hukum

Pelaksanaan dan pengukuran indikator Persentase Realisasi Anggaran mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan negara, perencanaan dan penganggaran, serta pengukuran kinerja instansi pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
5. Perjanjian Kinerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda Tahun 2026 yang menetapkan target indikator Persentase Realisasi Anggaran sebesar 96%.

b. Pengertian

Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Persentase Realisasi Anggaran merupakan indikator yang menggambarkan tingkat penyerapan anggaran terhadap pagu yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada periode tertentu. Indikator ini menunjukkan kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan melalui pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, tertib, dan akuntabel.

Tingkat realisasi anggaran tidak hanya mencerminkan besarnya belanja yang telah dilaksanakan, tetapi juga menunjukkan kualitas pelaksanaan program, ketepatan perencanaan, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan satuan kerja dalam mengelola sumber daya keuangan negara untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

c. Definisi Operasional

Perbandingan antara realisasi anggaran dengan target realisasi anggaran yang ditetapkan berdasarkan pagu yang ditetapkan

d. Rumus / Cara Perhitungan

Persentase Realisasi Anggaran dihitung dengan membandingkan jumlah realisasi belanja terhadap total pagu anggaran yang tersedia pada periode pelaporan, kemudian dikalikan 100 persen.

Rumus perhitungan:

$$\text{Persentase Realisasi Anggaran} = (\text{Realisasi Anggaran} \div \text{Pagu Anggaran}) \times 100\%$$

Keterangan:

- Realisasi Anggaran adalah seluruh belanja yang telah dibukukan dan disahkan dalam sistem perbendaharaan negara sampai dengan periode pelaporan.
- Pagu Anggaran adalah alokasi anggaran yang tercantum dalam DIPA setelah memperhitungkan perubahan atau revisi anggaran yang berlaku pada periode tersebut.
- Hasil perhitungan dinyatakan dalam bentuk persentase sebagai indikator tingkat penyerapan anggaran.

e. Capaian Indikator

Pada awal Tahun Anggaran 2026, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp19.471.973.000 yang terdiri atas

Program Sistem Ketahanan Kesehatan sebesar Rp3.220.442.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp16.251.531.000 sebagaimana tercantum dalam DIPA awal.

Seiring dengan pelaksanaan kebijakan efisiensi belanja pemerintah dan penyesuaian alokasi anggaran nasional, dilakukan beberapa kali revisi DIPA selama Semester I Tahun 2026. Setelah pelaksanaan revisi, pagu anggaran satker menjadi Rp18.891.417.000. Namun demikian, sebagian anggaran yang bersumber dari PNPB masih berstatus Blokir Kode A sehingga pagu yang dapat dimanfaatkan secara efektif dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp17.536.669.000. Pagu efektif tersebut terdiri atas Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan sebesar Rp2.154.364.000 dan Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit sebesar Rp15.382.305.000.

Sampai dengan akhir Semester I Tahun 2026, realisasi anggaran yang tercatat dalam sistem perbendaharaan negara mencapai Rp8.917.249.492 atau sebesar 47,20% dari pagu DIPA sebesar Rp18.891.417.000. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan Semester I, dengan tetap memperhatikan kebijakan efisiensi anggaran, proses revisi DIPA, serta pengelolaan anggaran yang terdampak blokir sehingga beberapa kegiatan strategis baru dapat dioptimalkan pada Semester II Tahun 2026.

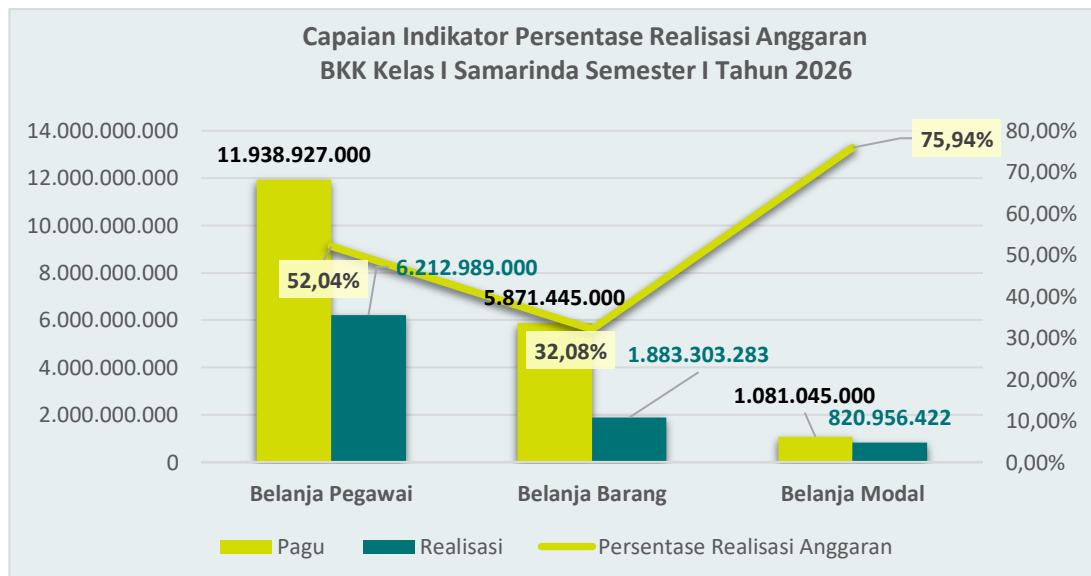
Tahapan Pengelolaan Anggaran	Program Sistem Ketahanan Kesehatan (7960)	Program Dukungan Manajemen (4815)	Total Anggaran
DIPA Awal	Rp3.220.442.000	Rp16.251.531.000	Rp19.471.973.000
DIPA Revisi I (Efisiensi Anggaran)	Rp3.220.442.000	Rp15.670.975.000	Rp18.891.417.000
Pagu Efektif Semester I	Rp2.154.364.000	Rp15.382.305.000	Rp17.536.669.000
Realisasi Semester I	Rp1.058.520.863	Rp7.858.728.629	Rp8.917.249.492
Persentase Realisasi	32,87%	50,15%	47,20%

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Kegiatan BKK Kelas I Samarinda berdasarkan Jenis Belanja Semester I Tahun 2026

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja			Total
			Pegawai	Barang	Modal	
1	4815 Dukungan Manajemen	PAGU	11.938.927.000	3.173.803.000	558.245.000	15.670.975.000
		REALISASI	6.212.989.787	1.216.612.420	429.126.422	7.858.728.629

	Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		52.04%	38.33%	76.87%	50.15%
2	7960 Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	PAGU	0	2.697.642.000	522.800.000	3.220.442.000
		REALISASI	0	666.690.863	391.830.000	1.058.520.863
			0%	24.71%	74.95%	32.87%
GRAND TOTAL		PAGU	11.938.927.000	5.871.445.000	1.081.045.000	18.891.417.000
		REALISASI	6.212.989.787	1.883.303.283	820.956.422	15.643.530.738
		%	52.04%	32.08%	75.94%	47.20%
		SISA	3.988.141.717	260.088.578	9.974.167.508	9.974.167.508

Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi anggaran pada Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit mencapai 50,15%, sedangkan Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan mencapai 32,87%. Sementara itu, berdasarkan jenis belanja, Belanja Modal memiliki tingkat realisasi tertinggi sebesar 75,94%, diikuti Belanja Pegawai sebesar 52,04%, dan Belanja Barang sebesar 32,08%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pola penyerapan anggaran masih mengikuti karakteristik pelaksanaan kegiatan, tahapan pengadaan barang dan jasa, serta jadwal penyelesaian administrasi pembayaran pada masing-masing jenis belanja.

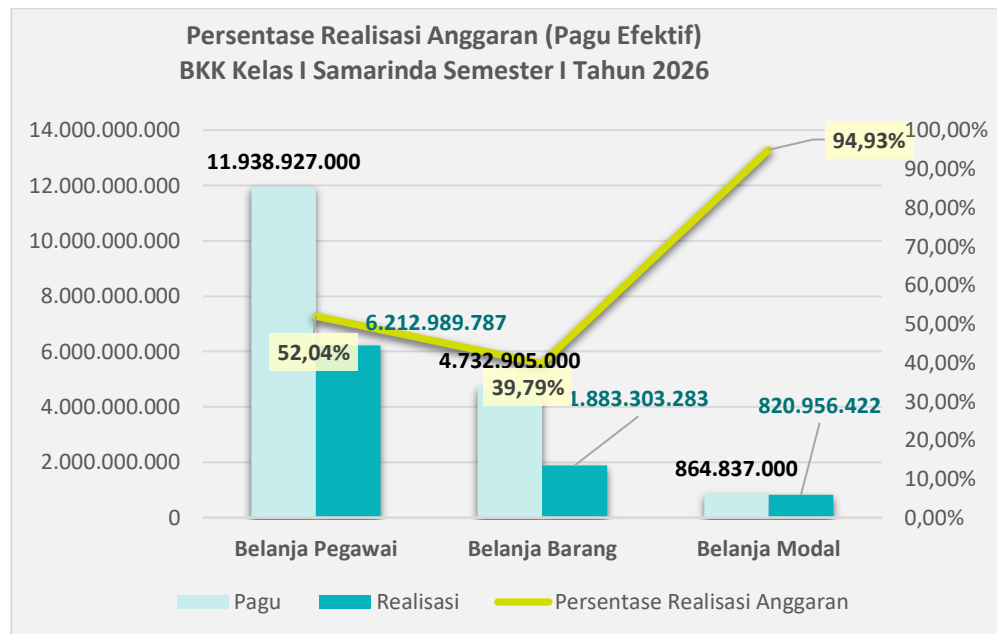


Grafik 3.34 Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas, realisasi anggaran BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026 pada belanja pegawai sebesar Rp6.212.989.000,- atau telah terealisasi

sebesar 52,04%. Sedangkan belanja barang sebesar Rp1.883.303.283,- dari pagu sebesar Rp5.871.445.000. atau hanya sebesar 32,08% dikarenakan anggaran yang diblokir sampai dengan akhir Bulan Juni tahun 2026. Sementara untuk belanja modal terealisasi cukup besar yaitu sebesar 75,94%.

Berikut adalah realisasi anggaran BKK Kelas I Samarinda jika menggunakan pagu efektif.



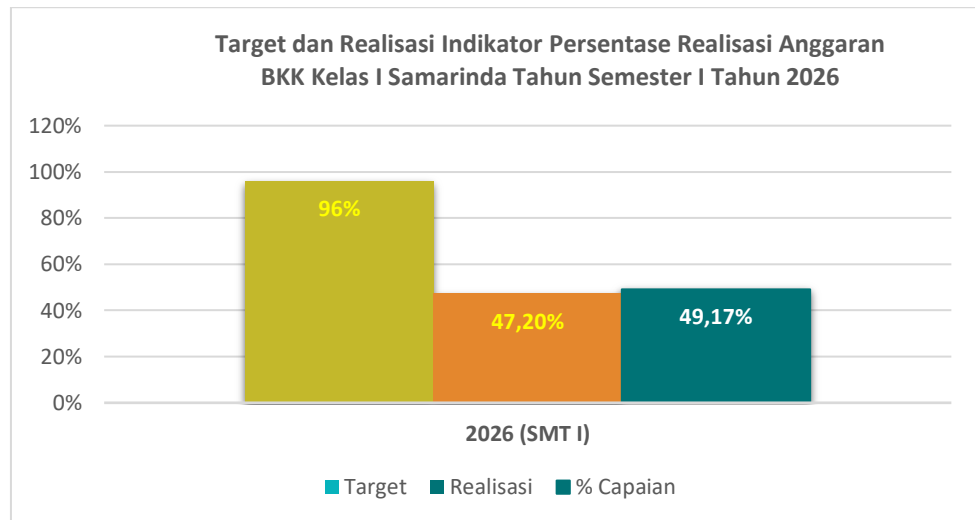
Grafik 3.35 Persentase Realisasi Anggaran (Pagu Efektif) BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026

Jumlah Pagu efektif Berdasarkan grafik di atas jika menggunakan pagu efektif maka baik belanja pegawai maupun belanja barang telah mencapai realisasi 50,85%, sehingga untuk persentase capaian untuk pagu efektif adalah sebesar 101,7%.

Secara umum, capaian realisasi anggaran Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berlangsung sesuai siklus pelaksanaan APBN dengan tetap menyesuaikan dinamika kebijakan nasional. Optimalisasi penyerapan anggaran terus dilakukan melalui percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian revisi anggaran, pembukaan blokir anggaran, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar target realisasi anggaran pada akhir Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026

Pada indikator Persentase Realisasi Anggaran, Target, realisasi, dan capaian indikator seperti terlihat pada grafik berikut:



Grafik 3.33 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026

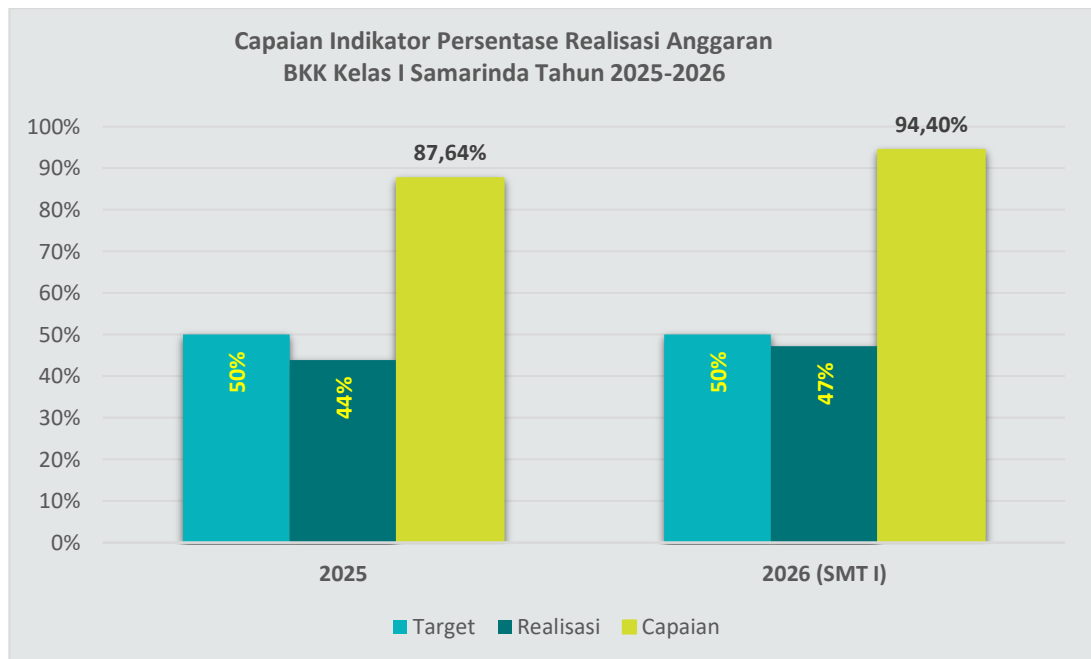
Pada Semester I Tahun 2026, indikator Persentase Realisasi Anggaran ditargetkan mencapai 50,00%, sedangkan realisasi anggaran yang berhasil dicapai sebesar 47,20%. Dengan demikian, tingkat capaian indikator mencapai 94,40% dari target Semester I yang telah ditetapkan.

Realisasi anggaran sebesar 47,20% menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berlangsung sesuai dengan tahapan pelaksanaan program dan kegiatan pada Semester I, meskipun belum sepenuhnya mencapai target antara yang ditetapkan. Selisih sebesar 2,80% dari target dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, proses revisi DIPA selama Semester I, keberadaan anggaran yang masih diblokir sehingga mengurangi pagu efektif yang dapat dimanfaatkan, serta karakteristik beberapa kegiatan dan proses pengadaan barang dan jasa yang penyelesaiannya dijadwalkan pada Semester II.

Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar rencana penyerapan anggaran Semester I telah dapat direalisasikan. BKK Kelas I Samarinda terus melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan melalui monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, percepatan penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa, optimalisasi pelaksanaan revisi anggaran, serta koordinasi dengan unit pelaksana kegiatan agar realisasi anggaran pada Semester II dapat meningkat dan target tahunan sebesar 96,00% dapat tercapai sesuai Perjanjian Kinerja.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Semester I Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya.

Perbandingan capaian indikator Persentase Realisasi Anggaran antara Semester I Tahun 2026 dan Semester I Tahun 2025 dilakukan untuk mengetahui perkembangan kinerja pelaksanaan anggaran dari tahun ke tahun. Hasil perbandingan disajikan pada grafik di bawah ini.



Grafik 3.20 Capaian Kinerja Nilai Indikator Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025 dan 2026

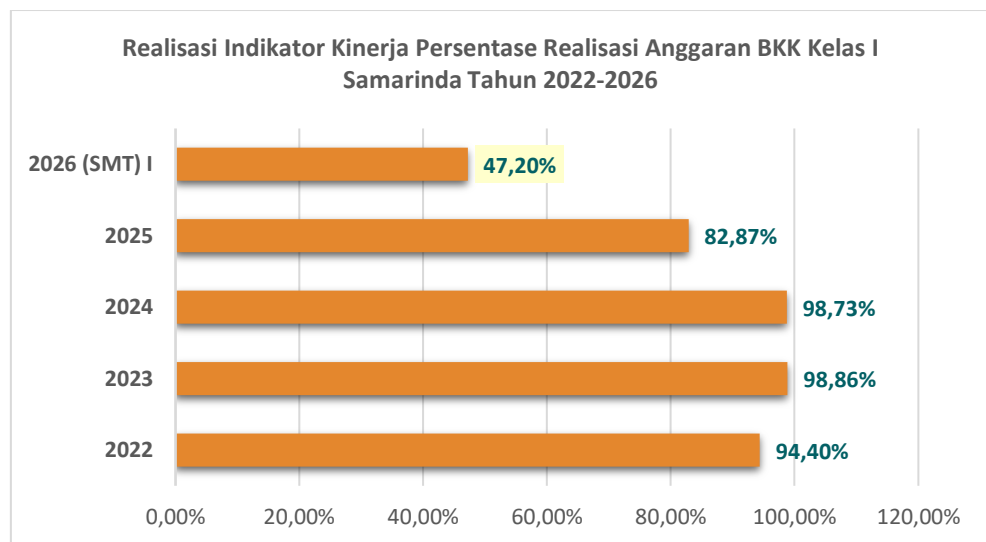
Berdasarkan hasil perbandingan, realisasi anggaran pada Semester I Tahun 2026 mencapai 47,20%, lebih tinggi dibandingkan realisasi Semester I Tahun 2025 yang sebesar 43,82%. Dengan demikian, terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 3,38 poin persentase dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan peningkatan tersebut, tingkat capaian terhadap target Semester I juga meningkat dari 87,64% pada Tahun 2025 menjadi 94,40% pada Tahun 2026.

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan anggaran pada Semester I Tahun 2026. Meskipun pada kedua tahun anggaran terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada terbatasnya pagu efektif yang dapat dimanfaatkan, BKK Kelas I Samarinda mampu meningkatkan tingkat penyerapan anggaran dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Semester I.

Hasil perbandingan ini menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan anggaran pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan tren yang lebih baik

dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut menjadi dasar untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran pada Semester II guna mencapai target realisasi anggaran tahunan yang telah ditetapkan.

Persentase Realisasi Anggaran baru ditambahkan sebagai indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai indikator kinerja direktif pimpinan, akan tetapi untuk perbandingan dengan tahun sebelumnya masih dapat dilakukan. Realisasi anggaran BKK Kelas I Samarinda tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



Grafik 3.36 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Samarinda Tahun 2022-2026

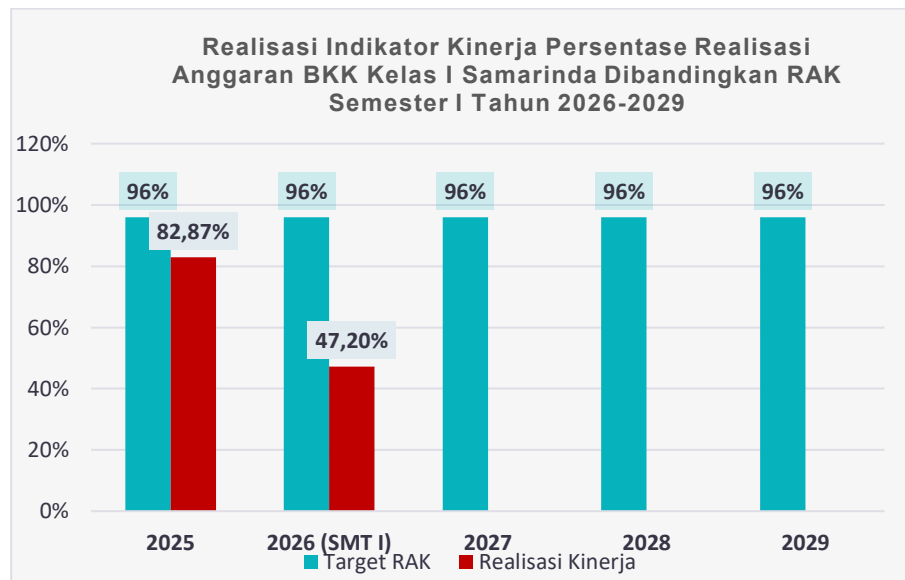
Selain membandingkan dengan Semester I Tahun 2025, capaian indikator ini juga perlu dilihat dalam perspektif tren kinerja tahunan. Selama periode 2022–2024, BKK Kelas I Samarinda secara konsisten mampu mencapai target Persentase Realisasi Anggaran dengan realisasi sebesar 94,40% pada Tahun 2022, meningkat menjadi 98,86% pada Tahun 2023, dan tetap terjaga pada 98,73% di Tahun 2024.

Pada Tahun 2025, realisasi anggaran tercatat sebesar 82,87%, lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja pelaksanaan anggaran, melainkan dipengaruhi oleh adanya self blocking/blokir anggaran yang tidak dibuka hingga akhir tahun sehingga sebagian pagu DIPA tidak dapat direalisasikan. Apabila realisasi dihitung terhadap pagu efektif yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh satuan kerja, tingkat realisasi anggaran mencapai 99,87%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran tetap berlangsung secara optimal.

Dengan demikian, capaian Semester I Tahun 2026 perlu dipandang sebagai bagian dari upaya mempertahankan kinerja pengelolaan anggaran yang telah menunjukkan tren baik dalam beberapa tahun terakhir. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pada Semester II diharapkan dapat mendukung pencapaian target realisasi anggaran Tahun 2026 sesuai dengan Perjanjian Kinerja.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Persentase realisasi anggaran jika dibandingkan dengan RAK Semester I Tahun 2026-2029 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 3.37 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Samarinda Dibandingkan Target RAK Semester I Tahun 2026-2029

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026–2029 menetapkan target Persentase Realisasi Anggaran sebesar 96,00% pada setiap tahun sebagai indikator keberhasilan pengelolaan anggaran. Target tersebut mencerminkan komitmen satuan kerja untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Sampai dengan Semester I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai 47,20%. Capaian tersebut merupakan progres pelaksanaan anggaran pada pertengahan tahun dan belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target tahunan sebesar 96,00%, mengingat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran masih akan berlangsung hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Secara proporsional, realisasi Semester I telah mencapai sekitar 49,17% dari target tahunan yang ditetapkan dalam RAK. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berada pada fase pelaksanaan tengah tahun, sehingga

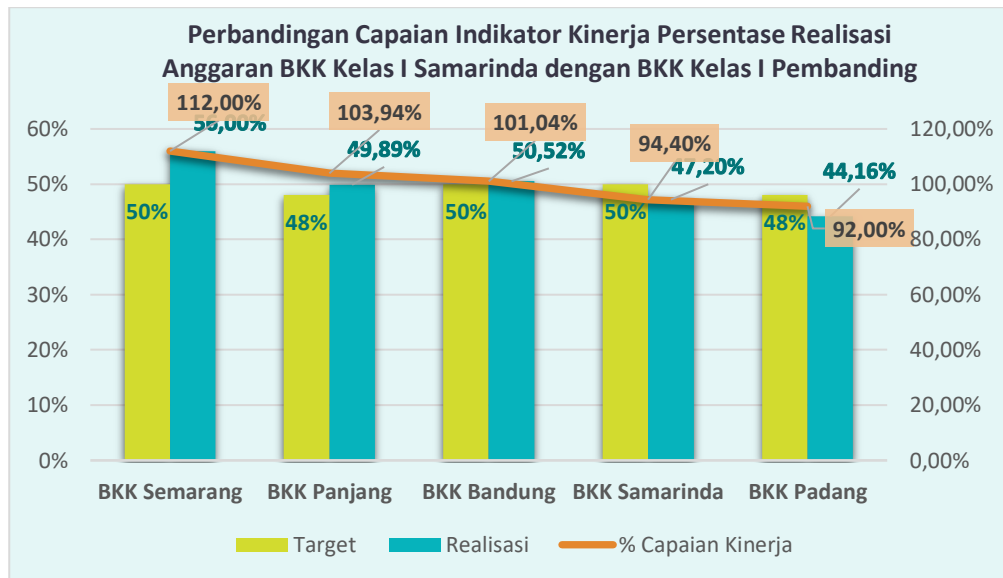
masih tersedia ruang yang cukup pada Semester II untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui percepatan penyelesaian kegiatan, pelaksanaan kontrak, pembayaran pekerjaan, dan penyelesaian proses administrasi keuangan.

Berdasarkan perkembangan realisasi anggaran pada Semester I serta pola penyerapan anggaran BKK Kelas I Samarinda dalam beberapa tahun terakhir, terdapat indikasi bahwa target Persentase Realisasi Anggaran sebesar 96,00% masih memiliki peluang untuk dicapai pada akhir Tahun 2026. Hal ini didukung oleh tren capaian tahun-tahun sebelumnya yang menunjukkan tingkat realisasi anggaran selalu berada di atas 94%, bahkan mencapai 98,86% pada Tahun 2023 dan 98,73% pada Tahun 2024. Sementara itu, capaian Tahun 2025 yang tercatat sebesar 82,87% dipengaruhi oleh kebijakan self blocking yang tidak dibuka hingga akhir tahun. Apabila dihitung berdasarkan pagu efektif, realisasi anggaran Tahun 2025 sesungguhnya mencapai 99,87%, yang menunjukkan bahwa kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan anggaran tetap berada pada kategori sangat baik.

Dengan mempertimbangkan pengalaman pengelolaan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, dukungan sistem monitoring pelaksanaan anggaran yang dilakukan secara berkala, serta rencana percepatan pelaksanaan kegiatan pada Semester II, BKK Kelas I Samarinda masih dalam status on the track dan optimis dapat meningkatkan realisasi anggaran secara signifikan hingga akhir Tahun 2026. Meskipun demikian, pencapaian target tersebut tetap bergantung pada kelancaran pelaksanaan kegiatan, penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa, serta tidak adanya kebijakan strategis yang berdampak terhadap perubahan pagu atau pelaksanaan anggaran pada Semester II.

2) Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dengan BKK Lain

Perbandingan capaian indikator Persentase Realisasi Anggaran dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I lainnya dilakukan sebagai salah satu bentuk tolak ukur untuk mengetahui posisi kinerja BKK Kelas I Samarinda dalam mencapai target realisasi anggaran Semester I Tahun 2026. Perbandingan dilakukan berdasarkan tingkat capaian terhadap target Semester I yang telah ditetapkan oleh masing-masing satuan kerja, sehingga hasil yang diperoleh lebih mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan anggaran dibandingkan sekadar membandingkan besarnya persentase realisasi.



Grafik 3.38 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Realisasi Anggaran BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Pembanding Semester I Tahun 2026

Berdasarkan grafik di atas, BKK Kelas I Samarinda memperoleh tingkat capaian sebesar 94,40% dari target Semester I dan menempati peringkat ke-4 dari 5 Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I yang dijadikan pembanding. Posisi tersebut berada di bawah BKK Kelas I Semarang dengan capaian 112,00%, BKK Kelas I Panjang sebesar 103,94%, dan BKK Kelas I Bandung sebesar 101,04%, namun masih lebih tinggi dibandingkan BKK Kelas I Padang yang memperoleh capaian 92,00%.

Perbedaan tingkat capaian antar satuan kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan karakteristik program dan kegiatan, besaran pagu anggaran, jadwal pelaksanaan kegiatan, kebijakan efisiensi anggaran, serta progres pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada masing-masing satuan kerja. Oleh karena itu, hasil *benchmarking* ini menjadi bahan evaluasi bagi BKK Kelas I Samarinda untuk mengidentifikasi praktik-praktik pengelolaan anggaran yang efektif serta merumuskan strategi percepatan penyerapan anggaran pada Semester II.

Meskipun menempati peringkat ke-4, capaian sebesar 94,40% menunjukkan bahwa sebagian besar target realisasi anggaran Semester I telah berhasil dicapai. Dengan dukungan percepatan pelaksanaan kegiatan, penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa, serta penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, BKK Kelas I Samarinda diharapkan mampu meningkatkan capaian realisasi anggaran pada Semester II sehingga target tahunan sebesar 96,00% dapat tercapai secara optimal.

f. Upaya yang Dilakukan untuk Mencapai Indikator

Dalam rangka mencapai target indikator **Persentase Realisasi Anggaran** pada Tahun 2026, BKK Kelas I Samarinda telah melaksanakan berbagai upaya pengendalian dan percepatan pelaksanaan anggaran sejak awal tahun. Upaya tersebut

diarahkan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta mendukung pencapaian target realisasi anggaran. Adapun upaya yang telah dilakukan meliputi:

- 1) Tersedianya anggaran pada RO 4815.EBA 994 Layanan Perkantoran sebesar Rp14,688,123,000,-.
- 2) Menyusun rencana penarikan dana dan jadwal pelaksanaan kegiatan sebagai dasar pengendalian pelaksanaan anggaran.
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala melalui rapat pengendalian untuk memantau perkembangan penyerapan anggaran pada setiap unit kerja.
- 4) Mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- 5) Melaksanakan revisi anggaran secara selektif untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
- 6) Meningkatkan koordinasi antara unit perencanaan, pengelola keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), bendahara pengeluaran, dan penanggung jawab kegiatan dalam rangka mempercepat penyelesaian administrasi pelaksanaan anggaran.
- 7) Melakukan pemantauan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebagai salah satu instrumen pengendalian kualitas pelaksanaan anggaran.
- 8) Melaksanakan evaluasi berkala terhadap progres pelaksanaan kegiatan sebagai dasar penyusunan langkah percepatan penyerapan anggaran pada Semester II.

g. Analisis Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Semester I Tahun 2026, indikator Persentase Realisasi Anggaran memperoleh realisasi sebesar 47,20% atau mencapai 94,40% dari target Semester I sebesar 50,00%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat selisih 2,80 poin persentase dari target Semester I. Hasil analisis terhadap capaian kinerja beserta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Kebijakan efisiensi anggaran memengaruhi pola penyerapan anggaran pada Semester I. Pada Tahun Anggaran 2026 dilakukan penyesuaian alokasi anggaran melalui kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang berdampak pada perubahan pagu DIPA. Selain itu, masih terdapat blokir anggaran yang menyebabkan pagu efektif lebih rendah dibandingkan pagu DIPA. Kondisi tersebut memerlukan penyesuaian prioritas pelaksanaan kegiatan agar tetap mendukung pencapaian sasaran organisasi.

- 2) Pelaksanaan kegiatan mengikuti tahapan pelaksanaan APBN. Sebagian kegiatan, khususnya yang memerlukan proses pengadaan barang dan jasa, penyelesaian kontrak, serta pembayaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, masih berada pada tahap pelaksanaan selama Semester I. Oleh karena itu, sebagian realisasi anggaran secara alami akan terkonsentrasi pada Semester II sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- 3) Peningkatan realisasi dibandingkan Semester I Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan anggaran. Realisasi Semester I Tahun 2026 sebesar 47,20% lebih tinggi dibandingkan Semester I Tahun 2025 sebesar 43,82% atau meningkat 3,38 poin persentase. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pengendalian penyerapan anggaran pada Tahun 2026 telah berjalan lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, meskipun kedua tahun sama-sama menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
- 4) Monitoring dan pengendalian pelaksanaan anggaran dilaksanakan secara berkelanjutan. Untuk menjaga agar pelaksanaan anggaran tetap sesuai dengan rencana, dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala melalui rapat pengendalian, pemantauan progres pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi terhadap capaian penyerapan anggaran pada setiap unit kerja.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan penyerapan anggaran. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian target realisasi anggaran pada akhir Tahun 2026, BKK Kelas I Samarinda telah melakukan berbagai langkah, antara lain:

- o mempercepat pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- o mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta penyelesaian administrasi pembayaran;
- o mengoptimalkan pelaksanaan revisi anggaran sesuai kebutuhan organisasi;
- o memperkuat koordinasi antara pengelola keuangan, perencana, dan penanggung jawab kegiatan;
- o melakukan monitoring capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara berkala sebagai instrumen pengendalian kualitas pelaksanaan anggaran.

Dengan berbagai upaya tersebut, BKK Kelas I Samarinda optimis realisasi anggaran akan meningkat pada Semester II sehingga target tahunan sebesar 96,00% dapat dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

h. Kendala/Masalah

Dalam upaya mencapai target indikator **Persentase Realisasi Anggaran** Semester I Tahun 2026, BKK Kelas I Samarinda masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran, yaitu:

1. Kebijakan efisiensi belanja pemerintah mengakibatkan penyesuaian alokasi anggaran sehingga diperlukan penyesuaian kembali terhadap prioritas kegiatan dan jadwal pelaksanaan.
 2. Masih terdapat blokir anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga pagu efektif yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan lebih rendah dibandingkan pagu DIPA yang tersedia.
 3. Sebagian kegiatan memerlukan proses pengadaan barang dan jasa yang harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga penyelesaian kontrak dan realisasi pembayaran tidak seluruhnya dapat diselesaikan pada Semester I.
 4. Pelaksanaan beberapa kegiatan bersifat bertahap dan mengikuti jadwal operasional, sehingga realisasi anggaran secara alami lebih banyak terjadi pada Semester II sesuai dengan progres pelaksanaan kegiatan.
 5. Perubahan kebutuhan pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran memerlukan penyesuaian administrasi dan revisi anggaran, yang memerlukan proses koordinasi serta persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.
- i. Pemecahan Masalah

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala yang dihadapi pada pelaksanaan anggaran Semester I Tahun 2026, BKK Kelas I Samarinda telah dan akan terus melaksanakan berbagai langkah perbaikan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran. Adapun langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut

- 1) Melakukan penyesuaian prioritas kegiatan sesuai kebijakan efisiensi anggaran. Penyesuaian dilakukan melalui optimalisasi alokasi anggaran pada kegiatan yang bersifat prioritas serta memastikan seluruh program tetap mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan pagu efektif dan melakukan koordinasi terkait pembukaan blokir anggaran. Pengelolaan anggaran difokuskan pada pagu efektif yang tersedia, disertai koordinasi secara berkelanjutan dengan unit terkait untuk mengantisipasi perubahan kebijakan dan memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan apabila blokir anggaran dibuka.
- 3) Mempercepat pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP), disertai pemantauan terhadap setiap tahapan pengadaan agar proses kontrak dan penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan tepat waktu sehingga tidak menghambat realisasi anggaran.

- 4) Memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Monitoring realisasi anggaran dan progres pelaksanaan kegiatan dilakukan secara berkala melalui rapat evaluasi, sehingga setiap keterlambatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan.
 - 5) Meningkatkan koordinasi dan percepatan penyelesaian administrasi keuangan. Koordinasi antara pejabat perencanaan, pengelola keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, serta penanggung jawab kegiatan terus diperkuat untuk mempercepat penyelesaian administrasi pembayaran, revisi anggaran apabila diperlukan, dan pelaporan pelaksanaan anggaran.
 - 6) Melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan capaian realisasi anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) secara berkala sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta penyusunan strategi percepatan penyerapan anggaran pada Semester II.
- j. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan adalah efisiensi anggaran yang mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Realisasi indikator kinerja persentase realisasi anggaran sampai dengan Semester I Tahun 2026 telah tercapai 82,87% dari target 96% untuk Semester I Tahun 2026. Realisasi anggaran sebesar Rp14.221.222.558,- dari pagu anggaran Rp 14.227.344.000,-. Berdasarkan perhitungan didapatkan efisiensi sebesar -0,15794 dengan nilai Efisiensi 11%. Berdasarkan hasil tersebut maka nilai efisiensi dikatakan tidak efisien karena hanya mencapai kinerja 82,36% dengan menggunakan anggaran sebesar 99,96% sehingga capaian indikator kinerja dianggap tidak efisien.

k. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Tingkat Keberhasilan atau Upaya Peningkatan Capaian Program

Pencapaian indikator Persentase Realisasi Anggaran pada Semester I Tahun 2026 didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BKK Kelas I Samarinda. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan rencana kerja, jadwal pelaksanaan, serta ketersediaan anggaran, sehingga mampu mendukung peningkatan realisasi anggaran pada Semester I.

Program yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator ini meliputi Program Dukungan Manajemen dan Program Sistem Ketahanan Kesehatan, yang

diimplementasikan melalui berbagai kegiatan operasional maupun kegiatan pendukung manajemen. Sampai dengan Semester I Tahun 2026, Program Dukungan Manajemen mencatat realisasi anggaran sebesar 50,15%, sedangkan Program Sistem Ketahanan Kesehatan mencapai realisasi sebesar 32,87%. Capaian tersebut memberikan kontribusi terhadap realisasi anggaran BKK Kelas I Samarinda secara keseluruhan sebesar 47,20%.

Selain pelaksanaan program, keberhasilan pencapaian indikator juga didukung oleh berbagai kegiatan pengelolaan anggaran, antara lain penyusunan rencana penarikan dana, pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan revisi anggaran sesuai kebutuhan organisasi, serta pengendalian pelaksanaan anggaran melalui pemantauan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Sinergi antara fungsi perencanaan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan anggaran selama Semester I.

Sebagai upaya peningkatan capaian pada Semester II Tahun 2026, BKK Kelas I Samarinda akan terus mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi, mempercepat penyelesaian kontrak dan administrasi pembayaran, meningkatkan koordinasi dengan seluruh penanggung jawab kegiatan, serta memperkuat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan realisasi anggaran secara signifikan sehingga target tahunan sebesar 96,00% dapat dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

6. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam

a. Dasar Hukum

- 1) *International Health Regulation* (IHR) 2005
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadina Luar Biasa, Wabah dan Krisis.
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Indikator Kinerja Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan.
- 5) Sistem Informasi Karantina Kesehatan (Sinkarkes) sebagai sumber data pelayanan kekarantinaan kesehatan.
- 6) Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Dokumen Karantina Kesehatan Alat Angkut di BKK Kelas I Samarinda.

b. Pengertian

Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 Jam merupakan indikator yang mengukur tingkat ketepatan waktu penyelesaian pelayanan kekarantinaan kesehatan terhadap alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah). Indikator ini menunjukkan kemampuan BKK Kelas I Samarinda dalam memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan sehingga tidak menghambat operasional alat angkut, namun tetap menjamin terlaksananya pengawasan kekarantinaan kesehatan secara optimal.

c. Definisi Operasional

Penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan pada kedatangan alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah) sesuai hasil (*RBA*) dalam waktu kurang dari 2 x 24 jam, sejak alat angkut masuk di wilayah perairan pintu masuk setempat selama kurun waktu 1 tahun.

d. Rumus/Cara Perhitungan

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah dokumen yang diterbitkan} < 2 \times 24 \text{ jam}}{\text{Total alat angkut kategori merah}} \times 100\%$$

Sumber data: Sistem Informasi Kekarantinaan Kesehatan (SINKARKES) dan Aplikasi Bank DATA.

e. Capaian Kinerja

Indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 Jam bertujuan untuk mengukur tingkat ketepatan waktu pelayanan kekarantinaan kesehatan terhadap alat angkut dengan kategori risiko tinggi (merah). Indikator ini mencerminkan kemampuan BKK Kelas I Samarinda dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan, tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan serta pengawasan terhadap faktor risiko kesehatan pada alat angkut.

Berikut adalah rekapitulasi data yang ditarik melalui aplikasi **Sinkarkes** dan Bank Data BKK Kelas I Samarinda untuk periode Triwulan I, baik itu dari wilayah kerja dan Induk maupun khusus di Induk BKK Kelas I Samarinda. Selama periode Januari hingga Juni, total beban kerja pemeriksaan alat angkut mencapai **1.055 unit**.

Tabel 1. Jumlah Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan Alat Angkut Kategori Merah, Kuning, Hijau Triwulan II Pelabuhan Samarinda & Wilayah Kerja 2026

Bulan	Jumlah Angkut Merah	Alat Kategori	Jumlah Angkut Kategori Kuning	Jumlah Angkut Hijau	Alat Kategori	Jumlah
Januari	26		137	17		180
Februari	99		69	18		186
Maret	87		60	23		170
April	87		61	15		163
Mei	70		89	25		184
Juni	74		80	13		172
Jumlah	443		496	116		1055

Berdasarkan aplikasi **Sinkarkes** dan Bank Data BKK Kelas I Samarinda untuk periode Triwulan II, khusus data kategori merah, data disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan Alat Angkut Kategori Merah Triwulan II.

Bulan	Jumlah Alat Angkut Kategori Merah	Dokumen Terbit < 2 x 24 Jam	Dokumen Terbit ≥ 2 x 24 Jam	Capaian
Januari	26	26	0	100%
Februari	99	99	0	100%
Maret	87	87	0	100%
April	87	87	0	100%
Mei	70	70	0	100%
Juni	74	74	0	100%
	433	433		100%

Selama Semester I Tahun 2026, BKK Kelas I Samarinda telah melaksanakan pelayanan kekarantina kesehatan terhadap 1.055 alat angkut yang terdiri atas 443 alat angkut kategori merah, 496 alat angkut kategori kuning, dan 116 alat angkut kategori hijau. Dari seluruh alat angkut kategori merah yang memerlukan pemeriksaan dan penerbitan dokumen kekarantina kesehatan, sebanyak 443 dokumen berhasil diterbitkan dalam waktu kurang dari 2×24 jam, sehingga tidak terdapat dokumen yang diterbitkan melebihi standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, capaian indikator pada Semester I Tahun 2026 mencapai 100%.

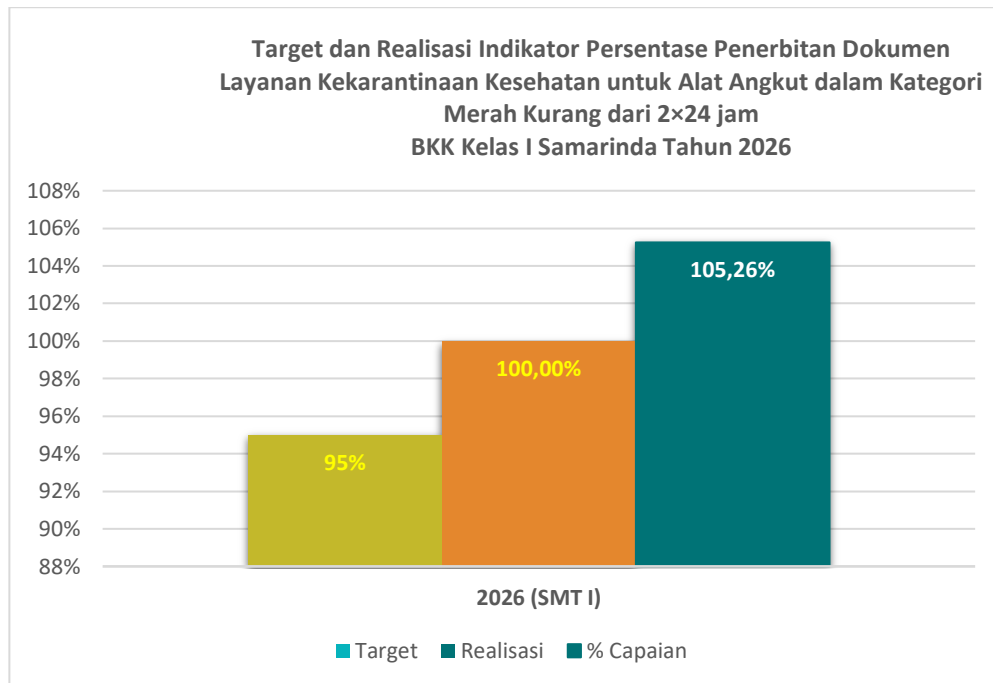
Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda mampu mempertahankan ketepatan waktu pelayanan kekarantinaan kesehatan meskipun menghadapi beban kerja yang cukup tinggi. Selama periode Januari hingga Juni 2026, proporsi alat angkut kategori merah mencapai 41,99% dari total alat angkut yang diperiksa. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir separuh pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan terhadap alat angkut berisiko tinggi yang memerlukan pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen internasional, pemeriksaan sanitasi, serta penilaian faktor risiko kesehatan secara lebih komprehensif sebelum dokumen kekarantinaan kesehatan diterbitkan.

Keberhasilan mempertahankan capaian sebesar 100% mencerminkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kekarantinaan kesehatan, kesiapan sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES) dalam mendukung proses pemeriksaan, verifikasi, dan penerbitan dokumen secara tepat waktu. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan komitmen BKK Kelas I Samarinda dalam menjaga kualitas pelayanan publik serta mendukung upaya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit maupun faktor risiko kesehatan melalui pintu masuk negara sesuai prinsip International Health Regulations (IHR) 2005.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Perjanjian Kinerja BKK Kelas I Samarinda Tahun 2026 menetapkan target indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 Jam sebesar 95%. Hingga Semester I Tahun 2026, realisasi indikator mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 105,26% dari target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{100}{95} \times 100\% = 105,26\%$$



Grafik 3.33 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 jam BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026

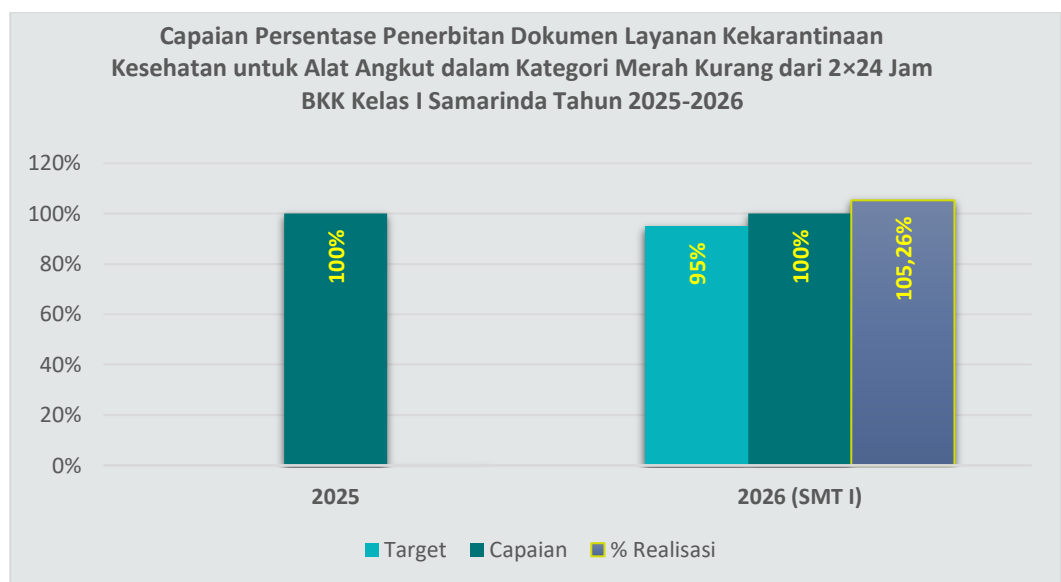
Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 Jam untuk semester I tahun 2026 adalah sebesar 105,26%.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa seluruh **443 dokumen** layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut kategori merah berhasil diterbitkan dalam waktu kurang dari **2×24 jam**, tanpa terdapat dokumen yang melebihi standar waktu pelayanan. Capaian ini tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga melampauinya sebesar **5 poin persentase**, sehingga mencerminkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan kekarantinaan kesehatan di BKK Kelas I Samarinda.

Pencapaian tersebut juga menunjukkan bahwa standar waktu pelayanan dapat dipenuhi secara konsisten meskipun selama Semester I Tahun 2026 petugas melaksanakan pemeriksaan terhadap **443 alat angkut kategori merah**, yang memerlukan pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen, dan penilaian faktor risiko sebelum dokumen kekarantinaan kesehatan diterbitkan. Hal ini mencerminkan bahwa proses pelayanan telah dilaksanakan sesuai standar operasional dengan tetap menjaga keseimbangan antara **kecepatan pelayanan** dan **kualitas pengawasan kekarantinaan kesehatan**.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian indikator dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda mampu mempertahankan kualitas pelayanan pada indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 Jam. Meskipun indikator ini baru ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan pelayanan dengan standar waktu penyelesaian kurang dari 2×24 jam telah diterapkan pada tahun sebelumnya sebagai bagian dari standar operasional pelayanan kekarantinaan kesehatan.



Grafik 3.33 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 jam BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026 dibandingkan dengan Tahun 2025

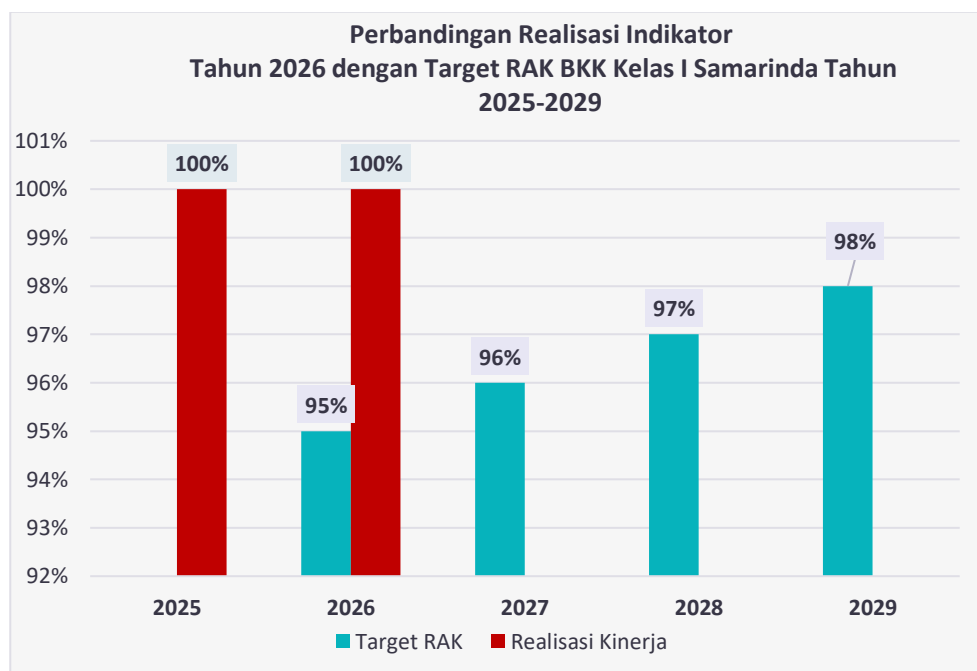
Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator pada Tahun 2025 mencapai 100% dan pada Semester I Tahun 2026 juga mencapai 100%. Dengan demikian, tidak terdapat perubahan tingkat capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda mampu menjaga konsistensi ketepatan waktu penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Konsistensi capaian tersebut mencerminkan bahwa sistem pelayanan kekarantinaan kesehatan telah berjalan secara efektif, didukung oleh penerapan prosedur operasional yang baku, kompetensi petugas, serta pemanfaatan Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES) dalam mendukung proses pemeriksaan, verifikasi, dan penerbitan dokumen. Keberhasilan mempertahankan capaian 100% selama dua periode berturut-turut menunjukkan komitmen BKK

Kelas I Samarinda dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel, sekaligus menjaga kualitas pengawasan terhadap alat angkut yang memiliki faktor risiko kesehatan tinggi.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Samarinda Tahun 2025–2029 menetapkan target indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 Jam sebesar 95% pada Tahun 2026, dengan target yang meningkat secara bertahap menjadi 96% pada Tahun 2027, 97% pada Tahun 2028, dan 98% pada Tahun 2029.



Grafik 3.33 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 jam BKK Kelas I Samarinda Semester I Tahun 2026 dibandingkan dengan RAK 2025-2029

Berdasarkan grafik di atas, Realisasi indikator pada Semester I Tahun 2026 mencapai 100%, sehingga telah melampaui target RAK Tahun 2026 sebesar 5 poin persentase. Capaian tersebut menunjukkan bahwa standar pelayanan yang ditetapkan dalam RAK tidak hanya berhasil dipenuhi, tetapi juga dilaksanakan secara optimal melalui penerbitan seluruh dokumen layanan kekarantinaan kesehatan untuk alat angkut kategori merah dalam waktu kurang dari 2×24 jam.

Pencapaian tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan pelayanan kekarantinaan kesehatan di BKK Kelas I Samarinda telah berada di atas target yang direncanakan dalam dokumen RAK. Meskipun demikian, mengingat

indikator ini merupakan indikator pelayanan publik yang memiliki batas maksimal capaian sebesar 100%, fokus peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya bukan lagi pada peningkatan persentase capaian, melainkan pada mempertahankan konsistensi kualitas pelayanan, meningkatkan keandalan proses pelayanan, serta memastikan ketepatan waktu penerbitan dokumen tetap terjaga meskipun terjadi peningkatan volume maupun kompleksitas pemeriksaan alat angkut

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 Jam merupakan indikator direktif yang ditetapkan khusus bagi Balai Kekarantinaan Kesehatan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit. Target indikator pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 95% dan menjadi bagian dari upaya mendukung pencapaian kinerja organisasi secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, Direktorat Jenderal, hingga Kementerian Kesehatan.

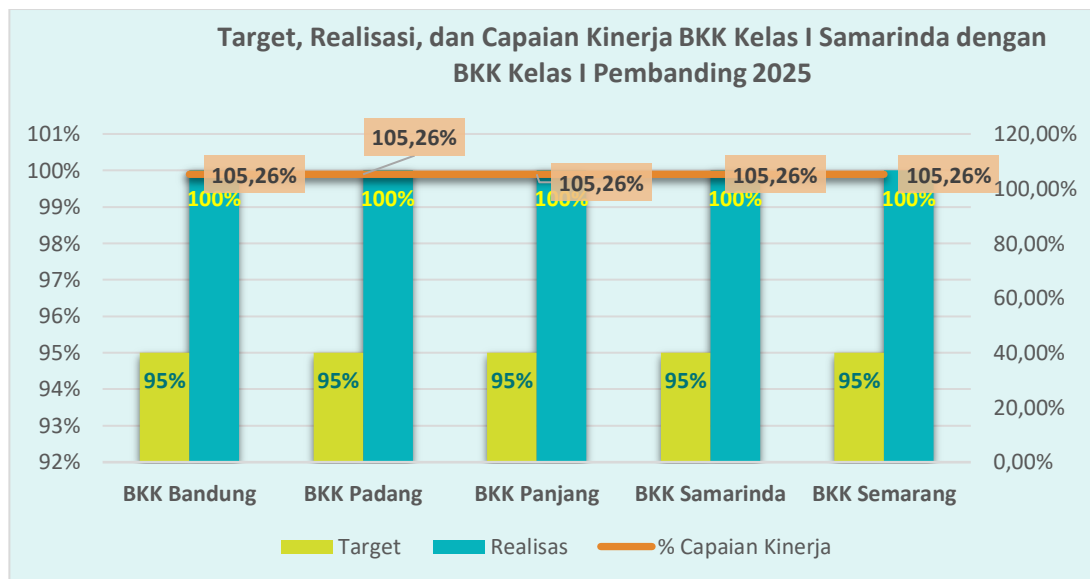
Namun demikian, apabila dibandingkan dengan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, maupun Rencana Aksi Program (RAP) Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, indikator ini tidak memiliki indikator padanan sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan secara langsung. Hal tersebut disebabkan karena indikator ini merupakan indikator teknis pelayanan kekarantinaan kesehatan yang secara khusus digunakan untuk mengukur kualitas dan ketepatan waktu pelayanan pada Balai Kekarantinaan Kesehatan.

Meskipun tidak memiliki pembanding secara nasional, capaian indikator sebesar 100% menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda telah melaksanakan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan dan memberikan kontribusi terhadap penguatan fungsi kekarantinaan kesehatan di pintu masuk negara. Kinerja tersebut mendukung sasaran yang lebih luas dalam penyelenggaraan sistem ketahanan kesehatan nasional, khususnya melalui pencegahan masuk dan keluarnya penyakit serta faktor risiko kesehatan masyarakat melalui pelabuhan dan bandar udara.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Satker dengan Satker lain yang sejenis

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, capaian indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 Jam dibandingkan dengan beberapa Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) yang memiliki indikator sejenis. Hasil perbandingan

menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda memperoleh realisasi sebesar 100% terhadap target 95%, sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 105,26%.



Grafik 3.37 Realisasi Indikator Kinerja Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Pembanding Semester I Tahun 2025

Berdasarkan hasil perbandingan, capaian tersebut setara dengan beberapa BKK lainnya, yaitu BKK Kelas I Bandung, BKK Kelas I Padang, BKK Kelas I Panjang, dan BKK Kelas I Semarang, yang sama-sama berhasil mencapai realisasi 100% dengan tingkat capaian 105,26%. Hal ini menunjukkan bahwa BKK Kelas I Samarinda telah mampu mempertahankan standar pelayanan pada tingkat yang sama dengan satuan kerja yang memiliki kinerja terbaik dalam pelaksanaan indikator tersebut.

Kesetaraan capaian tersebut mengindikasikan bahwa proses pelayanan penerbitan dokumen kekarantinaan kesehatan pada alat angkut kategori merah telah dilaksanakan secara efektif sesuai standar waktu pelayanan yang ditetapkan. Meskipun demikian, capaian yang sama antar beberapa satuan kerja juga menunjukkan bahwa indikator ini merupakan indikator pelayanan dengan batas maksimal capaian sebesar 100%, sehingga perbedaan kinerja ke depan tidak hanya ditentukan oleh besarnya persentase capaian, tetapi juga oleh kemampuan masing-masing satuan kerja dalam mempertahankan kualitas pelayanan di tengah perbedaan volume pelayanan, karakteristik wilayah kerja, serta tingkat kompleksitas pemeriksaan alat angkut.

f. Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator

Dalam rangka mencapai target indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 Jam, BKK Kelas I Samarinda telah melaksanakan berbagai upaya untuk memastikan seluruh proses pelayanan kekarantinaan kesehatan berjalan secara efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya-upaya tersebut meliputi:

- 1) Melaksanakan pemeriksaan kekarantinaan kesehatan secara cepat dan komprehensif terhadap setiap alat angkut kategori merah, meliputi pemeriksaan kesehatan awak alat angkut, pemeriksaan sanitasi, verifikasi dokumen kesehatan internasional, serta penilaian faktor risiko kesehatan sebagai dasar penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES) sebagai media pencatatan, verifikasi, validasi, dan penerbitan dokumen layanan secara elektronik sehingga proses pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi dengan baik.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan agen pelayaran, operator alat angkut, otoritas pelabuhan, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan kelengkapan dokumen dan kesiapan pemeriksaan sebelum alat angkut tiba di pelabuhan, sehingga proses pelayanan dapat dilakukan tanpa menimbulkan keterlambatan.
- 4) Mengoptimalkan penugasan sumber daya manusia melalui pengaturan jadwal pelayanan dan pembagian tugas petugas kekarantinaan kesehatan agar pelayanan tetap berjalan secara optimal meskipun terjadi fluktuasi jumlah kedatangan alat angkut maupun peningkatan proporsi alat angkut kategori merah.
- 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ketepatan waktu penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan melalui pemantauan data pelayanan pada SINKARKES sebagai dasar perbaikan proses pelayanan secara berkelanjutan.
- 6) Meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging dan re-emerging melalui penerapan pemeriksaan berbasis risiko sesuai perkembangan situasi kesehatan global, sehingga proses pelayanan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian tanpa mengurangi ketepatan waktu penerbitan dokumen.

g. Analisis Penyebab Keberhasilan Kinerja dan Alternative Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24

Jam yang mencapai 100% pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kekarantina kesehatan di BKK Kelas I Samarinda telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan. Seluruh dokumen layanan terhadap 443 alat angkut kategori merah berhasil diterbitkan dalam waktu kurang dari 2x24 jam, sehingga target Perjanjian Kinerja sebesar 95% dapat dilampaui. Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor.

- 1) penerapan pelayanan berbasis standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten, sehingga setiap tahapan pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan sanitasi, verifikasi dokumen kesehatan internasional, serta penerbitan dokumen layanan dilaksanakan sesuai ketentuan dan alur pelayanan yang telah ditetapkan.
- 2) optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES) mampu mempercepat proses pencatatan, verifikasi, validasi, dan penerbitan dokumen layanan secara elektronik. Digitalisasi pelayanan tersebut mempercepat proses administrasi sekaligus meningkatkan akurasi data dan kemudahan pemantauan kinerja pelayanan.
- 3) kompetensi dan koordinasi petugas kekarantina kesehatan yang baik memungkinkan seluruh tahapan pemeriksaan terhadap alat angkut kategori merah dilaksanakan secara efektif meskipun menghadapi dinamika jumlah kedatangan alat angkut. Koordinasi dengan agen pelayaran, operator alat angkut, dan instansi terkait juga mendukung kelancaran proses pelayanan sehingga dokumen dapat diterbitkan segera setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap.
- 4) penerapan pengawasan berbasis risiko (risk-based surveillance) menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kecepatan pelayanan dan kualitas pemeriksaan. Meskipun pada periode Februari hingga April proporsi alat angkut kategori merah meningkat sehingga kompleksitas pemeriksaan menjadi lebih tinggi, seluruh proses pelayanan tetap dapat diselesaikan sesuai standar waktu tanpa mengurangi kualitas pengawasan terhadap faktor risiko kesehatan.

Untuk mempertahankan capaian tersebut, berbagai alternatif solusi telah diterapkan, antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan SINKARKES, penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan di lingkungan pelabuhan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketepatan waktu penerbitan dokumen secara berkala, serta peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan penyakit infeksi *emerging* dan *re-emerging*. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif agar kualitas pelayanan tetap terjaga meskipun terjadi peningkatan volume pelayanan maupun perubahan pola risiko alat angkut.

Secara keseluruhan, keberhasilan indikator ini tidak hanya ditunjukkan oleh tercapainya target secara kuantitatif, tetapi juga oleh kemampuan BKK Kelas I Samarinda dalam mempertahankan mutu pelayanan kekarantinaan kesehatan melalui pelayanan yang cepat, tepat, akurat, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan yang diterapkan telah berjalan secara efektif serta mendukung upaya pencegahan masuk dan keluarnya penyakit maupun faktor risiko kesehatan melalui pintu masuk negara.

h. Kendala/Masalah yang dihadapi

Meskipun indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2×24 Jam berhasil mencapai 100%, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang memerlukan perhatian agar kualitas pelayanan dapat terus dipertahankan, yaitu:

1. Fluktuasi jumlah kedatangan alat angkut kategori merah pada setiap periode menyebabkan beban kerja petugas tidak selalu sama. Pada bulan-bulan tertentu, peningkatan jumlah alat angkut kategori merah berpotensi meningkatkan kompleksitas pemeriksaan dan memperpanjang waktu pelayanan apabila tidak diantisipasi dengan baik.
2. Perubahan jadwal kedatangan alat angkut yang dipengaruhi oleh kondisi operasional pelayanan maupun faktor cuaca sering kali mengharuskan petugas melakukan penyesuaian jadwal pemeriksaan dalam waktu yang relatif singkat agar pelayanan tetap dapat diberikan sesuai standar waktu.
3. Meningkatnya kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging dan re-emerging menuntut pelaksanaan pemeriksaan yang lebih komprehensif terhadap alat angkut kategori merah sehingga diperlukan ketelitian yang tinggi tanpa mengurangi ketepatan waktu penerbitan dokumen.
4. Ketergantungan terhadap kelengkapan dokumen dan informasi dari operator atau agen pelayanan dapat memengaruhi kelancaran proses verifikasi apabila dokumen belum tersedia secara lengkap pada saat pemeriksaan dilakukan.

i. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut sekaligus mempertahankan capaian indikator, BKK Kelas I Samarinda telah melaksanakan beberapa langkah penyelesaian sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengaturan jadwal pelayanan dan pembagian tugas petugas sesuai dengan pola kedatangan alat angkut sehingga peningkatan beban kerja dapat diantisipasi tanpa mengurangi kualitas maupun ketepatan waktu pelayanan.

2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan agen pelayaran, operator alat angkut, otoritas pelabuhan, serta instansi terkait guna memperoleh informasi kedatangan kapal dan kelengkapan dokumen lebih awal sehingga pemeriksaan dapat dipersiapkan secara optimal.
 3. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES) untuk mempercepat proses pencatatan, verifikasi, validasi, serta penerbitan dokumen layanan sehingga waktu penyelesaian pelayanan dapat dipertahankan sesuai standar.
 4. Meningkatkan kompetensi petugas melalui penguatan pemahaman terhadap pengawasan berbasis risiko dan perkembangan penyakit infeksi *emerging* maupun *re-emerging* sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif tanpa mengurangi kualitas pengawasan kesehatan di pintu masuk negara.
 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap ketepatan waktu penerbitan dokumen sebagai dasar perbaikan proses pelayanan secara berkelanjutan dan untuk memastikan standar pelayanan tetap terpenuhi pada setiap periode pelaksanaan.
- j. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan adalah efisiensi anggaran yang mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

Realisasi indikator kinerja Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam sampai dengan Semester I Tahun 2026 telah tercapai 100% dari target 95% untuk semester I Tahun 2026. Realisasi anggaran sebesar Rp321.850.002,- dari pagu anggaran Rp 415,634,000,-. Berdasarkan perhitungan didapatkan efisiensi sebesar 0,26436 dengan nilai Efisiensi 116,09%. Berdasarkan hasil tersebut maka nilai efisiensi dikatakan efisien karena dapat mencapai kinerja 100% dengan menggunakan anggaran walaupun melebihi target 50% di Semester I yaitu sebesar 77,44% tetapi tetap mendapatkan capaian maksimal sehingga capaian indikator kinerja tetap dianggap efisien.

- k. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator Persentase Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam didukung oleh pelaksanaan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran pada Kegiatan 7960 Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan sebesar Rp 3,220,442,000,-.
2. Pelaksanaan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan terhadap Alat Angkut. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan awak alat angkut, pemeriksaan sanitasi, verifikasi dokumen kesehatan internasional, serta penilaian faktor risiko kesehatan terhadap alat angkut kategori merah sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini menjadi proses utama dalam penerbitan dokumen layanan kekarantinaan kesehatan secara tepat waktu.
3. Penerapan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan Berbasis Risiko (Risk Based Surveillance) Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan tingkat risiko alat angkut sehingga sumber daya dapat difokuskan pada alat angkut yang memerlukan pengawasan lebih intensif. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas pelayanan tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan.
4. Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Karantina Kesehatan (SINKARKES) Pemanfaatan aplikasi SINKARKES dalam proses pencatatan, verifikasi, validasi, dan penerbitan dokumen layanan secara elektronik mempercepat proses administrasi serta meningkatkan akurasi dan ketertelusuran data pelayanan.
5. Penguatan Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan di Lingkungan Pelabuhan. Koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), operator pelabuhan, agen pelayaran, serta instansi terkait lainnya mendukung kelancaran proses pemeriksaan dan penyelesaian dokumen layanan kekarantinaan kesehatan.
6. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan secara Berkala. Monitoring terhadap ketepatan waktu penerbitan dokumen dilakukan secara rutin melalui data pelayanan pada SINKARKES sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses pelayanan.
7. Peningkatan Kompetensi dan Kesiapsiagaan Petugas. Penguatan kapasitas petugas dalam pelaksanaan pengawasan berbasis risiko serta peningkatan kewaspadaan terhadap penyakit infeksi emerging dan re-emerging mendukung pelaksanaan pelayanan yang cepat, tepat, dan tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dalam kekarantinaan kesehatan.
8. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan. Pelaksanaan pelayanan mengacu pada SOP yang berlaku sehingga setiap tahapan pemeriksaan, verifikasi, dan penerbitan dokumen dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan sesuai standar waktu pelayanan.

- a. Melalui sinergi berbagai program dan kegiatan tersebut, BKK Kelas I Samarinda mampu mempertahankan capaian indikator sebesar 100% pada Semester I Tahun 2026. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kekarantinaan kesehatan telah berjalan secara efektif, didukung oleh pengelolaan sumber daya yang optimal, pemanfaatan teknologi informasi, serta koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mendukung perlindungan kesehatan masyarakat di pintu masuk negara.

7. Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance

a. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- 3) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

b. Definisi Operasional

Tidak ditemukannya penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK yang meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang, termasuk tindakan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kepentingan pihak lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut yang berdasarkan hasil audit dan/atau rekomendasi resmi oleh pejabat/lembaga yang berwenang

c. Cara Perhitungan

Capaian indikator diperoleh melalui perhitungan sebagai berikut:

$$A / B \times 100\% = \%C$$

Keterangan:

- A : Jumlah Penyalahgunaan Wewenang
B : Jumlah Target Penyalahgunaan Wewenang
C : Persentase Penyalahgunaan Wewenang

d. Capaian Indikator

- 1) Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja enyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance Semester I 2026

Realisasi indikator kinerja kegiatan Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* pada Semester I Tahun 2026 sebesar 0, dari target 0 penyalahgunaan atau 100% tidak ada temuan dan tidak dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus karena hasil *undefined* ($\emptyset$). Target, realisasi, dan capaian indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* pada Semester I Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026

Nama BKK	Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK <i>Zero Tolerance</i>		
	Target	Realisasi	Capaian
BKK Samarinda	0	0	#DIV/0!

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa target yang ditetapkan untuk indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* sebesar 0, realisasi indikator kinerja semester I 2026 sebesar 0 dengan capaian #DIV/0! yang artinya *divide by zero* atau eror, tetapi dalam ini hasil yang dimaksud adalah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian untuk indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* telah mencapai dari target indikator dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026. Berdasarkan realisasi semester I 2026, maka proyeksi indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* pada akhir tahun akan tercapai.

2) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* adalah indikator kinerja baru Balai Kekarantinaan Kesehatan. Maka indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja yang sama sama pada tahun sebelumnya. Sehingga pada tahun pertama, indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* memiliki capaian kinerja yang baik.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RAK

Target dan realisasi indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* jika dibandingkan dengan RAK dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* dibandingkan dengan Target RAK BKK Kelas I Samarinda

Tahun	Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK <i>Zero Tolerance</i>	
	Target	Realisasi
2026	0	0
2027	0	0
2028	0	0
2029	0	0

Berdasarkan tabel di atas, target yang ditetapkan untuk RAK BKK Kelas I Samarinda tahun 2025-2029 bersifat sama yaitu 0 dari tahun 2026-2029, Khusus untuk Tahun 2025, tidak ada target dalam RAK karena indikator kinerja ini baru ada pada tahun 2026. Realisasi indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* sebesar 0, sesuai target yang ditetapkan sebesar 0. Melihat realisasi pada semester I 2026, realisasi pada akhir tahun 2026 optimis tercapai.

4) Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I Pembanding

Realisasi indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* pada BKK Kelas I Samarinda semester I 2026 adalah sebesar 0 dari target 0. Target, realisasi, dan capaian kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* BKK Kelas I Samarinda dengan BKK Kelas I pembanding dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* BKK Kelas I Samarinda dibandingkan dengan BKK Kelas I Pembanding Semester I 2026

Nama BKK	Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK <i>Zero Tolerance</i>		
	Target	Realisasi	Capaian
BKK Samarinda	0	0	#DIV/0!
BKK Bandung	0	0	#DIV/0!
BKK Semarang	0	0	#DIV/0!
BKK Padang	0	0	#DIV/0!
BKK Panjang	0	0	#DIV/0!

Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator BKK Kelas I Samarinda dan BKK Kelas I pembanding adalah #DIV/0! yang artinya *divide by zero* atau eror. Tetapu capaian yang dimaksud adalah 100%, artinya semua BKK tersebut sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* adalah profesionalisme pimpinan dan semua

pegawai Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Samarinda dalam menghidupi satuan kerja.

f. Upaya untuk menunjang pencapaian indikator

Tercapainya indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* didukung adanya beberapa kebijakan yaitu tersedianya anggaran pada RO 4815.EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi sebesar Rp 34.123.000.

g. Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Efisiensi penggunaan sumber daya yang digunakan adalah efisiensi anggaran yang mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.

Realisasi kinerja indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* yaitu 0, mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 0, dengan capaian #DIV/0! yang artinya *divide by zero* atau eror tetapi yang dimaksud adalah tercapai 100%. Realisasi anggaran sebesar Rp 2.198.360 dari pagu anggaran Rp 34.123.000. Berdasarkan perhitungan didapatkan efisiensi sebesar 0,93558 dengan nilai Efisiensi 283,89% karena dapat mencapai kinerja 100,00% dengan menggunakan anggaran 6,44% sehingga capaian indikator terkategori efisien.

h. Masalah yang dihadapi

Realisasi indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* yaitu 0, mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 0, dengan capaian #DIV/0! yang artinya *divide by zero* atau eror tetapi yang dimaksud adalah tercapai 100%. Tidak ada masalah dalam pelaksanaan indikator kinerja tersebut.

i. Usul Pemecahan Masalah

Upaya yang dilakukan agar indikator kinerja Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* adalah:

- 1) Audit secara berkala melalui SKI unit kerja atau Inspektorat Jenderal
- 2) Melaksanakan diskusi setiap ada permasalahan terkait kegiatan dan anggaran unit kerja

B. Realisasi Anggaran

Terdapat peningkatan realisasi anggaran pada semester I 2026 dibandingkan dengan semester I 2025 disebabkan oleh percepatan pengadaan barang dan jasa

terutama belanja modal. Secara umum realisasi anggaran semester I 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan
BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Capaian (Pagu DIPA)
1.	7960 I Penyelenggaraan Pelayanan Kekarantinaan Kesehatan	3,220,442,000	1.058.520.863	32,87%
2.	4815 I Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Penanggulangan Penyakit	15,670,975,000	7.858.728.629	50.15%
TOTAL		18,891,417,000	8.917.249.492	47,20%

Sumber: *Data Myintress* per 30 Juni 2026

Berdasarkan tabel di atas, diketahui realisasi anggaran untuk semester I 2026 sebesar 47,20%. Untuk melihat persentase realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 3.13 Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Belanja Pegawai	11.938.927.000	6.212.989.787	52,04%
2.	Belanja Barang	5.871.445.000	1.883.303.283	32,08%
3.	Belanja Modal	1.081.045.000	820.956.422	75,94%
TOTAL		18,891,417,000	8.917.249.492	47,20%

Sumber: *Data Myintress* per 30 Juni 2026

Sampai dengan akhir semester I 2026 telah dilaksanakan 5 kali revisi anggaran:

1. Revisi *Self Blockir* Prioritas presiden, DIPA terbit pada 24 Desember 2025
2. Revisi Triwulan I 2026, DIPA terbit pada 18 Februari 2026
3. Revisi Triwulan II 2026, DIPA terbit pada 12 Mei 2026
4. Revisi KPA pemutakhiran pagu minus
5. Revisi Buka Blokir *Self Blockir*, DIPA terbit 29 Juni 2026

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja, diperlukan anggaran yang memadai. Realisasi anggaran per Indikator Kinerja BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.14 Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja
BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026**

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah	3.220.442.000	1.073.875.233	33,34

No	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2.	Nilai SAKIP Unit Kerja	250.021.000	35.513.378	14,20
3.	Nilai Kinerja Anggaran	96.613.000	-	-
4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	32.616.000	14.810.000	45,41
5.	Persentase Realisasi Anggaran	14.841.968.000	7.500.951.441	50,54
6.	Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam	415.634.000	321.850.002	77,44
7.	Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	32.123.000	2.198.360	68,44
Total		18.891.417.000	8.949.198.414	47,37

Sumber: *Data SAKTI* per 30 Juni 2026

Sedangkan Realisasi anggaran per Rincian Output pada BKK Kelas I Samarinda dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.15 Realisasi Anggaran berdasarkan Rincian Ouput (RO)
BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026**

Kegiatan/KRO/ Rincian Output (RO)		Pagu	Realisasi	%
DO	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	3,220,442,000	1,073,875,233	33.35%
DO.4249	Dukungan Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	3,220,442,000	1,073,875,233	33.35%
PEA	Koordinasi	146,752,000	60,308,770	41.10%
PEA.001	Koordinasi Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	146,752,000	60,308,770	41.10%
PEF	Sosialisasi dan Diseminasi	25,844,000	0	-
PEF.001	Sosialisasi pelaksanaan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah	25,844,000	0	-
QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	71,822,000	10,577,000	14.73 %
QAA.001	Pelayanan Kesehatan di Pelabuhan/Bandara/Lintas Batas	71,822,000	10,577,000	14.73 %
QAH	Pelayanan Publik Lainnya	1,730,480,000	406,269,090	23.48 %
QAH.016	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan	249,463,000	50,906,993	20.41
QAH.017	Layanan Pemeriksaan Orang, Barang, Alat Angkut	413,770,000	55,155,355	13.33
QAH.U01	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Pelabuhan Penyeberangan	145,200,000	37,759,500	26.01 %
QAH.U02	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit di Bandar Udara	88,000,000	17,600,000	20.00 %
QAH.U07	Layanan Pengendalian Faktor Risiko Penyakit DBD	30,650,000	7,118,037	23.22 %
QAH.U08	Layanan Survei Faktor Risiko Penyakit Pes	184,653,000	71,333,540	38.63 %
QAH.U09	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit diare	20,244,000	7,528,120	37.19 %
QAH.U11	Layanan survei faktor risiko penyakit DBD	77,760,000	22,950,000	29.51 %

Kegiatan/KRO/ Rincian Output (RO)		Pagu	Realisasi	%
QAH.U12	Layanan survei faktor risiko penyakit malaria	75,680,000	10,540,000	13.93 %
QAH.U13	Layanan survei faktor risiko penyakit diare	44,520,000	15,810,000	35.51 %
QAH.U14	Layanan survei faktor risiko penyakit HIV AIDS	13,140,000	4,958,425	37.74 %
QAH.U15	Layanan survei faktor risiko penyakit TB	65,460,000	35,513,120	54.25 %
QAH.U20	Layanan penemuan aktif surveilans migrasi malaria	58,200,000	7,650,000	13.14 %
QAH.U32	Layanan pengendalian faktor risiko penyakit pada situasi khusus skala besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	217,500,000	55,680,000	25.60 %
QAH.U38	Layanan kegawatdaruratan dan rujukan jarak dekat Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi	46,240,000	5,766,000	12.47 %
RAB	Sarana Bidang Kesehatan	1,245,544,000	596,720,373	47.91 %
RAB.001	Pengadaan alat dan bahan kekarantina kesehatan di pintu masuk	1,245,544,000	596,720,373	47.91 %
WA	Program Dukungan Manajemen	15,670,975,000	7,875,323,181	50.25 %
WA.4815	Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	15,670,975,000	7,875,323,181	50.25 %
CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	404,400,000	321,850,002	79.59 %
CAN.01	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	404,400,000	321,850,002	79.59 %
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14,733,480,000	7,395,873,381	50.20 %
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	34,123,000	2,198,360	6.44 %
EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	11,234,000	0	-
EBA.994	Layanan Perkantoran	14,688,123,000	7,393,675,021	50.34 %
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	153,845,000	107,276,420	69.73 %
EBB.951	Layanan Sarana Internal	153,845,000	107,276,420	69.73 %
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	250,021,000	35,513,37	14.20 %
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	250,021,000	35,513,37	14.20 %
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	129,229,000	14,810,000	11.46 %
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	96,613,000	0	-
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	32,616,000	14,810,000	45.41 %
Total		18.891.417.000	8.949.198.414	47,37

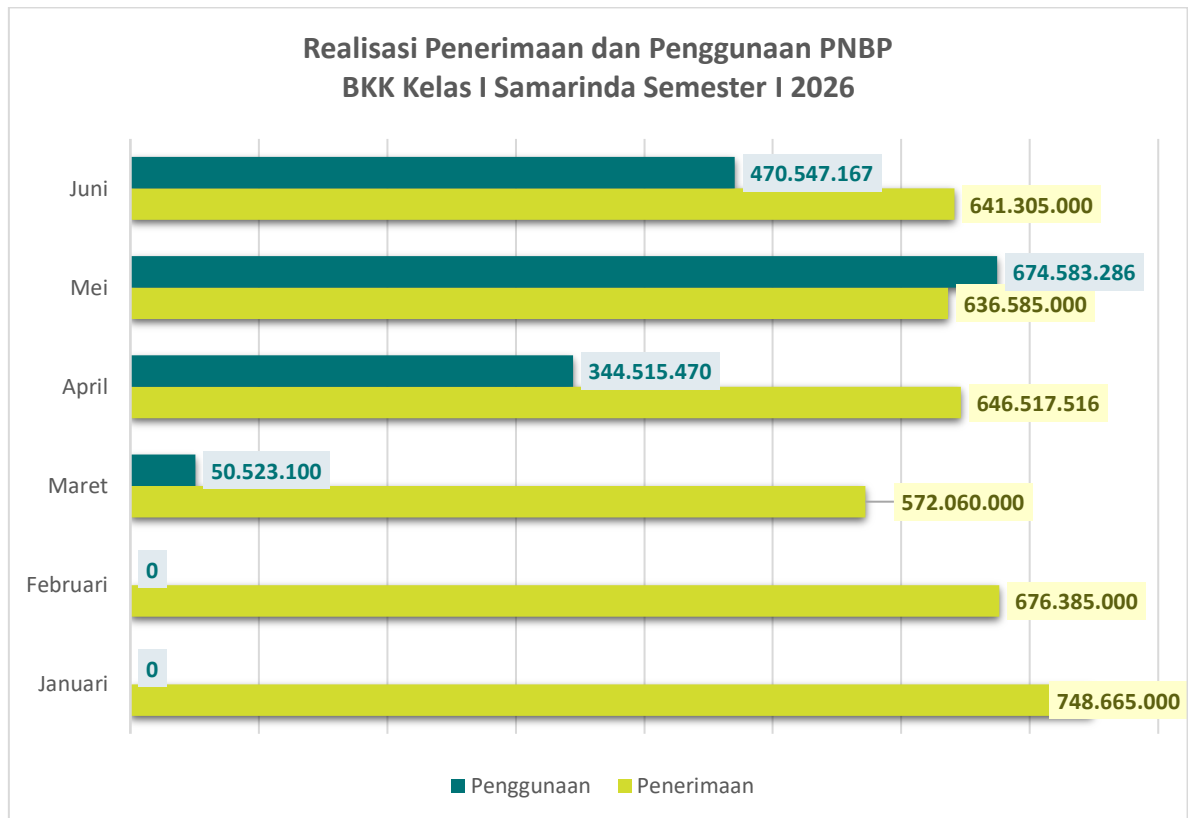
Sumber: *Data SAKTI* per 30 Juni 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi anggaran telah tercapai sebesar 47,37%. Pagu anggaran BKK Kelas I Samarinda bersumber dari Rupiah Murni dan PNPB. Penerimaan dan penggunaan anggaran bersumber dana PNPB sampai dengan Semester I 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16 Penerimaan Negara Bukan Pajak BKK Kelas I Samarinda
Semester I 2026**

No	PNBP	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1.	Penerimaan	6.004.665.000	3.921.517.516	65,31%
2.	Penggunaan	3.122.249.000	1.540.169.023	49,33%

Sementara untuk realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat dilihat pada Grafik di bawah ini.



Grafik 3.39 Penerimaan Negara Bukan Pajak BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026

Berdasarkan grafik di atas, dapat terlihat bahwa penerimaan tertinggi yaitu pada Bulan Februari, sedangkan penerimaan PNBP terendah adalah pada Bulan Maret. Kemudian untuk penggunaan Pagu Anggaran Bersumber Dana PNBP terendah yaitu pada Bulan Januari dan Februari dan tertinggi pada Bulan Desember. Untuk target penerimaan PNBP sampai dengan akhir semester I 2025 telah tercapai sebesar Rp 3.921.517.516 atau 65,31% dari target Rp 6.004.665.000,-. Dengan capaian seperti ini maka untuk pada akhir tahun 2026 target penerimaan PNBP optimis tercapai melebihi target yang ditetapkan. Sementara untuk penggunaan PNBP sampai dengan akhir semester I 2026 sebesar 49,33%. %).

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada masing-masing indikator kinerja BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.17 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Indikator Kinerja
BKK Kelas I Samarinda Semester I 2026**

No	Indikator	Pagu Anggaran Keluaran (PAKi)	Realisasi Anggaran Keluaran (RAKi)	Capaian Keluaran (CKi)	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
1.	Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit	3,220,442,000	1,073,875,233	1.3158	0.74657	236.64%	Efisien

	dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah						
2.	Nilai SAKIP Unit Kerja	250,021,000	35,513,378	1.0157	0.86015	265.04%	Efisien
3.	Nilai Kinerja Anggaran	96,613,000	-	1.6165	1.00000	300.00%	Efisien
4.	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti	32,616,000	14,810,000	1.0526	0.56863	192.16%	Efisien
5.	Persentase Realisasi Anggaran	14,841,968,000	7,500,951,441	0.9440	0.46463	166.16%	Efisien
6.	Penerbitan Dokumen Layanan Kekekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam	415,634,000	321,850,002	1.0526	0.26436	116.09%	Efisien
7.	Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	34,123,000	2,198,360	1.0000	0.93558	283.89%	Efisien

Dari 7 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RAK BKK Kelas I Samarinda pada tabel diatas dapat terlihat bahwa semua indikator kinerja termasuk dalam kategori efisien. Nilai efisiensi terbesar adalah indicator kinerja Nilai Kinerja Anggaran karena berhasil mencapai nilai capaian output sebesar 161,65% dengan realisasi anggaran Rp 0.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa lima dari tujuh indikator kinerja telah mencapai target semester I tahun 2026, dengan rincian sebagai berikut:

1. Realisasi indikator kinerja IKK 24.2.1. Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah sebesar 100% dari target 76% dengan capaian kinerja sebesar 131,58%
2. Realisasi indikator kinerja IKM 33.1.1. Nilai SAKIP Unit Kerja sebesar 84,30 dari target 83 dengan capaian kinerja sebesar 101,57%
3. Realisasi indikator kinerja IKM 33.2.1. Nilai Kinerja Anggaran sebesar 74,36 dari target 46 dengan capaian kinerja sebesar 161,65%
4. Realisasi indikator kinerja IKM 33.4.1. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti sebesar 100,00% dari target 95% dengan capaian kinerja sebesar 105,26%
5. Realisasi indikator kinerja IKD 33.1.1. Persentase Realisasi Anggaran sebesar 47,20% dari target 50% dengan capaian kinerja sebesar 94,40%
6. Realisasi indikator kinerja IKD 33.1.2. Penerbitan Dokumen Layanan Kekarantinaan Kesehatan untuk Alat Angkut dalam Kategori Merah Kurang dari 2x24 Jam sebesar 100,00% dari target 95% dengan capaian kinerja sebesar 105,26%
7. IKD 33.1.3. Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK *Zero Tolerance* sebesar 0 penyalahgunaan dari target 0 penyalahgunaan dengan capaian kinerja sebesar 100,00%

Capaian sasaran kegiatan pada semester I tahun 2026 sebesar 114,25%. Capaian ini lebih tinggi dari semester I 2025 sebesar 87,18%, lebih tinggi dari capaian tahun 2024 sebesar 104,67%, lebih tinggi dari capaian tahun 2023 sebesar 105,20%, lebih tinggi dari capaian tahun 2022 sebesar 106,16%, dan lebih tinggi dari capaian tahun 2021 sebesar 108,6%.

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebesar Rp 8.917.249.492 atau 47,20% dari anggaran sebesar Rp 18.891.417.000, atau sebesar 47,20% dari total anggaran.

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran menjadi indikator dengan efisiensi sumber pembiayaan tertinggi. Realisasi indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran

sebesar 74,36% dari target sebesar 46 dengan capaian 161,65%. Realisasi anggaran sebesar Rp 0 dari pagu anggaran Rp 96.613.000,-. Berdasarkan perhitungan didapatkan efisiensi sebesar 1,00000 dengan nilai Efisiensi 300,00% karena dapat mencapai kinerja 161,65% dengan menggunakan anggaran 0 sehingga menjadi indikator dengan efisiensi sumber dana tertinggi.

B. Tindak Lanjut

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka perlu dilaksanakan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam pencapaian target dan pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun selanjutnya:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan deteksi penyakit dan faktor risiko kesehatan di seluruh wilayah kerja.
2. Memperbarui pemetaan risiko pintu masuk sebagai dasar penguatan pengawasan pada Semester II Tahun 2026
3. Menyelesaikan seluruh tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP sesuai rencana aksi yang telah disusun
4. Melaksanakan reviu internal terhadap dokumen dan bukti dukung SAKIP sebelum pelaksanaan evaluasi akhir tahun
5. Melaksanakan monitoring bulanan terhadap Nilai Kinerja Anggaran (NKA), IKPA, dan deviasi Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk memastikan pelaksanaan anggaran sesuai target
6. Mempercepat penyelesaian revisi anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang masih tertunda agar target kinerja akhir tahun dapat tercapai
7. Melakukan monitoring berkala terhadap status tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk memastikan seluruh rekomendasi tetap terselesaikan tepat waktu
8. Melaksanakan reviu internal sebagai upaya pencegahan terhadap potensi temuan berulang
9. Mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pengadaan barang/jasa sesuai jadwal pelaksanaan Semester II
10. Melaksanakan evaluasi realisasi anggaran secara berkala untuk mengidentifikasi deviasi dan menetapkan langkah percepatan
11. Melaksanakan monitoring ketepatan waktu penerbitan dokumen melalui SINKARKES secara berkala untuk menjaga standar pelayanan kurang dari 2×24 jam

12. Memperkuat koordinasi dengan agen pelayaran, operator pelabuhan, dan instansi terkait guna memastikan kelengkapan dokumen sebelum kedatangan alat angkut
13. Melaksanakan pengawasan internal secara berkala terhadap kepatuhan pelaksanaan tugas dan penerapan kode etik
14. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai sebagai upaya menjaga budaya integritas

Dari rencana tindak lanjut yang direncanakan di tahun 2024, beberapa telah dilaksanakan pada tahun 2025, antara lain:

1. Peningkatan kegiatan koordinasi dan sinergitas lintas sektor/lintas program dan stake holder dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi kekarantinaan, koordinasi dengan klinik terkait vaksinasi internasional, adanya kegiatan Desiminasi informasi kegiatan kekarantinaan dengan lintas sektor, adanya kegiatan konsultasi baik dengan pusat maupun dari wilayah kerja ke kantor induk BKK Kelas I Samarinda.
2. Peningkatan kompetensi SDM telah dilakukan pemetaan kebutuhan pengembangan SDM melalui pelatihan oleh kepegawaian melalui link <https://link.kemkes.go.id/datapelatihanbkkcmd> dan adanya beberapa pelatihan yang telah diikuti oleh SDM teknis antara lain pelatihan pengendalian risiko lingkungan, pelatihan BTCLS ACLS ATLS, dan workshop occupational medicine.

Dari rencana tindak lanjut pada tahun 2024 dan telah dilaksanakan secara bertahap di tahun 2025, capaian kinerja yang telah mencapai target diharapkan dapat dipertahankan pada tahun 2025. Beberapa tindak lanjut yang dimaksud antara lain:

1. Masih harus terus meningkatkan koordinasi dan sinergitas lintas sektor/lintas program dan *stakeholder* terkait pelaksanaan dan dukungan kegiatan penunjang kinerja BKK Kelas I Samarinda baik di induk maupun wilayah kerja
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kinerja secara optimal
3. Meningkatkan kompetensi SDM teknis melalui pendidikan dan pelatihan, seminar/workshop baik daring maupun luring
4. Membangun kerjasama tim (*teamwork*) yang handal dan solid agar tercipta budaya kerja BerAkhlak
5. Memaksimalkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian kinerja untuk meningkatkan capaian kinerja.



KERTAS KERJA

PERHITUNGAN KINERJA

SEMESTER I TAHUN 2026

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I SAMARINDA



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) 24.2.1
PERSENTASE PINTU MASUK YANG MELAKSANAKAN DETEKSI PENYAKIT DAN
FAKTOR RISIKO KESEHATAN BERPOTENSI KLB/WABAH

No.	Kantor Wilayah Kerja	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI
1	Pelabuhan Samarinda (Induk)	1	1	1	1	1	1
2	Bandara APT Pranoto	0	0	0	0	0	1
3	Tanjung Santan	1	1	1	1	1	1
4	LhokTuan	1	1	1	1	1	1
5	Tanjung Laut	1	1	1	1	1	1
6	Sangatta	1	1	1	1	1	1
7	Sangkulirang	1	1	1	1	1	1
	Total	6	6	6	6	6	7
	Target	7	7	7	7	7	7
	Realisasi	85.71%	85.71%	85.71%	85.71%	85.71%	100.00%

Keterangan

1 = Pintu masuk negara yang melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan

0 = Pintu masuk yang belum/kurang lengkap melakukan pemeriksaan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan

CAPAIAN KINERJA SEMSTER I TAHUN 2026

No	PARAMETER	TARGET 2026	REKAPITULASI CAPAIAN PARAMETER PER PELABUHAN / BANDARA							TOTAL
			Induk-Pelabuhan Samarinda	Bandar a APT Pranoto	Tanjung Santan	Lhok Tuan	Tanjung Laut	Sangatta	Sangku-lirang	
Persentase Pintu Masuk yang Melaksanakan Deteksi Penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Berpotensi KLB/Wabah		76%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4	4	4	4	4	4	4	4
A	Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengawasan / Pemeriksaan Alat Angkut		1	1	1	1	1	1	1	7
	Total Deteksi Faktor Risiko Penyakit		23.017	1	595	1.327	1.701	2.459	3.211	32.311
1	RBA kapal dengan risiko tinggi (merah)		186		0	16	37	101	104	444
2	RBA kapal dengan risiko sedang (kuning)		223		130	25	33	119	91	621
3	RBA kapal dengan tidak berisiko (hijau)		0		148	29	14	49	29	269
4	PHQC		17.153		308	1.043	1.371	1.512	2.286	23.673
5	COP		409		0	70	84	271	224	1.058
6	SSCC		7		0	0	1	0	0	8
7	SSCEC		3.036		5	63	61	172	229	3.566

No	PARAMETER	TARGET 2026	REKAPITULASI CAPAIAN PARAMETER PER PELABUHAN / BANDARA							TOTAL
			Induk-Pelabuhan Samarinda	Bandara APT Pranoto	Tanjung Santan	Lhok Tuan	Tanjung Laut	Sanggatta	Sangkulirang	
8	P3K		2.003		4	81	100	235	248	2.671
9	GCDH (Ground Crossing Declaration of Health)		0		0	0	0	0	0	0
10	Jumlah pemeriksaan kapal/pesawat/kendaraan darat lainnya		0	1	0	0	0	0	0	1
B	Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengawasan /Pemeriksaan Orang / Pelaku Perjalanan		1	1	1	1	1	1	1	7
	Total Deteksi Faktor Risiko Penyakit		9.155	985	344	435	163	383	311	11.776
1	SSHP-All Indonesia: Jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan tidak berisiko (hijau)		8.339	0	148	0	0	0	0	8.487
2	SSHP-All Indonesia: Jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan tidak berisiko (kuning)		138	0	130	0	0	0	0	268
3	SSHP-All Indonesia: Jumlah PPLN dengan deklarasi kesehatan tidak berisiko (merah)		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Sentinel site ILI: Jumlah kasus Influenza Like Illness (ILI)(Bagi BKK yang tidak menjadi sentinel site ILI dapat dikosongi)		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Pemeriksaan surveilans migrasi malaria (Jumlah orang/sampel yang diperiksa)		338	0	0	278	0	317	209	1.142
6	Survei faktor risiko TB (Jumlah orang/sampel yang diperiksa)		106	55	41	53	50	0	52	357
7	Jumlah survei faktor risiko HIV (Jumlah orang/sampel yang diperiksa)		0	0	25	25	50	0	50	150
8	Surat keterangan laik terbang (SKLT)		0	836	0	0	0	0	0	836
9	Surat keterangan tidak laik terbang		0	9	0	0	0	0	0	9
10	Jumlah orang melakukan pengujian kesehatan		7	75	0	0	13	13	0	108
11	Jumlah pengawasan/pemeriksaan pada orang lainnya		227	10	0	79	50	53	0	419
C	Pelabuhan/Bandara yang Melakukan Pengawasan / Pemeriksaan Barang		1	1	1	1	1	1	1	7
	Total Deteksi Faktor Risiko Penyakit		143.609	10	29	65.116	84	268	224	209.340
1	Surat izin angkut jenazah/abu jenazah/kerangka		0	10	0	0	0	0	0	10
2	Dokumen MTA (Material Transfer Agreement)		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dokumen/sertifikat kesehatan untuk bahan		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dokumen/sertifikat kesehatan untuk OMKABA		101	0	0	0	0	0	0	101

No	PARAMETER	TARGET 2026	REKAPITULASI CAPAIAN PARAMETER PER PELABUHAN / BANDARA							TOTAL
			Induk-Pelabuhan Samarinda	Bandar a APT Pranoto	Tanjung Santan	Lhok Tuan	Tanjung Laut	Sanggatta	Sangku-lirang	
5	Kegiatan pengawasan atau pemeriksaan barang lainnya (kargo penumpang/obat dan alkes pada		143.508	0	29	65.116	84	268	224	209.229
D	Pengawasan / Pemeriksaan Lingkungan		1	1	1	1	1	1	1	7
	Total Deteksi Faktor Risiko Penyakit		2.197	265	52	274	211	413	571	3.983
1	Sertifikat air bersih		2.070	0	6	216	164	372	506	3.334
2	Sertifikat jasa boga		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Survei kualitas air di lingkungan bandara/pelabuhan/PLBN		30	72	6	12	12	12	24	168
4	Survei kualitas udara di lingkungan bandara/pelabuhan/PLBN		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Survei kualitas tanah di lingkungan bandara/pelabuhan/PLBN		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Survei kualitas TPP (Tempat Pengelolaan Pangan)		32	135	6	12	12	6	18	221
7	Survei faktor risiko malaria (Anopheles)		12	6	6	6	6	6	6	48
8	Survei faktor risiko DBD (Aedes)		12	6	6	6	6	6	6	48
9	Survei faktor risiko diare (lalat dan kecoak)		6	6	6	6	6	6	6	42
10	survei faktor risiko pes (tikus)		5	4	4	4	5	5	5	32
11	Jumlah pengawasan/pemeriksaan lingkungan lainnya		30	36	12	12	0	0	0	90

Samarinda, Juli 2026
Plh. Kepala BKK Kelas I Samarinda



Ratna Sari Dewi, S.T., M.Kes.
NIP. 197110122002122001

INDIKATOR KINERJA MANDATORY (IKM) 33.1.1 NILAI SAKIP UNIT KERJA

LEMBAR KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

BKK Kelas I Samarinda

TAHUN 2025

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30	22.8	76.00%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6	6	100.00%
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9	6.3	70.00%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15	10.5	70.00%
2	PENGUKURAN KINERJA	30	26.7	89.00%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6	6	100.00%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9	7.2	80.00%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15	13.5	90.00%
3	PELAPORAN KINERJA	15	13.8	92.00%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	3	100.00%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya	4.5	4.05	90.00%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.5	6.75	90.00%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	21	84.00%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	5	100.00%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.5	6	80.00%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.5	10	80.00%
Nilai Akuntabilitas Kinerja / Kategori Predikat			84.3	A



Samarinda, Juli 2026

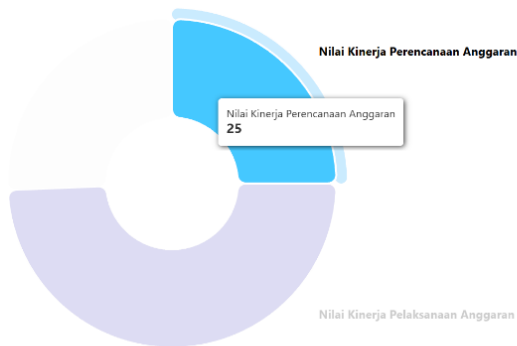
Plh. Kepala BKK Kelas I Samarinda

Ratna Sari Dewi, S.T., M.Kes.

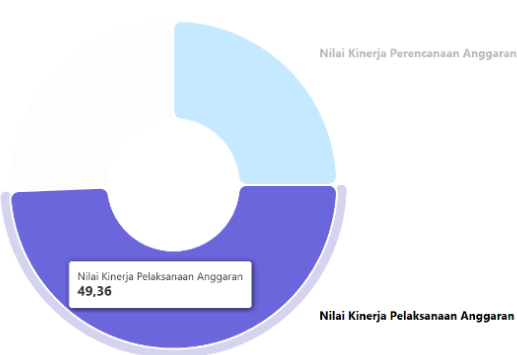
NIP. 197110122002122001

INDIKATOR KINERJA MANDATORY (IKM) 33.2.1 NILAI KINERJA ANGGARAN

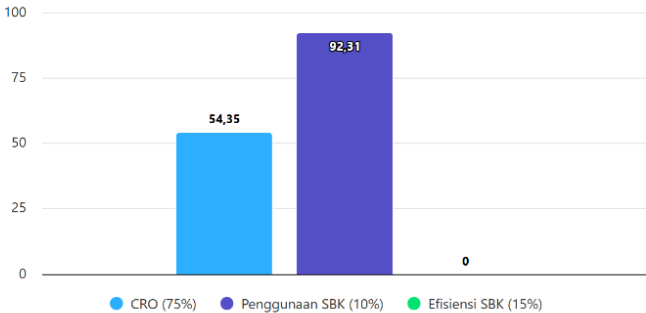
Nilai Kinerja Anggaran



Nilai Kinerja Anggaran

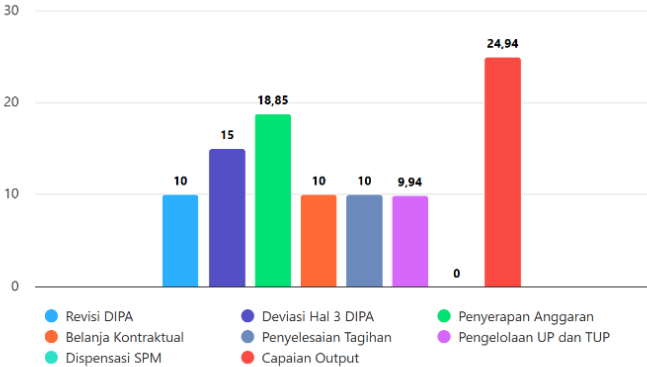


Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

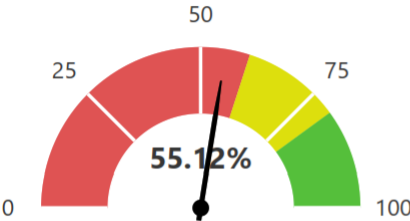


"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi!"

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Progress Rincian Output



Jumlah RO sebanyak 27 RO
- 1 RO sudah tercapai (progress = 100%)

55.12 adalah Rata-rata progress seluruh capaian RO di Satuan Kerja Balai kekarantinaan kesehatan kelas i samarinda

Data Anomali

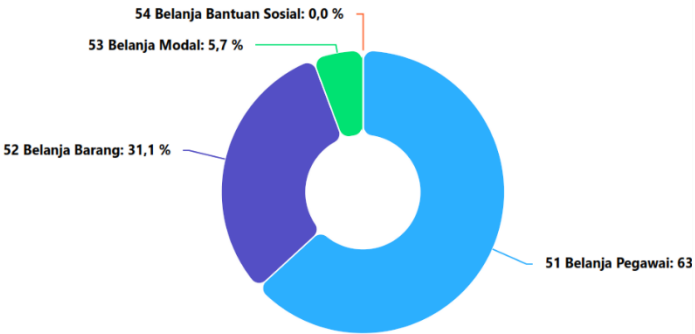
Kondisi	Keterangan	Jumlah RO	Persentase
Case 1	PCRO dilaporkan 0 meskipun telah ada realisasi anggaran	0	0%
Case 2	PCRO dilaporkan lebih rendah dari pada realisasi anggaran	0	0%
Case 3	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) masih 0	0	0%
Case 4	PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) tidak mencapai target/volume DIPa	0	0%

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

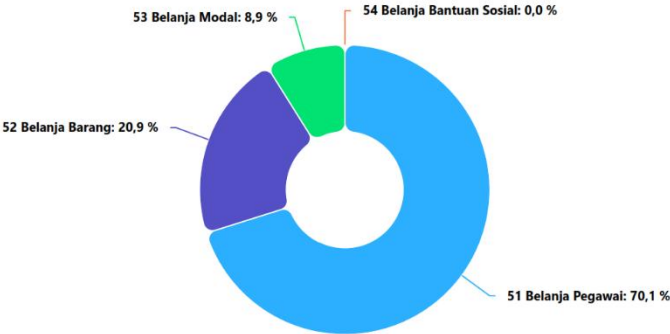
Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	11.938.927.000	6.570.104.629	55.03 %
52 Belanja Barang	5.871.445.000	1.960.784.625	33.40 %
53 Belanja Modal	1.081.045.000	835.935.722	77.33 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0.00 %

Komposisi Alokasi Anggaran



Komposisi Realisasi Anggaran



Partisipasi Satuan Kerja

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	415825	BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	!	!	!	!	!	!

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Samarinda, Juli 2026
Plh. Kepala BKK Kelas I Samarinda


Ratna Sari Dewi, S.T., M.Kes.
NIP. 197110122002122001

INDIKATOR KINERJA MANDATORY (IKM) 33.4.1
PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG TELAH TUNTAS
DITINDAKLANJUTI

No	Jenis Pemeriksaan	Periode	Keterangan
1	Pemeriksaan Laporan Keuangan	2025 - 2026	Tidak termasuk sampel pemeriksaan BPK
2	Audit Kepatuhan Transformasi Kekarantinaan Kesehatan	2025 - 2026	Audit oleh Inspektorat Jenderal. Semua 7 temuan telah di Tindak Lanjuti.
3	Sisa rekomendasi dari tahun sebelumnya	2024 – 2025	Tidak ada

Uraian	Jumlah
Total rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang wajib ditindaklanjuti pada periode laporan	0
Jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti	0
Jumlah rekomendasi yang belum/tidak ditindaklanjuti	0
Persentase	100%

Samarinda, Juli 2026
Plh. Kepala BKK Kelas I Samarinda



Ratna Sari Dewi, S.T., M.Kes.
NIP. 197110122002122001

INDIKATOR KINERJA DIREKTIF (IKD) 33.1.1 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

NO	Kode Nama Satker	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	Bansos	Lain-Lain	Transfer	
1	415825 BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I SAMARINDA	PAGU	11.938.927.000	5.871.445.000	1.081.045.000	0	0	0	0	0	0	18.891.417.000
		REALISASI	6.212.989.787	1.883.303.283	820.956.422	0	0	0	0	0	0	8.917.249.492
			52.04%	32.08%	75.94%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47.20%
		SISA	5.725.937.213	3.988.141.717	260.088.578	0	0	0	0	0	0	9.974.167.508
	GRAND TOTAL	PAGU	11.938.927.000	5.871.445.000	1.081.045.000	0	0	0	0	0	0	18.891.417.000
		REALISASI	6.212.989.787	1.883.303.283	820.956.422	0	0	0	0	0	0	8.917.249.492
		%	52.04%	32.08%	75.94%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	47.20%
		SISA	5.725.937.213	3.988.141.717	260.088.578	0	0	0	0	0	0	9.974.167.508

Samarinda, Juli 2026
 Plh. Kepala BKK Kelas I Samarinda



Ratna Sari Dewi, S.T., M.Kes.
 NIP. 197110122002122001

INDIKATOR KINERJA DIREKTIF (IKD) 33.1.2
PENERBITAN DOKUMEN LAYANAN KEKARANTINAAN KESEHATAN UNTUK ALAT ANGKUT DALAM KATEGORI MERAH
KURANG DARI 2X24 JAM

No	Pelabuhan/ Bandara	Target 2026	Januari			Februari			Maret		
			Kategori Merah	Dokumen terbit < 2×24 Jam	% Capaian	Kategori Merah	Dokumen terbit < 2×24 Jam	% Capaian	Kategori Merah	Dokumen terbit < 2×24 Jam	% Capaian
1	Samarinda - Induk	95%	7	7	100%	49	49	100%	28	28	100%
2	Bandara APT Pranoto	95%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
3	Tanjung Santan	95%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
4	Lhok Tuan	95%	1	1	100%	2	2	100%	4	4	100%
5	Tanjung Laut	95%	1	1	100%	8	8	100%	10	10	100%
6	Sangatta	95%	11	11	100%	20	20	100%	22	22	100%
7	Sangkulirang	95%	7	7	100%	20	20	100%	23	23	100%

No	Pelabuhan/ Bandara	Target 2026	April			Mei			Juni		
			Kategori Merah	Dokumen terbit < 2×24 Jam	% Capaian	Kategori Merah	Dokumen terbit < 2×24 Jam	% Capaian	Kategori Merah	Dokumen terbit < 2×24 Jam	% Capaian
1	Samarinda - Induk	95%	41	41	100%	32	32	100%	29	29	100%
2	Bandara APT Pranoto	95%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
3	Tanjung Santan	95%	0	0	100%	0	0	100%	0	0	100%
4	Lhok Tuan	95%	4	4	100%	3	3	100%	5	5	100%
5	Tanjung Laut	95%	6	6	100%	3	3	100%	9	9	100%
6	Sangatta	95%	19	19	100%	12	12	100%	17	17	100%
7	Sangkulirang	95%	17	17	100%	20	20	100%	17	17	100%

**Jumlah Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan Alat Angkut Kategori Merah,
Kuning, Hijau Triwulan II Pelabuhan Samarinda & Wilayah Kerja 2026**

Bulan	Jumlah Alat Angkut Kategori Merah	Jumlah Alat Angkut Kategori Kuning	Jumlah Alat Angkut Kategori Hijau	Jumlah
Januari	26	137	17	180
Februari	99	69	18	186
Maret	87	60	23	170
April	87	61	15	163
Mei	70	89	25	184
Juni	74	80	13	172
Jumlah	443	496	116	1055

**Jumlah Penerbitan Dokumen Karantina Kesehatan Alat Angkut Kategori Merah
Semester I Tahun 2026**

Bulan	Jumlah Alat Angkut Kategori Merah	Dokumen Terbit < 2 x 24 Jam	Dokumen Terbit ≥ 2 x 24 Jam	Capaian
Januari	26	26	0	100%
Februari	99	99	0	100%
Maret	87	87	0	100%
April	87	87	0	100%
Mei	70	70	0	100%
Juni	74	74	0	100%
	433	433		100%

Samarinda, Juli 2026
Plh. Kepala BKK Kelas I Samarinda



Ratna Sari Dewi, S.T., M.Kes.
NIP. 197110122002122001

INDIKATOR KINERJA DIREKTIF (IKD) 33.1.3
PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KEPALA BKK ZERO TOLERANCE

Indikator	Target 2026	Capaian Kinerja Per Bulan											
		Januari		Februari		Maret		April		Mei		Juni	
		Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
Penyalahgunaan kewenangan Kepala BKK zero tolerance	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100

Capaian Indikator

Indikator Kinerja	Target Penyalahgunaan Wewenang	Jumlah Penyalahgunaan Wewenang	Capaian
Penyalahgunaan Kewenangan Kepala BKK Zero Tolerance	0	0	100%

Samarinda, Juli 2026
 Plh. Kepala BKK Kelas I Samarinda



Ratna Sari Dewi, S.T., M.Kes.
 NIP. 197110122002122001